

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Kota Jambi Tahun 2021 merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah kepada instansi yang lebih tinggi dan kepada masyarakat. Laporan ini juga merupakan dokumen penting dalam siklus perencanaan, karena dapat dijadikan sebagai umpan balik untuk masukan tahun berikutnya. Disamping itu laporan ini diharapkan dapat membantu penyusunan rencana strategis dan rencana kinerja serta pelaksanaan pengukuran kinerja.

Dokumen ini menjadi penting karena merupakan data terpadu antara kinerja anggaran yang mendukungnya, antara sasaran dan keluaran yang dicapai, sehingga dapat menjadi instrumen untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan produktivitas instansi.

Dalam penyusunan laporan ini telah dilakukan berbagai upaya agar dapat menghasilkan suatu laporan yang baik, namun demikian kesemuanya tidak terlepas dari berbagai kekurangan. Karenanya kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan, untuk kesempurnaan laporan ini. Mudah-mudahan dengan laporan ini dapat mencerminkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Jambi.

Akhir kata, kami berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus untuk memacu peningkatan kinerja bagi seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Jambi di masa mendatang.

Jambi, Maret 2022

WALIKOTA JAMBI

H. SYARIF FASHA, ME



RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mewajibkan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, serta Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mewajibkan Kepala Daerah melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerahnya, maka laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan dilengkapi dengan penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus dibuat oleh setiap daerah, hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan apa yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2018-2023, pada tahun 2021 Pemerintah Kota Jambi melaksanakan 4 (Empat) Prioritas Pembangunan, 11 (Sebelas) tujuan pembangunan dan 22 (Dua Puluh Dua) sasaran pembangunan, 37 (tiga puluh tujuh) Strategi Pembangunan dan 48 (Empat puluh delapan) Arah Kebijakan serta 34 (Tiga Puluh Empat) Indikator Kinerja Utama. Untuk mencapai sasaran tersebut dialokasikan dana sebesar Rp. 1.961.694.991,1 terealisasi sebesar Rp. 1.739.810.416,8 (88,69%)

Dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2021 diperoleh capaian target Indikator Kinerja Utama sebesar **76,47%** masuk dalam kategori capaian **SANGAT TINGGI, 5,88%** masuk dalam kategori capaian **TINGGI, 5,88** masuk dalam kategori capaian **RENDAH, 2,94** masuk dalam kategori capaian **SANGAT RENDAH, dan 8,82** belum dapat di hitung capaian indikatornya. Hasil ini menunjukkan bahwa bahwa Pemerintah Kota Jambi secara keseluruhan berhasil melaksanakan visi dan misi Kota Jambi.



Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota Jambi ke depan. *Yaitu*, masih rendahnya realisasi investasi dan persentase daya saing produk IKM yang merupakan dampak dari pandemi covid-19 pada tahun 2021. hal ini menjadi perhatian bukan hanya bagi Pemerintah Kota Jambi tetapi juga menjadi perhatian secara nasional maupun internasional, pentingnya koordinasi dan sinergi antara Pemda Kota Jambi dengan berbagai unsur baik di wilayah Kota Jambi, daerah yang berbatasan dengan Kota Jambi maupun juga dengan pihak-pihak di luar pemerintah, khususnya pihak pelaku usaha.

Koordinasi dan sinergi yang lebih optimal diharapkan bisa memberi jawaban untuk memastikan bahwa upaya yang dilakukan berbagai pihak, dalam beragam cara sesuai dengan kompetensi dan tugas fungsi masing-masing, berorientasi kepada pencapaian tujuan yang sama.

Pemerintah Kota Jambi senantiasa akan melakukan segala upaya yang diperlukan sesuai dengan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. LATAR BELAKANG.....	I – 1
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN.....	I – 2
1.3. GAMBARAN UMUM DAERAH	I – 3
1.3.1. Kondisi Geografis Daerah	I – 3
1.3.2. Gambaran Umum Demografi	I – 5
1.3.3. Kelembagaan Pemerintah	I – 8
1.3.4. Kondisi Ekonomi Daerah	I – 14
1.4. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	I – 21
1.4.1. Bidang Infrastruktur	I – 21
1.4.2. Bidang Sosial Budaya	I – 21
1.4.3. Bidang Ekonomi	I – 24
1.4.4. Bidang Lingkungan Hidup	I – 25
1.4.5. Bidang Pemerintahan	I – 25
1.5. DASAR HUKUM PENYUSUNAN	I – 27
1.6. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKJ 2019	I – 27
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH KOTA JAMBI	II – 1
2.1.1. Visi dan Misi	II – 2
2.1.2. Prioritas Pembangunan	II – 3
2.1.3. Sasaran	II – 3



	Halaman
2.1.4. Strategi, Arah Kebijakan Daerah, Program dan Indikator Kinerja Dalam RPJMD 2013-2018	II – 8
2.1.5. Program Untuk Pencapaian Sasaran	II – 19
2.2. PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA JAMBI TAHUN 2021	II – 26
2.2.1. Anggaran Tahun 2021	II – 37
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KOTA JAMBI	
3.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019	III – 3
3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	III – 7
1. Sasaran 1 Meningkatkan Profesionalisme ASN dan Akuntabilitas Kinerja Berbasis TIK.....	III – 7
2. Sasaran 2 Menurunkan Tingkat Pelanggaran Terhadap PERDA dan PERWAL	III – 41
3. Sasaran 3 Meningkatkan Pelayanan Pada Kondisi Pra, Tanggap dan Pasca Kebakaran Serta Kebencanaan.....	III – 44
4. Sasaran 4 Meningkatkan Pemahaman Tentang Arti Pentingnya Ideologi Pancasila Dan Kebhinekaan Dalam Kehidupan Sosial Masyarakat.....	III – 50
5. Sasaran 5 Meningkatkan Peran Organisasi Kemasyarakatan Dan Parpol Dalam Pembangunan.....	III – 54
6. Sasaran 6 Meningkatkan Layanan Infrastruktur Dan Utilitas Perkotaan.....	III – 62
7. Sasaran 7 Meningkatkan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	III – 82
8. Sasaran 8 Meningkatkan Pembinaan, Pengawasan Dan Pelayanan Perdagangan.....	III – 105



	Halaman
9. Sasaran 9 Meningkatkan Ketahanan Pangan.....	III – 107
10. Sasaran 10 Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB.....	III – 108
11. Sasaran 11 Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	III – 110
12. Sasaran 12 Meningkatkan Realisasi Investasi.....	III – 115
13. Sasaran 13 Meningkatkan Penyerapan Dan Perlindungan Tenaga Kerja.....	III – 118
14. Sasaran 14 Meningkatkan Daya Saing Usaha Skala Mikro Dan Kecil.....	III – 119
15. Sasaran 15 Meningkatkan Derajat Kesehatan.....	III – 124
16. Sasaran 16 Meningkatkan Kualitas Dan Aksesibilitas Pendidikan.....	III – 127
17. Sasaran 17 Mengendalikan Angka Kelahiran Penduduk.....	III – 128
18. Sasaran 18 Meningkatkan Kesetaraan Gender.....	III – 132
19. Sasaran 19 Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak.....	III – 136
20. Sasaran 20 Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan.....	III – 139
21. Sasaran 21 Meningkatkan Prestasi Dan Kreativitas Kepemudaan.....	III – 141
22. Sasaran 22 Menurunkan Angka PMKS.....	III – 143
3.3. PERBANDINGAN TARGET DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 DENGAN TAHUN 2018.....	III – 147
3.4. PENDANAAN PER PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2018 DAN 2019	III – 157

Halaman



3.5.	AKUNTABILITAS PENGGUNAAN ANGGARAN TAHUN 2019	III – 160
3.5.1.	Pendapatan Daerah	III – 160
3.5.2.	Belanja Daerah	III – 162
3.5.3.	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	III – 165
3.6.	PENGHARGAAN YANG DIRAIH PEMERINTAH KOTA JAMBI SELAMA TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN 15 MARET 2020	III – 166
BAB IV	PENUTUP	IV – 1
LAMPIRAN		



BAB I

PENDAHULUAN

Bab 1 Berisi :

- 1. Latar Belakang**
- 2. Maksud dan Tujuan**
- 3. Gambaran Umum Daerah**
- 4. Permasalahan Pembangunan**
- 5. Dasar Hukum**
- 6. Sistematika Penyusunan LKj 2021**

1.1. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan prasyarat dari setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya yang menjadi perhatian utama masyarakat, penjelasan tentang kinerja dan capaian kinerja, analisis capaian kinerja, analisis permasalahan dan strategi pemecahan masalah dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Daerah di masa mendatang dan juga merupakan wadah atau laporan kinerja instansi pemerintah termasuk pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja disajikan dengan menguraikan capaian kinerja sasaran dengan melakukan perbandingan antara indikator kinerja pada target sasaran dengan realisasinya. Dengan perbandingan ini dapat dilihat sejauh mana Pemerintah Kota Jambi dapat mewujudkan sasaran strategi



yang telah ditetapkan serta dapat memperlihatkan manfaat yang telah diberikan organisasi kepada masyarakat dan *stakeholder* lainnya.

Selain itu, LKj juga melakukan evaluasi internal terhadap capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan. Dengan evaluasi internal ini diharapkan Pemerintah Daerah dapat melakukan perbaikan lebih lanjut dalam rangka meningkatkan kinerja di masa depan. Kinerja merupakan gambaran mengenai seberapa jauh keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Sedangkan indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja suatu organisasi.

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Jambi pada Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan format yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

LKj Pemerintah Kota Jambi merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan *stakeholders* demi perbaikan kinerja Pemda Kota Jambi. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses



evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

1.3. GAMBARAN UMUM DAERAH

1.3.1. Kondisi Geografis Daerah

Kota Jambi merupakan ibukota Provinsi Jambi yang lebih dikenal dengan sebutan “Tanah Pilih Pesako Betuah”. Wilayah Kota Jambi dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Muaro Jambi baik dari arah Utara, Selatan, Barat, maupun Timur.

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033, Luas Kota Jambi 17.552,71 Ha. Namun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kota Jambi dengan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, Luas indikatif Kota Jambi adalah 169.88,67 Km² yang terdiri dari:

- | | | | |
|----------------------------|---|------------------------|----------|
| a) Kecamatan Kotabaru | = | 29,937 Km ² | (17,62%) |
| b) Kecamatan Alam Barajo | = | 36,909 Km ² | (21,73%) |
| c) Kecamatan Jambi Selatan | = | 12,267 Km ² | (7,22%) |
| d) Kecamatan Paal Merah | = | 19,571 Km ² | (11,52%) |
| e) Kecamatan Jelutung | = | 7,617 Km ² | (4,48%) |



- f) Kecamatan Pasar Jambi = 1,670 Km² (0,98%)
- g) Kecamatan Telanaipura = 16,822 Km² (9,90%)
- h) Kecamatan Danau Sipin = 7,278 Km² (4,28%)
- i) Kecamatan Danau Teluk = 13,444 Km² (7,91%)
- j) Kecamatan Pelayangan = 10,689 Km² (6,29%)
- k) Kecamatan Jambi Timur = 13,684 Km² (8,05%)

Perubahan luasan diatas menjadi salah satu dasar Pemerintah Kota Jambi untuk merevisi Perda Nomor 09 Tahun 2013 tentang RTRW Kota Jambi diatas. Secara geografi wilayah Kota Jambi terletak di antara 01030⁰2,98" – 01040¹1,07" LS sampai 10340¹1,67" – 10340⁰0,22" BT. Berdasarkan data DEM Nasional, wilayah Kota Jambi memiliki ketinggian rata-rata 10 – 60 meter dari permukaan laut. Berdasarkan kecamatan, sebagian besar wilayah Kecamatan Pasar Jambi, Danau Sipin, Pelayangan dn Danau Teluk berada pada ketinggian 0 - 10 meter dari permukaan laut, sedangkan wilayah Kecamatan Telanaipura, Jambi Selatan, Jambi Timur, Paal Merah, Alam Barajo dan Kotabaru sebagian besar berada pada ketinggian 10 – 40 meter dari permukaan laut. Secara umum kondisi topografi Kota Jambi disajikan sebagai berikut:

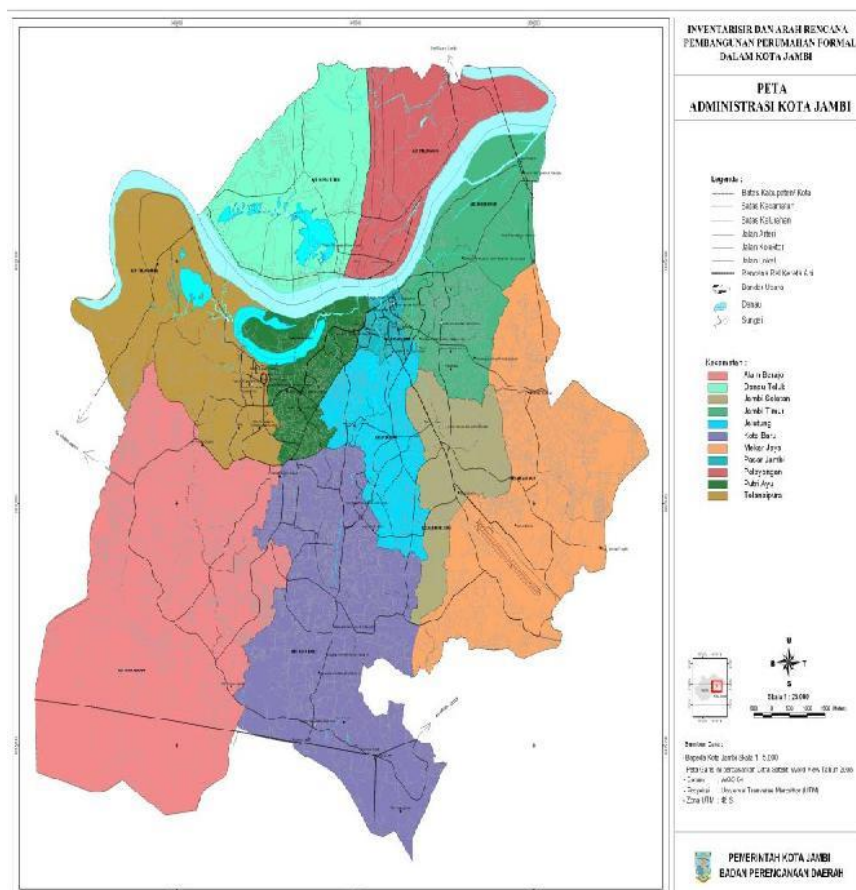
Tabel 1.1
Kondisi Topografi Kota Jambi

TOPOGRAFI	KEMIRINGAN	PERSENTASE(%)
Datar	0-8	61,529%
Landai	8-15	28,570%
Agak curam	15-25	8,599%
Curam	25-45	1,302%

Dari sisi iklim, Kota Jambi termasuk beriklim tropis. Musim hujan jatuh pada bulan Agustus dipengaruhi oleh anomali suhu muka laut positif (lebih hangat daripada normalnya) di Samudera Hindia bagian Timur dan musim kemarau pada bulan Juni dipengaruhi oleh Musim Barat Monsun Timuran.

Selama tahun 2021, keadaan suhu di Kota Jambi antara $23,8^{\circ}\text{C}$ - $31,9^{\circ}\text{C}$, dengan suhu rata-rata $27,2^{\circ}\text{C}$. Adapun kelembaban antara 54% - 98%, dengan kelembaban rata-rata 82%. Kecepatan angin antara 1,4m/detik – 10,3m/detik, dengan kecepatan rata-rata 2,1m/detik. Tekanan udara antara 1005mb – 1009,5mb, dengan tekanan udara rata-rata 1007,4mb. Selama tahun 2021, jumlah curah hujan di Kota Jambi 2680,8mm, dengan jumlah hari hujan 244 hari dalam setahun dan penyinaran matahari 50%.

Gambar 1.1.
Peta Wilayah Kota Jambi



Sumber : BPS Kota Jambi 2021.

1.3.2. Gambaran Umum Demografi



Penduduk Kota Jambi adalah heterogen, jumlah penduduk Kota Jambi tahun 2020 berdasarkan data hasil sensus Penduduk 2021 adalah sebanyak 606.200 jiwa. Dilihat dari segi kepadatan penduduk tahun 2020 maka kepadatan per Km² menurut Kecamatan adalah:

- a) Kecamatan Kotabaru = 2.217 jiwa/Km²
- b) Kecamatan Alam Barajo = 2.603 jiwa/Km²
- c) Kecamatan Jambi Selatan = 4.989 jiwa/Km²
- d) Kecamatan Paal Merah = 3.904 jiwa/Km²
- e) Kecamatan Jelutung = 7.505 jiwa/Km²
- f) Kecamatan Pasar Jambi = 2.784 jiwa/Km²
- g) Kecamatan Telanaipura = 2.186 jiwa/Km²
- h) Kecamatan Danau Sipin = 5.504 jiwa/Km²
- i) Kecamatan Danau Teluk = 817 jiwa/Km²
- j) Kecamatan Pelayangan = 846 jiwa/Km²
- k) Kecamatan Jambi Timur = 4.148 jiwa/Km²

Menurut jenis kelamin, jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk berjenis kelamin perempuan (*sex ratio: 101,5*). Jumlah penduduk Kota Jambi menurut jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Kota Jambi
Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020

NO	PENDUDUK	JUMLAH			
		2017	2018	2019	2020
1	Laki-Laki	297.036	300.775	303.818	305.407
2	Perempuan	294.098	297.537	300.920	300.793
	Jumlah	591.134	598.103	604.738	606.200
	Sex Ratio	101,00	101,02	101,00	101,5

Sumber : Diolah dari Kota Jambi Dalam Angka 2020



Tingkat kepadatan penduduk Kota Jambi secara rata-rata berdasarkan perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah Kota Jambi masih tergolong jarang. Namun tingkat kepadatan penduduk untuk kawasan perkotaan sudah tergolong cukup padat. Pada Tahun 2020 Tingkat kepadatan penduduk rata-rata Kota Jambi adalah 2.952 jiwa/km².

Dari aspek ketenagakerjaan, persentase pekerjaan penduduk Kota Jambi yang berusia diatas 15 tahun adalah:

1	Pertanian.....	3,61%
2	Manufaktur	19%
3	Jasa	77,39%

Sumber : Kota Jambi Dalam Angka 2021

Sedangkan berdasarkan status pekerjaan utama penduduk Kota Jambi yang berusia di atas 15 tahun adalah:

1	Buruh/Karyawan/Pegawai.....	60,77%
2	Pekerja Berusaha Sendiri.....	19,54%
3	Pekerja Bebas di Sektor Pertanian.....	0,16%

Sumber : Kota Jambi Dalam Angka 2021

Jumlah pencari kerja terdaftar sepanjang tahun 2021 di rinci pada tabel berikut menurut jenis kelamin di Kota Jambi.

Tabel1.3

Rekapitulasi Pencari Kerja uang Terdaftar Di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi Periode (Januari s/d Desember 2021)

No.	Bulan	Pencari Kerja Terdaftar			Penempatan			Sisa Pencaker			Lowongan Terdaftar			Persentase Penempatan Terhadap Pencaker Terdaftar (8:5)
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Januari	207	126	333	78	56	134	129	70	199	56	45	101	40,24%
2	Februari	208	196	404	87	75	162	121	121	242	58	30	88	40,10%
3	Maret	114	58	172	44	25	69	70	33	103	60	70	130	40,12%



No.	Bulan	Pencari Kerja Terdaftar			Penempatan			Sisa Pencaker			Lowongan Terdaftar			Persentase Penempatan Terhadap Pencaker Terdaftar (8:5)
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	April	63	35	98	20	19	39	43	16	59	40	50	90	39,80%
5	Mei	86	43	129	30	21	51	56	22	78	64	47	111	39,53%
6	Juni	117	91	208	58	25	83	59	66	125	40	41	81	39,90%
7	Juli	140	76	216	48	38	86	92	38	130	45	35	80	39,81%
8	Agustus	186	265	451	84	96	180	102	169	271	50	37	87	39,91%
9	September	79	35	114	21	25	46	58	10	68	54	62	116	40,35%
10	Oktober	54	20	74	14	16	30	40	4	44	35	52	87	40,54%
11	November	68	30	98	17	22	39	51	8	59	41	38	79	39,80%
12	Desember	104	69	173	46	40	86	58	29	87	12	10	22	49,71%
J U M L A H		1.426	1.044	2.470	547	458	1.005	879	586	1.465	555	517	1.072	40,69%

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Koerasi dan UKM Kota Jambi 2021

1.3.3. Kelembagaan Pemerintah

1.3.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Jambi mengacu kepada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20).

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Jambi memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dalam bidang pemerintahan meliputi :

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum;



5. Penanganan bidang kesehatan;
6. Penyelenggaraan pendidikan;
7. Penanggulangan masalah sosial;
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
9. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
10. Pengendalian lingkungan hidup;
11. Pelayanan pertanahan;
12. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
14. Pelayanan administrasi penanaman modal;
15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya;
16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;

Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada Walikota Jambi dalam melaksanakan kebijakan otonomi daerah. Selain itu, prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat dan pengembangan peran serta fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diperluas. Salah satu bentuk pengembangan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah melalui pertanggungjawaban Walikota Jambi kepada DPRD.

1.3.3.2. Struktur Organisasi

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Kota Jambi berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sampai saat ini Pemerintah Kota Jambi telah membentuk



Struktur Organisasi yaitu Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi dimaksud di atas, jumlah organisasi sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) Satuan Kerja Perangkat Daerah, terdiri dari 2 (dua) Sekretariat, 14 (empat belas) Lembaga Teknis Daerah, 15 (lima belas) Dinas, 11 (sebelas) Kecamatan dan 62 (enam puluh dua) Kelurahan dengan perincian sebagai berikut :

a. Sekretariat

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD

b. Inspektorat

c. Dinas Daerah

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Dinas Sosial
6. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
8. Dinas Lingkungan Hidup
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10. Dinas Perhubungan
11. Dinas Komunikasi dan Informatika
12. Dinas tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
15. Dinas Pemuda dan Olah Raga
16. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



17. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
18. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
19. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
20. Satuan Polisi Pamong Praja

d. Badan Daerah

1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

e. Kecamatan

1. Kecamatan Pasar
2. Kecamatan Telanaipura
3. Kecamatan Jambi Timur
4. Kecamatan Jambi Selatan
5. Kecamatan Jelutung
6. Kecamatan Kota Baru
7. Kecamatan Danau Teluk
8. Kecamatan Pelayangan
9. Kecamatan Danau Sipin
10. Kecamatan Paal Merah
11. Kecamatan Alam Barajo

f. Kelurahan

1. Kecamatan Pasar
 - a. Kelurahan Pasar
 - b. Kelurahan Orang Kayo Hitam
 - c. Kelurahan Beringin
 - d. Kelurahan Sungai Asam
2. Kecamatan Telanaipura



- a. Kelurahan Telanaipura
 - b. Kelurahan Simpang IV Sipin
 - c. Kelurahan Teluk Kenali
 - d. Kelurahan Buluran Kenali
 - e. Kelurahan Penyengat Rendah
 - f. Kelurahan Pematang Sulur
3. Kecamatan Jambi Timur
- a. Kelurahan Tanjung Sari
 - b. Kelurahan Tanjung Pinang
 - c. Kelurahan Rajawali
 - d. Kelurahan Talang Banjar
 - e. Kelurahan Sijenjang
 - f. Kelurahan Budiman
 - g. Kelurahan Kasang
 - h. Kelurahan Sulanjana
 - i. Kelurahan Kasang Jaya
4. Kecamatan Jambi Selatan
- a. Kelurahan The Hok
 - b. Kelurahan Pasir Putih
 - c. Kelurahan Pakuan Baru
 - d. Kelurahan Tambak Sari
 - e. Kelurahan Wijayapura
5. Kecamatan Jelutung
- a. Kelurahan Jelutung
 - b. Kelurahan Payo Lebar
 - c. Kelurahan Lebak Bandung
 - d. Kelurahan Kebun Handil
 - e. Kelurahan Talang Jauh



- f. Kelurahan Cempaka Putih
- g. Kelurahan Handil Jaya
- 6. Kecamatan Kota Baru
 - a. Kelurahan Paal Lima
 - b. Kelurahan Suka Karya
 - c. Kelurahan Kenali Asam Atas
 - d. Kelurahan Kenali Asam Bawah
 - e. Kelurahan Simpang III Sipin
- 7. Kecamatan Danau Teluk
 - a. Kelurahan Olak Kemang
 - b. Kelurahan Ulu Gedong
 - c. Kelurahan Pasir Panjang
 - d. Kelurahan Tanjung Raden
 - e. Kelurahan Tanjung Pasir
- 8. Kecamatan Pelayangan
 - a. Kelurahan Tengah
 - b. Kelurahan Jelmu
 - c. Kelurahan Arab Melayu
 - d. Kelurahan Mudung Laut
 - e. Kelurahan Tahtul Yaman
 - f. Kelurahan Tanjung Johor
- 9. Kecamatan Paal Merah
 - a. Kelurahan Eka Jaya
 - b. Kelurahan Lingkar Selatan
 - c. Kelurahan Paal Merah
 - d. Kelurahan Talang Bakung
 - e. Kelurahan Payo Silincah



10. Kecamatan Alam Barajo
 - a. Kelurahan Bagan Pete
 - b. Kelurahan Beliung
 - c. Kelurahan Kenali Besar
 - d. Kelurahan Mayang Mangurai
 - e. Kelurahan Rawasari
11. Kecamatan Danau Sipin
 - a. Kelurahan Legok
 - b. Kelurahan Murni
 - c. Kelurahan Selamat
 - d. Kelurahan Solok Sipin
 - e. Kelurahan Sungai Putri

Kelembagaan pemerintah daerah tersebut telah dibentuk sesuai dengan kewenangan yang ada pada Pemerintah Daerah dan diarahkan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam membangun daerah demi terwujudnya pelayanan kepada masyarakat serta mempercepat tercapainya kemandirian daerah.

1.3.4. Kondisi Ekonomi Daerah

1.3.4.1. Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi Provinsi Jambi tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 3,66 persen. Seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 14,33 persen. Tingginya pertumbuhan lapangan usaha tersebut didorong oleh penanggulangan pandemi serta pelaksanaan vaksinasi covid-19. Lapangan usaha berikutnya yang tumbuh tinggi adalah Konstruksi sebesar 8,01 persen; Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 7,08 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,92 persen; Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 5,36



persen; serta Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 5,13 persen. Lapangan usaha lainnya tumbuh di bawah 5 persen. Sementara dari sisi pengeluaran semua komponen tumbuh positif, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 9,27 persen (Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS Provinsi Jambi 2022)

Sebagai ibukota Provinsi Jambi dan juga kota perdagangan dan jasa, keadaan ini juga berdampak signifikan pada kondisi perekonomian Kota Jambi. Ekonomi Kota Jambi tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 3,94 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi diantaranya Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 14,95 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 6,89 persen; Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 6,48 persen; Konstruksi sebesar 5,04 persen dan Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 4,70 persen.

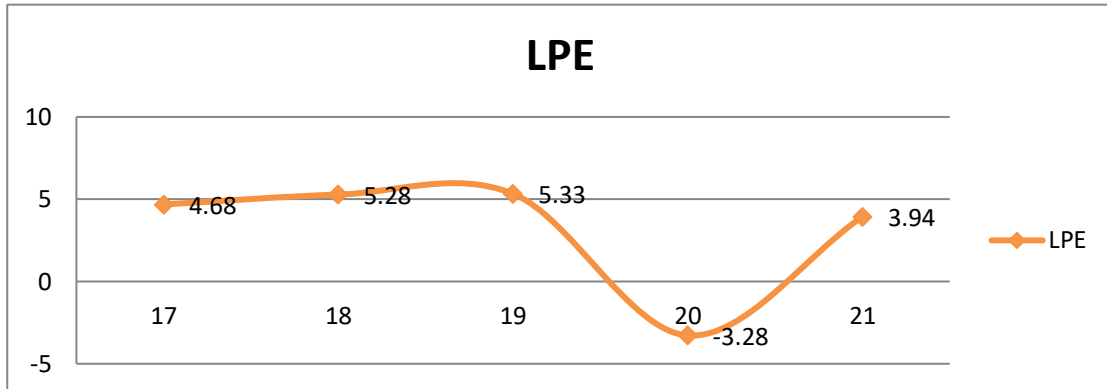
Dengan berbagai dinamika yang terjadi pada Tahun 2021, juga berdampak pada sedikit pergeseran struktur ekonomi Kota Jambi. Untuk melihat struktur ekonomi suatu daerah dapat dilihat pada PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha.

Adapun struktur ekonomi Kota Jambi yang menjadi sektor potensi unggulan daerah pada tahun 2021 masih didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, yaitu:

1. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (32,70%);
2. Industri Pengolahan (11,02%);
3. Konstruksi (9,49%);
4. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial (8,41%);
5. Transportasi dan Pergudangan (7,98%).



Gambar 1.2.
Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi Tahun 2016-2021



Sumber : Kota Jambi Dalam Angka 2021

Tabel berikut menggambarkan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Jambi menurut lapangan Usaha Tahun 2018- 2020 berdasarkan harga konstan.

Tabel 1.4
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kota Jambi(Atas Dasar Harga Konstan) Tahun 2018-2020

NO	LAPANGAN USAHA	2018	2019	2020
1	2	3	4	5
1.	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	342,17	341,08	344,91
2.	Pertambangan dan Penggalian	579,55	548,01	368,32
3.	Industri Pengolahan	2944,76	3055,64	3195,60
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	61,40	67,07	69,02
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	71,41	83,91	81,73
6.	Konstruksi	2554,04	2801,84	2796,98
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8877,83	2801,84	2796,98



NO	LAPANGAN USAHA	2018	2019	2020
1	2	3	4	5
8.	Transportasi dan Pergudangan	3549,56	3685,95	2588,22
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	682,67	735,07	683,77
10.	Informasi dan Komunikasi	1333,28	1436,66	1559,39
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1596,56	1678,38	1815,00
12.	Real Estat	715,29	785,76	792,09
13.	Jasa Perusahaan	860,37	922,46	894,50
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2503,89	2632,52	2696,63
15.	Jasa Pendidikan	1289,00	1398,84	1458,19
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	635,72	703,37	767,50
17.	Jasa Lainnya	199,92	210,60	206,54
	PDRB	28.797,41	30.636,17	29.815,12

Sumber : Kota Jambi Dalam Angka 2021

1.3.4.2. Struktur Ekonomi

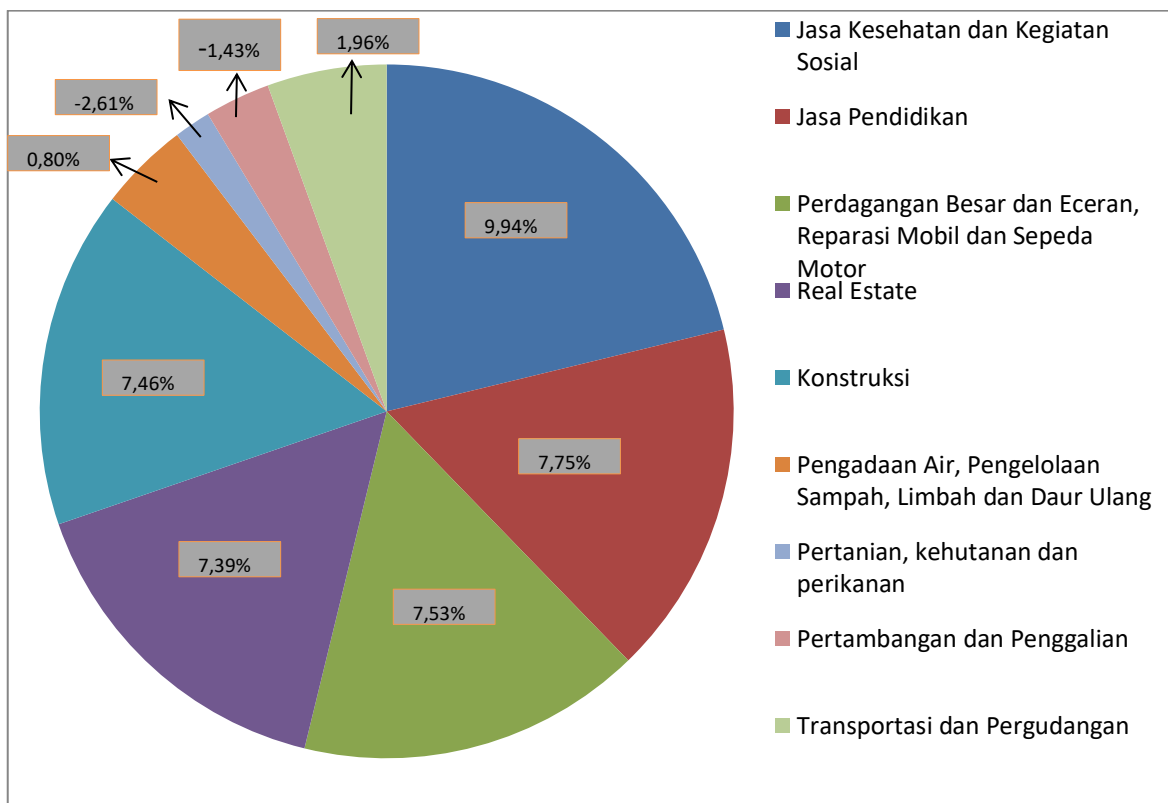
Struktur perekonomian masyarakat Kota Jambi pada kurun waktu 2016-2018 didominasi sektor Sekunder dan Tersier. Besarnya peranan masing-masing kategori ini terhadap pembentukan PDRB seri 2010 menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2018, kontribusi tertinggi diperoleh dari Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp. 8.896.456,54, Sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar Rp. 3.625.367,87, Sektor Industri Pengolahan sebesar Rp. 2.998.229,47, dan Sektor Bangunan sebesar Rp. 2.554.035,85.

Sedangkan 4 sektor yang memberikan kontribusi terendah berturut-turut adalah sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar Rp.

61.123,55, Sektor Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar Rp. 71.414,78, Sektor Jasa Lainnya sebesar Rp. 199.918,84 dan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar Rp. 40.031,48.

Gambar 1.3

Struktur Perekonomian Kota Jambi Tahun 2020



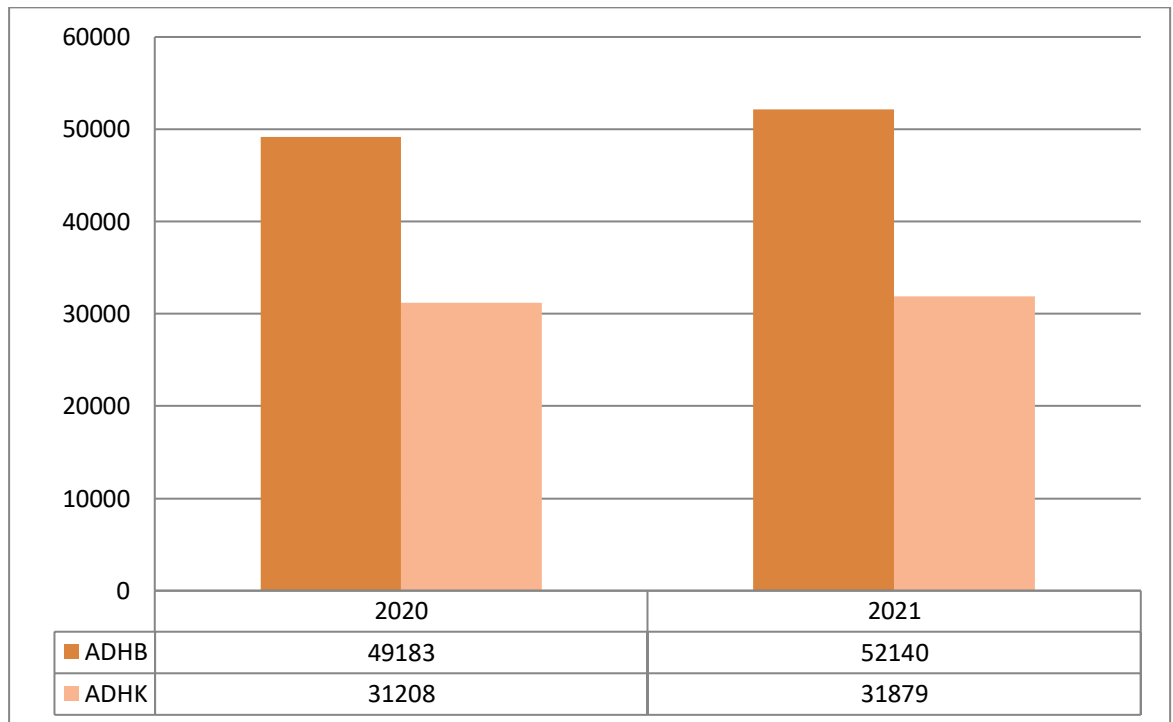
Sumber : Kota Jambi Dalam Angka 2020

1.3.4.3. Pendapatan Per kapita

Pendapatan perkapita adalah pendapatan rata-rata penduduk di suatu wilayah. Pendapatan perkapita merupakan indikator atau tolak ukur dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi nilai pendapatan perkapita suatu negara, artinya masyarakat tersebut semakin Makmur. Adapun perbandingan pendapatan

perkapita Kota Jambi tahun 2020 - 2021 seperti terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1.4
Pendapatan Perkapita Tahun 2020-2021



Pada Tahun 2020 pendapatan perkapita Kota Jambi berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku sebesar Rp.49.183.000 dan mengalami peningkatan menjadi Rp.52.140.005 pada tahun 2021. Sementara pendapatan perkapita Kota Jambi berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2020 sebesar Rp.31.208.000 dan mengalami peningkatan menjadi Rp.31.879.616 pada tahun 2021 (BPS Kota Jambi, data diolah).

1.3.4.4. Tingkat inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran



distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontiniu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-mempengaruhi.

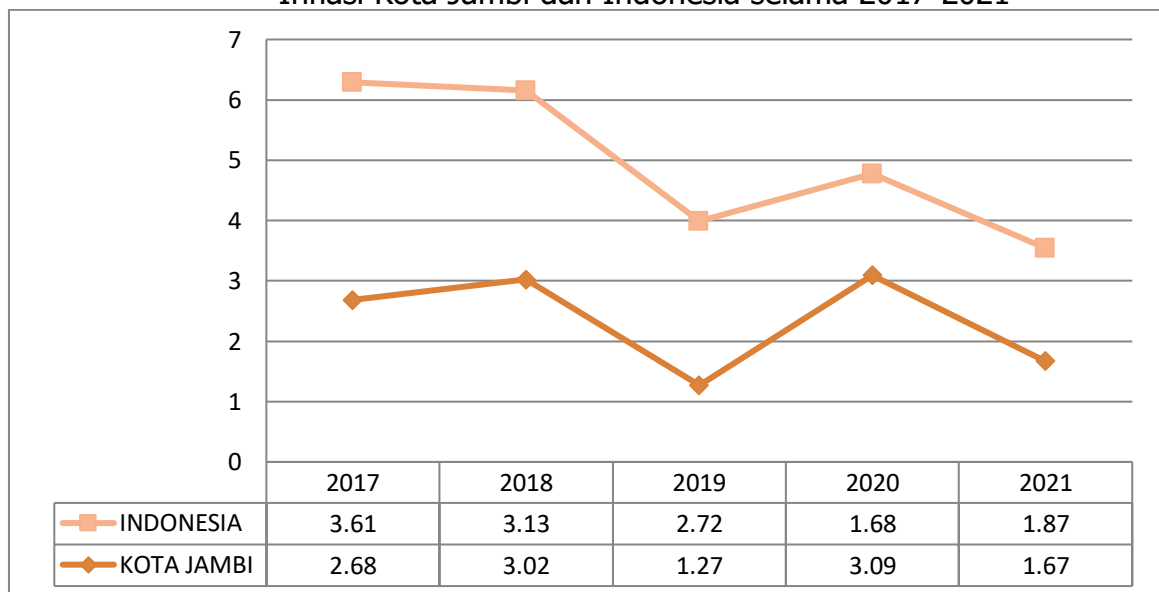
Tabel 1.5
Inflasi Kota Jambi Tahun 2017 – 2021

URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
INFLASI	1,52	3,02	1,27	3,09	1,67

Sumber : Kota Jambi Dalam Angka 2021

Secara umum dari Tahun 2017-2021 kondisi inflasi di Kota Jambi mengalami fluktuasi namun relatif terkendali. Untuk melihat trend inflasi Kota Jambi dan Indonesia selama 5 (lima) tahun terakhir, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1.5
Inflasi Kota Jambi dan Indonesia selama 2017-2021



Sumber: Kota Jambi Dalam angka 2022



1.4. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Kota Jambi sebagai ibu kota Provinsi mendesak dilakukan penataan diri, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur ekonomi. Barometer keberhasilan pembangunan di Provinsi Jambi dapat diukur sejauhmana perkembangan ibu kotanya. Untuk menjadikan Kota Jambi agar sejajar dengan kota-kota lainnya di Indonesia perlu penanganan berbagai permasalahan diantaranya :

1.4.1. Bidang Infrastruktur

Infrastruktur merupakan faktor yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian suatu daerah. Pembangunan infrastruktur jalan merupakan dukungan penting untuk meningkatkan nilai tambah (*Value Added*) dan daya saing suatu perekonomian. Permasalahan mendasar di bidang infrastruktur kota adalah :

- 1) Masih rendahnya kualitas lingkungan permukiman.
- 2) Masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni.
- 3) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas pelayanan air bersih dan air limbah.
- 4) Masih rendahnya aksesibilitas dan kapabilitas infrastruktur jalan.
- 5) Masih banyak titik genangan di Kota Jambi.
- 6) Belum terwujudnya harmonisasi ruang kota

1.4.2. Bidang Sosial Budaya

a. Pendidikan

Permasalahan pokok yang dihadapi di bidang pendidikan di Kota Jambi yaitu belum optimalnya daya saing pendidikan, dimana Pendidikan merupakan prasyarat utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah di tingkat global. Permasalahan pendidikan Kota Jambi adalah optimalnya akses dan mutu



pendidikan yang ditandai dengan masih rendahnya daya tampung siswa terutama ditingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri, masih banyaknya prasarana dan sarana pendidikan dasar yang perlu diperbaiki, belum meratanya penyebaran guru, masih rendahnya kualitas dan kuantitas guru dan masih rendahnya kualitas siswa.

b. Kesehatan

Permasalahan pokok yang dihadapi di bidang kesehatan di Kota Jambi yaitu tingginya penduduk yang terpapar penyakit menular dan tidak menular, dimana secara umum derajat kesehatan masyarakat Kota Jambi telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Namun demikian masih ditemukan beberapa permasalahan yang perlu penyelesaian dan mendapat perhatian semua pemangku kepentingan antara lain: masih tingginya angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular, masih adanya angka kematian ibu dan anak, keterbatasan mutu tenaga kesehatan, serta penyebarannya yang kurang merata, pelayanan pada rumah sakit dan puskesmas juga masih perlu ditingkatkan kualitasnya, belum optimalnya pelaksanaan sistem pelayanan kesehatan, masih ditemukannya balita gizi kurang serta baduta stanting. Penyelenggaraan kesehatan di Kota Jambi dikembangkan dengan mendorong promosi kesehatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kesehatan lingkungan dan perorangan, optimalisasi sistem jaminan pelayanan kesehatan bagi warga Kota Jambi khususnya keluarga kurang mampu, penerapan ISO pada fasilitas kesehatan, penyempurnaan sistem rujukan, optimalisasi kegawat daruratan, peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana kesehatan.

c. Ketenagakerjaan

Permasalahan pokok yang dihadapi di bidang Ketenagakerjaan di Kota Jambi yaitu rendahnya daya saing tenaga kerja, dimana meningkatnya jumlah angkatan kerja yang tidak tertampung dalam



lapangan kerja menyebabkan tingginya tingkat pengangguran. Hal ini secara umum disebabkan oleh beberapa hal seperti terjadinya *mismatch* dalam pasar kerja dan rendahnya skill tenaga kerja, kondisi ini dapat menjadi beban bagi pemerintah Kota Jambi.

d. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Permasalahan pokok yang dihadapi di bidang Kependudukan dan KB di Kota Jambi antara lain :

- 1) Belum optimalnya peran serta perempuan di dalam pembangunan
- 2) Tingginya kasus kejahatan anak

e. Transportasi

Permasalahan pokok yang dihadapi di bidang transportasi di Kota Jambi yaitu masih tingginya angka pelanggaran lalu lintas, dimana dengan perkembangan yang terjadi khususnya di Kota Jambi salah satunya adalah perkembangan lalu lintas dan masalah yang harus benar-benar diperhatikan adalah pelanggaran lalu lintas. Hal tersebut dapat dilihat dari angka kecelakaan lalu lintas yang terus meningkat setiap tahunnya.

Kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh banyak hal seperti: pengemudi kendaraan yang buruk, bus besar atau kecil yang sembarangan parkir, ketidakteratur antara transportasi yang besar dan yang kecil atau tidak sesuai dengan luas jalan, pejalan kaki yang kurang hati-hati, jalanan yang tidak layak seperti jalan yang berlubang, kerusakan kendaraan, kendaraan yang sudah tidak layak lagi pakai, pengendara yang tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan masih banyak lagi yang menimbulkan masalah pelanggaran lalu lintas yang telah ditentukan pemerintah khususnya Dinas Perhubungan dan Kepolisian.



f. Kesejahteraan

Permasalahan pokok yang dihadapi di bidang transportasi di Kota Jambi yaitu tingginya angka penyandang PMKS, dimana sesuai dengan amanat UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial diantaranya melalui jaminan sosial dan perlindungan sosial. Ditinjau dari aspek penyelenggaraan pemerintah bahwasanya program dan kegiatan terutama pada PMKS belum optimal sehingga ini menjadi tugas dari pemerintah Kota Jambi untuk dapat menyusun langkah-langkah dan strategi dalam upaya menurunkan anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

1.4.3. Bidang Ekonomi

a. Keuangan Daerah

Permasalahan pokok yang dihadapi bidang keuangan daerah di Kota Jambi yaitu rendahnya kemandirian daerah terhadap dana perimbangan, dimana komponen pendapatan daerah terdiri dari 3 (tiga) komponen besar, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. APBD Kota Jambi beberapa tahun terakhir selalu berada di atas angka 1,6 Triliun. Dari total APBD Kota Jambi, sebagian besar masih didominasi oleh Dana Perimbangan, baik itu Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Jika dilihat dari proporsi secara persentase, Dana Perimbangan menempati perentase tertinggi diikuti oleh PAD dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Kemandirian daerah dapat dilihat dari seberapa besar daerah tersebut bisa membiayai APBD dari PAD. Beberapa tahun terakhir, rata-rata PAD Kota Jambi berkisar diantara angka 18%-26% dari total APBD Kota Jambi. Namun demikian, Pemerintah Kota Jambi selalu berkomitmen untuk meningkatkan PAD dari tahun ke tahun dengan mengupayakan intensifikasi maupun



ekstensifikasi, bekerjasama dengan berbagai pihak dan memanfaatkan teknologi serta melakukan upaya lainnya melalui pendirian BUMD untuk menambah sumber pendapatan lainnya.

b. Industri dan Perdagangan

Permasalahan pokok yang dihadapi di bidang Industri dan Perdagangan di Kota Jambi antara lain :

- 1) Lemahnya tata niaga perdagangan
- 2) Belum optimalnya pengendalian ketersediaan dan distribusi pangan

1.4.4. Bidang Lingkungan Hidup

Permasalahan pokok yang dihadapi di bidang Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup di Kota Jambi antara lain :

- 1) Masih rendahnya rasio RTH publik
- 2) Belum optimalnya manajemen pengelolaan sampah
- 3) Menurunnya kualitas lingkungan hidup

1.4.5. Bidang Pemerintahan

Permasalahan pokok yang dihadapi di bidang Pemerintahan atau Birokrasi di Kota Jambi yaitu belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah, dimana profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan dan pelayanan publik.

Posisi IP ASN Kota Jambi pada tahun 2019 sebesar 56,2, yang berarti berada pada kategori 'Rendah'. Rendahnya profesionalitas ASN ini secara umum disebabkan oleh belum optimalnya dimensi kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki ASN. Upaya Pemerintah Kota Jambi untuk meningkatkan indeks tersebut adalah meningkatkan kualifikasi ASN (pendidikan formal/tugas belajar bagi ASN) dan kompetensi (kompetensi teknis, manajerial maupun sosial cultural).



Berdasarkan hasil identifikasi, analisis masalah, sinergitas antar masalah, serta dalam rangka lebih terfokusnya intervensi program pembangunan maka dirumuskanlah isu-isu strategis menjadi 7 (tujuh) kelompok, sebagai berikut:

1. Kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar
2. Penanggulangan kemiskinan
3. Infrastruktur publik, permukiman dan lingkungan hidup
4. Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta daya beli masyarakat
5. Tata nilai kehidupan masyarakat dan kebudayaan daerah
6. Pengarusutamaan gender dan ketahanan keluarga
7. Tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta berbasis teknologi informasi

Dengan 4 (empat) Prioritas Pembangunan Kota Jambi, sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
3. Penanggulangan Kemiskinan
4. Pengembangan Pariwisata dan Promosi Daerah



1.5. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Pemerintah Kota Jambi berlandaskan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004, Tambahan (NR) nomor 4421)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 209).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.6. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKj 2021

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah Kota Jambi selama tahun 2021. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2021 tersebut, diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance plan*) tahun 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini, akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah



kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kota Jambi tahun 2021 dapat diilustrasikan dalam bagan berikut ini :

Ikhtisar eksekutif

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 LATAR BELAKANG MAKSUD DAN TUJUAN
- 1.2 GAMBARAN UMUM
- 1.3 DAERAH PERMASALAHAN
- 1.4 PEMBANGUNAN DASAR HUKUM
- 1.5 PENYUSUNAN
- 1.6 SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKJ 2021

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- 2.1 RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH KOTA JAMBI
- 2.2 PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA JAMBI TAHUN 2021

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KOTA JAMBI

- 3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2021
- 3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA
- 3.3 PERBANDINGAN TARGET DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA
- 3.4 PENDANAAN PER PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2020 DAN 2021
- 3.5 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021
- 3.6 PENGHARGAAN YANG DI RAIH PEMERINTAH KOTA JAMBI SAMPAI 31 DESEMBER 2021

BAB IV PENUTUP



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Bab II Berisi :

- 1. Rencana Strategis Pemerintah Kota Jambi**
- 2. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Jambi Tahun 2021**

2.1. RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH KOTA JAMBI

Dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Kota Jambi Tahun 2021 didasarkan kepada RPJMD Kota Jambi Tahun 2018 – 2023 sebagai dokumen perencanaan

taktis strategis yang menjadi dasar tolak ukur pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) oleh Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2018-2023. RPJMD adalah rencana lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program, dan kegiatan daerah berdasarkan tolok ukur kinerja. Sesuai amanat masyarakat di era reformasi, maka RPJMD yang disusun oleh Pemerintah Daerah ini harus dapat menyerap aspirasi dan keinginan masyarakat kota. Hal yang lebih penting lagi, RPJMD ini harus dapat diimplementasikan dan akhirnya diakuntabilitaskan. Untuk melihat implementasinya, unit kerja Pemda harus menjabarkannya dalam Rencana Strategis masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pelaksanaan Renstra unit kerja tersebut dipertanggungjawabkan kepada Kepala Daerah melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) dari unit kerja masing-masing sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



2.1.1. Visi dan Misi

Sebagai penerjemahan kebijakan politik Walikota sebagai Kepala Daerah terpilih periode 2018-2023, RPJMD menjadi pijakan bagi perencanaan strategis SKPD hingga ke level perencanaan tahunan. Bagian tersebut akan menguraikan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2018-2023 yang tertuang dalam RPJMD tahun 2018-2023.

Visi dan misi Pemerintah Kota Jambi sebagaimana tercantum dalam **RPJMD** Tahun 2018 – 2023 dirumuskan sebagai berikut :

VISI :

MENJADI KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA BERBASIS MASYARAKAT BERAKHLAK DAN BERBUDAYA DENGAN MENGEDEPANKAN PELAYANAN PRIMA

- Pusat Perdagangan dan Jasa** : Berarti pemusatan/konsentrasi distribusi barang dan jasa skala pelayanan lokal dan regional yang didukung sarana prasarana yang memadai termasuk penggantian moda
- Berbasis Masyarakat** : *Community Based* merupakan suatu upaya pemberdayaan kapasitas masyarakat untuk dapat mengenali, menelaah dan mengambil inisiatif untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di lingkungannya serta bersedia untuk menerima perubahan.
- Berakhlak** : Berarti seluruh perilaku masyarakat Kota Jambi harus bersikap sopan santun, baik yang memberikan pelayanan maupun yang menerima pelayanan
- Berbudaya** : Memiliki etika moral, nilai kebaikan, kebenaran, keadilan dan tanggung jawab agar bermakna bagi pembangunan



Pelayanan Prima : Upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara tepat, cepat dan mudah

MISI :

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pemerintah Kota Jambi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu:

- 1) Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi;
- 2) Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat;
- 3) Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan;
- 4) Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan;
- 5) Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan

2.1.2. Prioritas Pembangunan

Program-program pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mendukung tercapainya visi dan misi jangka menengah yang telah ditetapkan untuk kurun waktu 2018–2023, diklasifikasikan berdasarkan prioritas dalam pembangunan Daerah Kota Jambi yaitu:

- (1) Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan
- (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia
- (3) Penanggulangan kemiskinan
- (4) Pengembangan pariwisata dan promosi daerah



2.1.3. Sasaran

Pemerintah Kota Jambi dalam tahun anggaran 2021 dalam mencapai 4 (empat) Prioritas Pembangunan memformulasikan 22 sasaran utama yang akan dicapai dengan uraian sebagai berikut :

Prioritas 1

PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR KOTA YANG BERKELANJUTAN

1. Meningkatkan layanan infrastruktur dan Utilitas perkotaan
2. Meningkatkan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Prioritas 2

PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

3. Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK
4. Menurunkan tingkat pelanggaran terhadap PERDA dan PERWAL
5. meningkatkan pelayanan pada kondisi pra, tanggap dan pasca kebakaran serta kebencanaan
6. Meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya ideologi pancasila dan kebhinekaan dalam kehidupan sosial masyarakat
7. Meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan dan Parpol dalam pembangunan
8. Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan
9. Meningkatkan Kesetaraan Gender
10. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak
11. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
12. Meningkatkan Prestasi dan Kreativitas Kepemudaan



Prioritas 3

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

13. Meningkatkan Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan
14. Meningkatkan Ketahanan Pangan
15. Meningkatkan Penyerapan dan perlindungan Tenaga Kerja
16. Meningkatkan Daya Saing Usaha Skala mikro dan Kecil
17. Meningkatkan Derajat Kesehatan
18. Mengendalikan angka Kelahiran Penduduk
19. Menurunkan angka PMKS

Prioritas 4

PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN PROMOSI DAERAH

20. Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB
21. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
22. Meningkatkan Realisasi Investasi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perlu ditetapkan adanya indikator kinerja daerah dalam sebuah proses pengukuran kinerja dimana pengukuran kinerja diperlukan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan suatu penggunaan sumber daya seperti anggaran sehingga dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan dimasa yang akan datang. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kota Jambi selama periode 2018 – 2023 serta SKPD pelaksana dapat dijelaskan sebagai berikut:



Tabel 2.1.1
Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Jambi Tahun 2018 – 2023
dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab

NO	INDIKATOR UTAMA	KINERJA	PERANGKAT PENANGGUNG JAWAB	DAERAH
1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		1. Dinas Komunikasi dan Informasi 2. Sekretariat Daerah 3. Seluruh Perangkat Daerah	
2.	Indeks Profesionalitas ASN		1. Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 2. Seluruh Perangkat Daerah	
3.	Nilai SAKIP		1. Sekretariat Daerah 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Inspektorat 4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 5. Seluruh Perangkat Daerah	
4.	Indeks survey persepsi Korupsi		1. Inspektorat 2. Sekretariat Daerah 3. Sekretariat DPRD	
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat		1. Sekretariat Daerah 2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 5. Kecamatan	
6.	Penyelesaian jumlah kasus atau pelanggaran PERDA dan PERWAL		Satuan Polisi Pamong Praja	
7.	Cakupan pelayanan pemadam kebakaran		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
8.	Persentase pembinaan terhadap masyarakat terkait ideologi Pancasila		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
9.	Persentase orkesmas dan Parpol yang berperan aktif di		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	



NO	INDIKATOR UTAMA	KINERJA	PERANGKAT PENANGGUNG JAWAB	DAERAH
	masyarakat			
10.	Cakupan Infrastruktur Dan Utilitas	Layanan	1. Dinas Perhubungan 2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
11.	Indeks Kualitas Air		Dinas Lingkungan Hidup	
12.	Indeks Kualitas Udara		Dinas Lingkungan Hidup	
13.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan		Dinas Lingkungan Hidup	
14.	Persentase Pengawasan Perdagangan	Pembinaan, dan Pelayanan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
15.	Skor Pola Pangan Harapan		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
16.	Kontribusi terhadap PDRB	Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
17.	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD)	peningkatan Asli Daerah	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	
18.	Realisasi Investasi		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
19.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
20.	Persentase usaha mikro kecil yang berkualitas		Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
21.	Persentase Produk IKM	Daya Saing	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
22.	Persentase berkualitas	koperasi	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
23.	Angka Harapan Hidup (AHH)		Dinas Kesehatan	
24.	Harapan Lama Sekolah (HLS)		Dinas Pendidikan	



NO	INDIKATOR UTAMA	KINERJA	PERANGKAT PENANGGUNG JAWAB	DAERAH
25.	Persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan Pendidikan	yang mendapat pelayanan Pendidikan	Dinas Pendidikan	
26.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Lama Sekolah	Dinas Pendidikan	
27.	Laju Pertumbuhan Penduduk		Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana	
28.	Persentase Jumlah Keluarga Sejahtera	Jumlah Keluarga	Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana	
29.	Indeks Pembangunan Gender		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	
30.	Indeks Gender	Pemberdayaan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	
31.	Persentase Hak Anak yang Terpenuhi	Hak Anak yang	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	
32.	Persentase masyarakat dalam pembangunan	pemberdayaan dalam	1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak 2. Kecamatan	
33.	Indeks Pemuda	Pembangunan	Dinas Pemuda dan Olah Raga	
34.	Persentase tertangani	PMKS yang	Dinas Sosial	

2.1.4. Strategi, Arah Kebijakan Daerah, Program dan Indikator Kinerja Dalam RPJMD 2018-2023.

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi, arah kebijakan dan program. Selain



itu, untuk mengukur capaian kinerja, maka dirumuskan pula indikator sebagai tolak ukur kinerja.

2.1.4.1. Strategi

Permasalahan, tantangan dan peluang pembangunan yang dihadapi dalam 5 (lima) tahun ke depan akan menentukan agenda, sasaran serta program pembangunan yang juga harus bersifat lintas koordinasi. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem perencanaan yang dapat memecahkan masalah yang lebih sistematis dan konsisten. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, yang dirumuskan dengan kriterianya mencakup (a) mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode pembangunan yang akan datang (periode lima tahunan), (b) Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah, (c) Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya, dan (d) Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memperhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran pembangunan. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah pengembangan program prioritas kepala daerah.

Strategi yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi selama periode 2018 - 2023 dirumuskan sebagai berikut :

1. Pengembangan infrastruktur dan aplikasi TIK
2. Peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur



3. Peningkatan transparansi kinerja instansi pemerintah
4. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dari KKN
5. Menyelenggarakan Pelayanan Publik Berbasis TIK
6. Peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan regulasi daerah
7. Peningkatan manajemen logistik dan pelayanan kebakaran
8. Membangun dan memfasilitasi masyarakat dalam kerangka Konesus dasar bangsa
9. Membina, memberdayakan memfasilitas orkemas dan parpol
10. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perhubungan perkotaan
11. Peningkatan Kualitas Perumahan dan Lingkungan Permukiman yang berkelanjutan
12. Peningkatan sarana dan prasarana serta pengelolaan air bersih, air limbah dan bangunan
13. Peningkatan infrastruktur jalan yang mantap
14. Peningkatan sistem jaringan drainase dan perlindungan retensi
15. Peningkatan sinergisitas penanganan titik genangan
16. Peningkatan harmonisasi ruang kota
17. Peningkatan manajemen pengelolaan persampahan
18. Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan
19. Penguatan pembinaan, pengawasan dan pelayanan perdagangan
20. Meningkatkan Ketahanan Pangan
21. Penguatan daya saing kepariwisataan
22. Peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
23. Peningkatan Iklim Investasi
24. Peningkatan peluang kerja pada usia produktif serta perluasan lapangan usaha
25. Sinergitas hubungan antar stakeholder ketenagakerjaan



26. Sinergitas hubungan antar stakeholder ketenagakerjaan
27. Mendorong Terciptanya Produktivitas IKM
28. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat (universal healthcare)
29. Peningkatan Akses Kesehatan Terhadap Miskin yang Tepat Sasaran
30. Peningkatan akses mutu dan tata kelola pendidikan dasar
31. Peningkatan Akses Pendidikan Terhadap Miskin yang Tepat Sasaran
32. Peningkatan Akses dan Pelayanan Keluarga Berencana yang Berkualitas
33. Peningkatan Pengarusutamaan Gender
34. Peningkatan pemenuhan hak anak
35. Peningkatan pembinaan, monev pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan
36. Peningkatan partisipasi generasi muda dalam pembangunan
37. Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan terhadap PMKS

2.1.4.2. Arah Kebijakan Daerah

Berdasarkan strategi kebijakan sebagaimana tertera di atas, maka dirumuskanlah kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kota Jambi periode 2018–2023 yang memuat 5 misi, 6 tujuan, dan 22 sasaran. Arah Kebijakan Pembangunan ini merupakan langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagai dasar perumusan program berdasarkan fungsi/ bidang/ sub-bidang/ sub-sub bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Arah kebijakan dari sasaran dan strategi pada tujuan misi, sebagai berikut:



Misi 1 : Penguatan birokrasi dan Meningkatkan pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
1. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan infrastruktur dan aplikasi TIK• Peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur• Peningkatan transparansi kinerja instansi pemerintah• Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dari KKN• Menyelenggarakan Pelayanan Publik Berbasis TIK	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan ketatalaksanaan pemerintahan yang berbasis TIK• Meningkatkan kompetensi dan integritas ASN• Meningkatkan Akuntabilitas kinerja keuangan daerah• Meningkatkan kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan• Meningkatkan pengawasan pembangunan secara komprehensi, transparan dan akuntabel• Meningkatkan Koordinasi, Fasilitasi dan kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan• Meningkatkan cakupan pelayanan publik berbasis TIK



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
			<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan perlindungan, penyelamatan arsip dan sistem informasi kearsipan daerah

Misi 2 : Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
2. Meningkatkan Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2. Menurunkan tingkat pelanggaran terhadap PERDA dan PERWAL	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan regulasi daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pengawasan dan pengendalian masyarakat terhadap kepatuhan perda
	3. Meningkatkan pelayanan pada kondisi pra, tanggap dan pasca kebakaran serta kebencanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan manajemen logistik dan pelayanan kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan sistem manajemen logistik kebencanaan
3. Mewujudkan stabilitas daerah yang kondusif dan aman	4. Meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya ideologi pancasila dan kebhinekaan dalam kehidupan sosial masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun dan memfasilitasi masyarakat dalam kerangka Konesus dasar bangsa 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan karakter, ideologi dan wawasan kebangsaan serta peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
	5. Meningkatkan peranan organisasi kemasyarakatan dan parpol dalam pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Membina, memberdayakan memfasilitas orkemas dan parpol 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pembinaan pemberdayaan fasilitas orkemas dan parpol



**Misi 3 : Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas
Perkotaan serta Penataan Lingkungan**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
4. Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan	6. Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan sarana dan prasarana serta pengelolaan air bersih, air limbah dan bangunan• Peningkatan infrastruktur jalan yang mantap• Peningkatan sistem jaringan drainase dan perlindungan retensi• Peningkatan sinergisitas penanganan titik genangan• Peningkatan harmonisasi ruang kota	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan air bersih, air limbah dan Bangunan• Meningkatkan jaringan jalan dan jembatan yang berkondisi baik• Menurunkan jumlah titik genangan perkotaan• Meningkatkan sinergitas pembangunan infrastruktur• Meningkatkan harmonisasi & konsistensi tata ruang
	7. Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none">• Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan	<ul style="list-style-type: none">• Mendorong partisipasi masyarakat untuk pengurangan tingkat pencemaran lingkungan• Pengendalian dan pengawasan lingkungan• Peningkatan dan pengelolaan tutupan lahan binaan



Misi 4 : Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
5. Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	8. Meningkatnya Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan	<ul style="list-style-type: none">• Penguatan pembinaan, pengawasan dan pelayanan perdagangan	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan• Meningkatkan manajemen pengelolaan perpasaran
	9. Meningkatnya Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none">• Pengendalian ketersediaan dan distribusi bahan pangan• Meningkatkan keamanan konsumsi pangan masyarakat perkotaan
	10. Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	<ul style="list-style-type: none">• Penguatan daya saing kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan kreatifitas seni budaya dan pengelolaan peninggalan budaya• Meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan MICE (<i>Meeting, Incentive, Convention, Exhibition</i>)
	11. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	<ul style="list-style-type: none">• Mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak daerah



			<ul style="list-style-type: none">• Mengoptimalkan pengelolaan penerimaan retribusi daerah
	12. Meningkatkan Realisasi Investasi	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan Iklim Investasi	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan Kemudahan Perizinan dan Promosi Investasi
	13. Meningkatkan Penyerapan dan perlindungan Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan peluang kerja pada usia produktif serta perluasan lapangan usaha• Sinergitas hubungan antar stakeholder ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none">• Mendorong kewirausahaan untuk angkatan kerja produktif• Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja• Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis
	14. Meningkatkan Daya Saing Usaha Skala mikro dan Kecil	<ul style="list-style-type: none">• Mendorong Terciptanya Produktivitas IKM	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro kecil dan ekonomi kreatif• Meningkatkan proteksi, pengembangan dan pemasaran produk lokal• Meningkatkan koperasi berkualitas



Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
6. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	15. Meningkatkan Derajat Kesehatan	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat (universal healthcare)• Peningkatan Akses Kesehatan Terhadap Miskin yang Tepat Sasaran	<ul style="list-style-type: none">• Kartu Jambi Bugar
	16. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan akses mutu dan tata kelola pendidikan dasar• Peningkatan Akses Pendidikan Terhadap Miskin yang Tepat Sasaran	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan sarana prasarana pendidikan• Menekan angka putus sekolah• Kartu Jambi Cerdas• Meningkatkan minat baca masyarakat perkotaan
	17. Mengendalikan angka Kelahiran Penduduk	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan Akses dan Pelayanan Keluarga Berencana yang Berkualitas	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan Akses Pelayanan Keluarga Berencana, Pembinaan Ketahanan dan Pembangunan Keluarga



	18. Meningkatkan Kesetaraan Gender	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan Pengarus utamaan Gender	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan partisipasi dan perlindungan terhadap perempuan• Meningkatkan akses perempuan terhadap sumberdaya pembangunan
	19. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan pemenuhan hak anak	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan pemenuhan hak anak
	20. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan pembinaan, monev pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan pembinaan dan monev pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan
	21. Meningkatkan Prestasi dan Kreativitas Kepemudaan	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan partisipasi generasi muda dalam pembangunan	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan pembinaan olahraga dan pengembangan kepemudaan
	22. Menurunkan angka PMKS	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan terhadap PMKS	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan kepada PMKS• Meningkatkan perlindungan sosial terhadap PMKS



2.1.5. Program Untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi tujuan, sasaran strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka upaya pencapaiannya kemudian di jabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program prioritas daerah. Adapun program-program prioritas untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2021 sebagai berikut.

Tabel 2.1.2
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2021

MISI	SASARAN	PROGRAM
1	2	3
I. PENGUATAN BIROKRASI DAN MENINGKATKAN PELAYANAN MASYARAKAT BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	<ol style="list-style-type: none">1. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah2. Peningkatan akses dan kualitas informasi publik3. Penyelenggaraan pengamanan informasi pemerintah daerah4. Manajemen data/informasi/statistik daerah5. Penataan, pelayanan, pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur6. Penataan peraturan perundang-undangan dan penyelesaian perkara pemda7. Peningkatan kerjasama daerah8. Peningkatan pelayanan kedinasan kepala



MISI		SASARAN	PROGRAM
1		2	3
			daerah/wakil kepala daerah, sekda, aparatur dan keprotokolan 9. Peningkatan koordinasi, fasilitasi dan monitoring bidang perekonomian 10. Tata kelola administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa 11. Fasilitasi dan koordinasi kegiatan dan kelembagaan keagamaan 12. Peningkatan pelayanan administrasi umum, keuangan setda dan kerumahtanggaan 13. Tata kelola organisasi dan ketatalaksanaan 14. Penataan administrasi pemerintahan dan kewilayahan 15. Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan 16. Penelitian dan Pengembangan 17. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan administrasi keuangan dan aset 18. Peningkatan sistem pengawasan internal, pembinaan internal dan pengendalian



MISI		SASARAN	PROGRAM
1		2	3
			pelaksanaan kebijakan KDH 19. Peningkatan kapasitas lembaga dan pelayanan kedinasan DPRD 20. Penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 21. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan 22. Peningkatan mutu dan pelayanan perpustakaan 23. Pengelolaan, penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
2.	PENGUATAN PENEGAKKAN HUKUM. TRANTIBMAS DAN KENYAMANAN MASYARAKAT	Menurunkan tingkat pelanggaran terhadap PERDA dan PERWAL Meningkatkan pelayanan pada kondisi pra, tanggap dan pasca kebakaran serta kebencanaan Meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya ideologi pancasila dan kebhinekaan dalam kehidupan sosial masyarakat	1. Penyelenggaraan trantibum, serta penegakan regulasi daerah 2. Pembinaan dan perlindungan masyarakat 3. Peningkatan kesiagaan dini dan manajemen logistik kebencanaan 4. Peningkatan karakter, ideologi dan wawasan kebangsaan serta peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 5. Pembinaan, pemberdayaan dan fasilitas bagi orkesmas dan parpol



MISI		SASARAN	PROGRAM
1		2	3
3	PENGUATAN PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR DAN UTILITAS PERKOTAAN SERTA PENATAAN LINGKUNGAN	<p>Meningkatkan cakupan layanan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan berkelanjutan</p> <p>Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan pelayanan lalu lintas dan angkutan2. Pengendalian dan peningkatan disiplin berlalu lintas3. Peningkatan pelayanan parkir4. Perencanaan teknis ke-PU an5. Peningkatan dan pemeliharaan sistem jaringan drainase/sungai6. Pembangunan, pemeliharaan dan perluasan utilitas perkotaan7. Pembangunan peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan8. Fasilitasi, koordinasi pembinaan dan keterpaduan tata ruang9. Pengembangan dan fasilitasi penyelenggaraan perumahan10. Penataan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman



MISI		SASARAN	PROGRAM
1		2	3
			11. Peningkatan pemeliharaan dan penataan utilitas umum 12. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 13. Perlindungan dan rehabilitasi sumber daya alam 14. Peningkatan kinerja pengelolaan sampah
4	PENGUATAN KAPASITAS EKONOMI PERKOTAAN	Meningkatnya Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan Meningkatnya Ketahanan Pangan Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Meningkatkan Realisasi Investasi	1. Pembinaan, peningkatan dan pengawasan perdagangan 2. Pembinaan dan peningkatan industri kecil menengah 3. Peningkatan ketahanan pangan masyarakat dan pemberdayaan kelembagaan tani 4. Peningkatan produksi, mutu produk, dan diversifikasi sektor pertanian, peternakan dan perikanan



MISI		SASARAN	PROGRAM
1		2	3
		Meningkatkan Penyerapan dan perlindungan Tenaga Kerja	5. Pembinaan, peningkatan dan perluasan pengelolaan kebudayaan
		Meningkatkan Daya Saing Usaha Skala mikro dan Kecil	6. Pembinaan, peningkatan dan pengelolaan pariwisata 7. Peningkatan dan pengelolaan pendapatan daerah 8. Peningkatan realisasi investasi 9. Peningkatan kualitas, perlindungan dan produktivitas, tenaga kerja 10. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah 11. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
5	PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT PERKOTAAN	Meningkatkan Derajat Kesehatan	1. Peningkatan akses, mutu dan tata kelola pendidikan
		Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat
		Mengendalikan angka Kelahiran Penduduk	3. Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial



MISI		SASARAN	PROGRAM
1		2	3
		Meningkatkan Kesetaraan Gender	4. Peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan perempuan dan anak 5. Peningkatan pemberdayaan dan penguatan kelembagaan masyarakat 6. Pembinaan keluarga berencana dan keluarga sejahterah 7. Pembinaan dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga dan kepemudaan 8. Pelayanan umum kecamatan 9. Peningkatan pemberdayaan dan penguatan kelembagaan masyarakat kecamatan 10. Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan 11. Pemberdayaan masyarakat kelurahan
		Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak	
		Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	
		Meningkatkan Prestasi dan Kreativitas Kepemudaan	
		Menurunkan angka PMKS	



2.2. PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA JAMBI TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak diawasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Uraian dan rincian mengenai sasaran berdasarkan prioritas pembangunan, indikator kinerja utama dan target yang telah disusun oleh Pemerintah Kota Jambi tahun 2021 yang telah ditetapkan sebagai Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Jambi tahun 2021 dapat dijelaskan pada tabel 2.2.1 dibawah ini.

Tabel 2.2.1
Sasaran, Indikator Kinerja dan Target
Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2021

NO	SASARAN	STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	Kondisi Awal 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
MISI 1 :		PENGUATAN BIROKRASI DAN MENINGKATKAN PELAYANAN MASYARAKAT BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI									
1	Meningkatkan profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan infrastruktur dan aplikasi TIK Peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur 	1 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2 Indeks profesionalitas ASN	Indeks	2,33	2,44	2,55	2,9	3	3,1	3,2
				Indeks	55	68	74	63,08	85	88	88



NO	SASARAN	STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	Kondisi Awal 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	11
		<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan transparansi kinerja instansi pemerintah Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dari KKN Menyelenggarakan Pelayanan Publik Berbasis TIK 	3	Nilai SAKIP	Nilai	B	B	BB	B	B	BB	BB
			4	Indeks survey persepsi korupsi	Indeks	N/A	3,65	3,69	3,73	3,75	3,8	3,8
			5	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	85,28	85,5	86	86	87	88	89
MISI 2 :		PENGUATAN PENEGAKAN HUKUM, TRANTIBMAS DAN KENYAMANAN MASYARAKAT										
2	Optimalisasi Penegakan Produk Hukum	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan regulasi daerah 	6	Penyelesaian jumlah kasus atau pelanggaran PERDA dan PERWAL	%	82	82	80	81	84	96	100
3	Meningkatkan pelayanan pada kondisi pra, tanggap dan pasca kebakaran serta kebencanaan	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan manajemen logistik dan pelayanan kebakaran 	7	Cakupan pelayanan pemadam kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya ideologi pancasila dan kebhinekaan dalam kehidupan sosial masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Membangun dan memfasilitasi masyarakat dalam kerangka Konesus dasar bangsa 	8	Persentase pembinaan terhadap masyarakat terkait ideologi Pancasila	%	20	20	20	20	20	20	20
5	Meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan dan Parpol dalam pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> Membina, memberdayakan memfasilitas orkemas dan parpol 	9	Persentase orkesmas dan Parpol yang berperan aktif di masyarakat	%	20	20	20	20	20	20	20
MISI 3 :		PENGUATAN PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR DAN UTILITAS PERKOTAAN SERTA PENATAAN LINGKUNGAN										
6	Meningkatkan layanan infrastruktur dan utilitas perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan sarana dan prasarana serta pengelolaan air bersih, air limbah dan bangunan Peningkatan infrastruktur jalan yang mantap Peningkatan sistem jaringan drainase dan perlindungan retensi Peningkatan sinergisitas penanganan titik genangan Peningkatan harmonisasi ruang kota 	10	Cakupan layanan infrastruktur dan utilitas	%	50,59	53,07		56,38	63,31	67,09	70,99



NO	SASARAN	STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	Kondisi Awal 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	11
7	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan 	11	Indeks kualitas air	Indeks	32,11	37,76	38,3	39,75	39,9	40,05	40,2
			12	Indeks kualitas udara	Indeks	80,68	80,7	80,7	80,74	80,76	80,78	80,8
			13	Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	39,33	41,3	41,7	44,85	44,87	44,9	44,9
MISI 4 :		PENGUATAN KAPASITAS EKONOMI PERKOTAAN										
8	Meningkatnya pembinaan, pengawasan dan pelayanan perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan pembinaan, pengawasan dan pelayanan perdagangan 	14	Persentase pembinaan, pengawasan dan pelayanan perdagangan	%	20	36	52	68	84	100	100
9	Meningkatnya ketahanan pangan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan Ketahanan Pangan 	15	Skor pola pangan harapan	%	87,9	88,2	88,6	91,6	89,5	91	91
10	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan daya saing kepariwisataan 	16	Kontribusi pariwisata terhadap PDRB	%	2,35	2,37	2,38	2,39	2,4	2,41	2,41
11	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 	17	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	4	4	16,1	9	9	9	9
12	Meningkatkan realisasi investasi	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Iklim Investasi 	18	Realisasi investasi	Rupiah	410	410	1.055	474,6	498,4	523,4	576
13	Meningkatkan penyerapan dan perlindungan tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan peluang kerja pada usia produktif serta perluasan lapangan usaha Sinergitas hubungan antar stakeholder ketenagakerjaan 	19	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	N/A	N/A	N/A	10,37	9,8	9,3	8,98
14	Meningkatkan daya saing usaha skala mikro dan kecil	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong Terciptanya Produktivitas IKM 	20	Persentase usaha mikro kecil yang berkualitas	%	7,61	8,08	8,54	9,01	9,47	9,94	10
			21	Persentase daya saing produk IKM	%	4,3			6,5			
			22	Persentase koperasi berkualitas	%	13			23,85			
MISI 5 :		PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT PERKOTAAN										
15	Meningkatkan derajat kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat (universal healthcare) Peningkatan Akses Kesehatan Terhadap Miskin yang Tepat Sasaran 	23	Angka Harapan Hidup (AHH)	%	72,34	72,35	72,4	72,73	72,81	72,89	73



NO	SASARAN	STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	Kondisi Awal 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	11		
16	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan akses mutu dan tata kelola pendidikan dasar Peningkatan Akses Pendidikan Terhadap Miskin yang Tepat Sasaran 	24	Harapan Lama Sekolah (HLS)	%	14,25	14,6	14,6	15,11	15,12	15,13	15,1		
			25	Persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan pelayanan pendidikan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	%	21,32			12,32					
			26		%	10,68	10,68	10,7	10,7	10,71	10,72	10,7		
17	Mengendalikan angka kelahiran penduduk	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Akses dan Pelayanan Keluarga Berencana yang Berkualitas 	27	Laju pertumbuhan penduduk	%	N/A	1,05	1,05	1,03	1,01	1,01	1,01		
			28	Persentase jumlah keluarga sejahtera	%	N/A	96,23	96,5	96,69	96,92	97,15	97,2		
18	Meningkatkan kesetaraan gender	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Akses dan Pelayanan Keluarga Berencana yang Berkualitas 	29	Indeks pembangunan gender	Indeks	94,89	94,9	94,9	94,93	94,94	94,95	95		
			30	Indeks pemberdayaan gender	Indeks	68,07	68,1	68,2	69,88	69,89	69,92	70		
19	Meningkatkan pemenuhan hak anak	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pemenuhan hak anak 	31	Persentase hak anak yang terpenuhi	%	50	70	80	90	100	100	100		
20	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pembinaan, movev pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan 	32	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	%	60,23	60,23	61,4	63	64	66	66		
21	Meningkatkan prestasi dan kreativitas kepemudaan	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan partisipasi generasi muda dalam pembangunan 	33	Indeks pembangunan pemuda	%	N/A	50	50,5	57,9	57,95	58	58,5		
22	Menurunkan angka PMKS	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan terhadap PMKS 	34	Persentase PMKS yang tertangani	%	60	65	70	75	80	85	85		



PROGRAM	APBD 2021	APBD-P 2021
1	2	3
Program Aplikasi Informatika	3.604.776.849	4.264.721.015
Program Informasi dan Komunikasi Publik	5.473.045.903	5.760.878.753
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	76.259.850	53.811.570
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	53.724.570	50.224.570
Program Kepegawaian Daerah	2.575.878.850	1.554.332.578
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.870.714.239	1.855.384.765
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	841.155.054.135
Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	26.538.938.800	27.385.090.973
Program Perekonomian dan Pembangunan	3.363.999.721	3.379.756.221
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.444.994.116	842.400.302
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.465.495.247	1.096.297.058
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	745.553.419	655.876.078
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.216.420.678	1.031.874.264
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	29.467.424.142	29.717.339.897
Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.414.850.000	2.421.900.000
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	397.685.000	329.335.000
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	27.011.923.250	24.625.996.180
Program Pencatatan Sipil	304.980.994	281.514.411
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.820.191.495	1.729.719.016
Program Pendaftaran Penduduk	187.800.697	172.588.002
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	32.574.960	32.574.960
Program Pengelolaan Arsip	978.762.230	675.534.799
Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	10.630.643	138.152.247
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	-	1.766.651.285
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1.168.675.821	1.098.751.529
Program Penanggulangan Bencana	1.125.647.998	1.075.612.426
Program Penanggulangan Kebakaran	4.227.756.433	4.241.271.463
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	292.499.672	244.138.510
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.590.944.654	1.494.107.514
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan	801.267.796	707.142.796



PROGRAM	APBD 2021	APBD-P 2021
1	2	3
Organisasi Kemasyarakatan		
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	412.515.440	247.574.400
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	149.955.000	107.409.000
Program Pengelolaan Pelayaran	199.849.073	109.299.073
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	11.707.487.549	11.249.716.449
Program Pengembangan Perumahan	806.021.206	732.650.961
Program Kawasan Permukiman	5.896.761.754	5.765.323.154
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	27.618.191.428	29.564.507.167
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	57.782.580.000	57.764.375.797
Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	2.406.837.550	2.363.126.700
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	6.583.728.790	6.407.980.150
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	1.297.304.490	2.395.427.730
Program Pengembangan Permukiman	56.064.546.320	65.496.410.055
Program Penataan Bangunan Gedung	294.873.827.740	139.559.134.472
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	131.752.099.600	56.184.013.200
Program Penyelenggaraan Jalan	51.575.765.250	64.476.020.177
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	2.484.277.857	2.065.481.457
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	4.585.999.757	4.416.062.683
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	32.291.938.320	49.171.104.599
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	831.279.855	300.589.855
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	325.404.234	215.854.234
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.397.570.164	1.594.799.092
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	7.291.417.193	7.286.864.621
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	35.393.630	1.669.976.800
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	318.039.260	202.704.960
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan	55.564.700	26.739.900



PROGRAM	APBD 2021	APBD-P 2021
1	2	3
Hidup		
Program Pengelolaan Persampahan	42.029.117.903	35.785.928.525
Program Pengembangan Ekspor	91.576.000	91.575.335
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	911.000.000	606.284.948
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2.066.560.632	2.080.364.398
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	137.237.000	120.047.684
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	688.237.000	714.050.241
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	163.225.368	135.637.168
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.795.283.880	1.695.575.880
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	62.489.954	46.082.285
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	141.620.369	100.082.180
Program Penanganan Kerawanan Pangan	73.749.946	65.203.125
Program Pengawasan Keamanan Pangan	176.650.864	65.203.125
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	741.071.478	468.879.466
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	97.639.500	75.508.216
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	532.020.209	419.202.100
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	248.099.646	236.407.129
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	652.917.845	465.798.089
Program Penyuluhan Pertanian	105.999.695	72.818.095
Program Pengembangan Kebudayaan	1.368.738.196	975.185.196
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	149.645.130	149.645.130
Program Pembinaan Sejarah	24.989.670	24.989.670
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.653.169.751	1.466.928.922
Program Pemasaran Pariwisata	1.094.278.860	864.446.860
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	304.499.626	313.914.979
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual		
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.513.254.976	3.895.768.938
Program Pelayanan Penanaman Modal	892.232.509	738.350.389
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi	65.999.620	67.499.620



PROGRAM	APBD 2021	APBD-P 2021
1	2	3
Penanaman Modal		
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	94.574.800	56.224.800
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	533.747.557	611.003.467
Program Promosi Penanaman Modal	453.304.779	190.135.546
Program Perencanaan Tenaga Kerja		
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga kerja	556.518.674	470.069.199
Program Penempatan Tenaga Kerja	376.476.056	201.543.806
Program Hubungan Industrial	349.983.968	329.033.968
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	39.999.870	39.999.870
Program Pemberdayaan Usaha menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	596.199.044	202.889.976
Program Pengembangan UMKM	165.999.928	143.678.430
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	311.500.000	90.722.335
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	106.075.000	70.290.600
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	311.500.000	378.215.751
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	26.641.854	20.178.154
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	391.862.244	539.282.212
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	212.519.559	122.742.000
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	58.589.230.557	63.391.757.203
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	349.556.917	4.808.546.732
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	368.537.970	329.060.303
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	389.055.991	306.771.173
Program Pengelolaan Pendidikan	142.058.880.134	142.385.048.435
Program Pengembangan Kurikulum	319.380.058	27.574.820
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	33.164.585	33.914.585
Program Pembinaan Perpustakaan	1.142.749.638	967.729.718
Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	49.404.740	36.888.330
Program Pengendalian Penduduk	245.713.237	237.313.237
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4.494.642.464	4.610.919.397
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.058.933.099	1.033.090.149
Program Pengarusutamaan Gender Dan	685.255.185	558.283.935



PROGRAM	APBD 2021	APBD-P 2021
1	2	3
Pemberdayaan Perempuan		
Program Perlindungan Perempuan	485.107.261	251.306.177
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	168.951.590	130.712.090
Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	3.411.703.751	910.620.657
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	305.283.114	264.271.224
Program Perlindungan Khusus Anak	571.677.622	752.240.150
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	282.101.733	201.185.233
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		35.358.424.703
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		6.517.319.780
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		4.131.352.406
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.263.784.500	1.313.778.000
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	12.147.110.968	7.642.977.868
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1.221.401.900	1.221.399.850
Program Pemberdayaan Sosial	1.310.539.374	1.028.567.040
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	89.864.240	72.580.220
Program Rehabilitasi Sosial	1.618.864.630	1.408.674.746
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1.048.741.604	1.373.759.955
Program Penanganan Bencana	716.383.972	687.937.642



2.2.1 Anggaran Tahun 2021

Target Belanja Daerah Pemerintah Kota Jambi sampai dengan Perubahan APBD Tahun 2021 adalah sebesar Rp.1.961.694.919.058,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp.1.739.810.416.848,79 (88,69%) yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga.

Tabel 2.2.2

Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga Tahun 2021

NO	URAIAN	ANGGARAN
1.	Belanja Operasi	1.386.617.509,7
2.	Belanja Modal	564.662.175,5
3.	Belanja Tidak Terduga	10.415.233,8
Total Belanja		1.961.694.991,1

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana tergambar dalam tabel 2.5

Tabel 2.2.3

Alokasi Per Sasaran Pembangunan Tahun Anggaran 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		ANGGARAN	%
1	2	3		4	5
1.	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	10.129.635.908	0,56
		2.	Indeks Profesionalitas ASN	3.409.717.343	0,19
		3.	Nilai SAKIP	907.685.588.928	50,25



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		ANGGARAN	%
1	2	3		4	5
		4.	Indeks Survey Persepsi Korupsi	329.335.000	0,02
		5.	Indeks Kepuasan Masyarakat	29.422.730.900	1,63
2.	Optimalisasi Penegakan Produk Hukum Daerah	6.	Persentase PERDA dan PERWAL yang ditegakkan	1.098.751.529	0,06
3.	Meningkatkan pelayanan pada kondisi pra, tanggap dan pasca kebakaran serta kebencanaan	7.	Cakupan pelayanan pemadam kebakaran	5.316.883.889	0,29
4.	Meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya ideologi pancasila dan kebhinekaan dalam kehidupan sosial masyarakat	8.	Persentase pembinaan terhadap masyarakat terkait ideologi Pancasila	2.445.388.820	0,14
5.	Meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan dan Parpol dalam pembangunan	9.	Persentase orkemas dan Parpol yang berperan aktif di masyarakat	354.983.400	0,02
6.	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan	10.	Cakupan Layanan Infrastruktur Utilitas Perkotaan	594.313.235.277	33



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		ANGGARAN	%
1	2	3		4	5
7.	Meningkatkan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	11.	Indeks Kualitas Air	2.111.243.181	0,12
		12.	Indeks Kualitas Udara	8.956.841.421	0,50
		13.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	36.015.373.385	1,99
8.	Meningkatnya Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan	14.	Persentase Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan	3.656.384.439	0,20
9.	Meningkatnya Ketahanan Pangan	15.	Indeks Ketahanan Pangan	3.710.759.690	0,21
10.	Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	16.	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	3.795.110.757	0,21
11.	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	17.	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3.895.768.938	0,22
12.	Meningkatkan Realisasi Investasi	18.	Realisasi Investasi	1.663.213.822	0,09
13.	Meningkatkan Penyerapan dan perlindungan Tenaga Kerja	19.	Tingkat Pengangguran Terbuka	1.000.646.973	0,06
14.	Meningkatkan Daya Saing Usaha Skala mikro dan Kecil	20.	Persentase usaha mikro kecil yang berkualitas	386.568.276	0,02



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		ANGGARAN	%
1	2	3		4	5
		21.	Persentase Daya Saing Produk IKM	539.228.686	0,03
		22.	Persentase koperasi berkualitas	682.202.366	0,04
15.	Meningkatkan Derajat Kesehatan	23.	Angka Harapan Hidup (AHH)	68.836.135.411	3,81
16.	Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	24.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	142.412.623.255	7,88
		25.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	1.038.532.633	0,06
		26.	Persentase Masyarakat Tidak Mampu yang mendapat Jaminan Pelayanan Pendidikan		0,00
17.	Mengendalikan angka Kelahiran Penduduk	27.	Laju Pertumbuhan Penduduk	4.848.232.634	0,27
		28.	Persentase Jumlah Keluarga Sejahtera	1.033.090.149	0,06
18.	Meningkatkan Kesetaraan Gender	29.	Indeks Pemberdayaan Gender	940.302.202	0,05
		30.	Indeks Pembangunan Gender		0,00
19.	Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak	31.	Persentase Hak Anak yang Terpenuhi	2.128.317.264	0,12



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		ANGGARAN	%
1	2	3		4	5
20.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	32.	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	46.007.096.889	2,55
21.	Meningkatkan Prestasi dan Kreativitas Kepemudaan	33.	Indeks Pembangunan Pemuda	10.178.155.718	0,56
22.	Menurunkan angka PMKS	34.	Persentase PMKS yang tertangani	4.571.519.603	0,25

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KOTA JAMBI

Bab III Berisi :

1. **Capaian Indikator Kinerja Utama 2021**
2. **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja**
3. **Perbandingan Target Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2021**
4. **Pendanaan Per Prioritas Pembangunan Tahun 2020 dan Tahun 2021**
5. **Akuntabilitas Penggunaan Anggaran Tahun 2021**
6. **Penghargaan yang Diraih Pemerintah Kota Jambi selama Tahun 2021**

Dokumen perencanaan taktis strategis yang menjadi dasar tolok ukur pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah bagi Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2018-2023, disamping itu pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yang utama adalah bahwa pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen

pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.



Sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kota Jambi untuk membangun akuntabilitas kinerja ini dengan terus mendorong upaya pelembagaan pengendalian, evaluasi yang transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik.

Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	KODE
1.	≥ 91	Sangat Tinggi	
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	
3.	$66 \leq 75$	Sedang	
4.	$51 \leq 65$	Rendah	
5.	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.



3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Tahun Anggaran 2021 disusun dalam bentuk laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Perencanaan Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.1 selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Pemerintah Kota Jambi untuk tahun 2021.

Pencapaian IKU Pemerintah Kota Jambi tahun 2021 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 3.1.1.
Pencapaian IKU Pemerintah Kota Jambi Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	ANGKA AWAL RPJMD	% CAPAIAN 2020	2021			TARGET AKHIR RPJMD
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	2,33	-	2,9	1,69	58,27%	3,2
2.	Indeks profesionalitas ASN	55	116%	63,08	64,24	101,84%	88,00
3.	Nilai SAKIP	B	94,3%	B	B	100%	BB
4.	Indeks survey persepsi korupsi	N/A	94,85%	3,73	-	-	-
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,28%	99,43%	86,00%	86,5%	100,58%	89%
6.	Persentase PERDA dan PERWAL yang ditegakkan	82,00%	93,75%	81%	90,48%	111,70	100%



NO	INDIKATOR KINERJA	ANGKA AWAL RPJMD	% CAPAIAN 2020	2021			TARGET AKHIR RPJMD
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Cakupan pelayanan pemadam kebakaran	100%	93,63%	100%	100%	100%	100%
8.	Persentase pembinaan terhadap masyarakat terkait ideologi Pancasila	20%	100%	20%	20%	100%	20%
9.	Persentase orkesmas dan Parpol yang berperan aktif di masyarakat	20%	243%	20%	21,74%	108,7%	20%
10.	Cakupan layanan infrastruktur dan utilitas	50,59%	107,88%	56,38%	74,76%	132,60%	70,99%
11.	Indeks kualitas air	32,11	103,40	39,75	43,99	110,6%	40,2
12.	Indeks kualitas udara	80,68	104,70	80,74	85,02	105,3%	80,8
13.	Indeks kualitas tutupan lahan	39,33	107,48	44,85	49,91	111,3%	44,92
14.	Persentase pembinaan, pengawasan dan pelayanan perdagangan	20%	223,52%	68%	37,92%	55,76%	100%
15.	Indeks Ketahanan Pangan	N/A	N/A	78%	79,73%	102,22%	84%
16.	Kontribusi pariwisata terhadap PDRB	2,35%	96,21%	2,29%	3,15%	137,55%	2,41%
17.	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4%	-107,11%	9,00%	7,97	88,55%	9,00%
18.	Realisasi investasi	410 M	68,39%	474,62 M	653,17 M	137,62%	575,70M
19.	Tingkat Pengangguran Terbuka	N/A	N/A	10,37%	10,66	97,2	8,98
20.	Persentase usaha mikro kecil yang berkualitas	7,61%	100,00%	9,02%	9,02%	100%	10,00%
21.	Persentase daya saing produk IKM	4,30%	52,34%	6,5%	1,64%	25,23%	8,30%
22.	Persentase koperasi berkualitas	13,00%	101,46%	23,85%	26,36%	110,52%	36,70%
23.	Angka Harapan Hidup (AHH)	72,34%	100,41%	72,73	72,71	99,97%	72,97%



NO	INDIKATOR KINERJA	ANGKA AWAL RPJMD	% CAPAIAN 2020	2021			TARGET AKHIR RPJMD
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
24.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,25%	103,35%	15,11	15,37	101,72	15,14%
25.	Persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan pelayanan pendidikan	21,32%	100%	12,32	12,32	100%	4,32%
26.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,68	102,15%	10,93	11,20	102,15%	10,72%
27.	Laju pertumbuhan penduduk	1.05	95,24%	1,03	0,74	128,16%	1,01%
28.	Persentase jumlah keluarga sejahtera	N/A	99,52%	96,69%	96,83%	100,14%	97,15%
29.	Indeks pembangunan gender	94,89	99,73%	94,93	94,42	99,46%	94,95
30.	Indeks pemberdayaan gender	68,07	102,39%	68,30	-	-	68,50
31.	Persentase hak anak yang terpenuhi	50,00%	100,00%	90%	80%	88,89%	100,00%
32.	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	60,23%	96,29%	63%	87,09%	138,24%	66%
33.	Indeks pembangunan pemuda	50,00	100%	57,9	57,91	100,00%	52%
34.	Persentase PMKS yang tertangani	60%	96,09%	70%	80%	114,28%	85%

Sumber: LKj Perangkat Daerah Diolah Bagian Organisasi (2021)

Catatan :

- IKU Nomor 3 belum dapat diisi karena penilaian merupakan output dari KemenPAN RB, pada saat penyusunan LKJ nilai belum dirilis
- IKU Nomor 4 tidak dapat diisi karena KemenPAN RB pertahun 2021 tidak lagi mengeluarkan nilai Indeks Survey Persepsi Korupsi yang dialihkan menjadi angka/indeks dari Survey penilaian integritas (SPI) tahun 2021 yang dilaksanakan oleh KPK.
- IKU Nomor 30 belum dapat diisi karena penilaian merupakan output dari BPS Kota Jambi, pada saat penyusunan LKJ nilai belum dirilis
- IKU Nomor 19 merupakan IKU Baru pengganti IKU Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sesuai dengan RPJMDP
- IKU Nomor 6 merupakan IKU Baru pengganti IKU Penyelesaian jumlah kasus



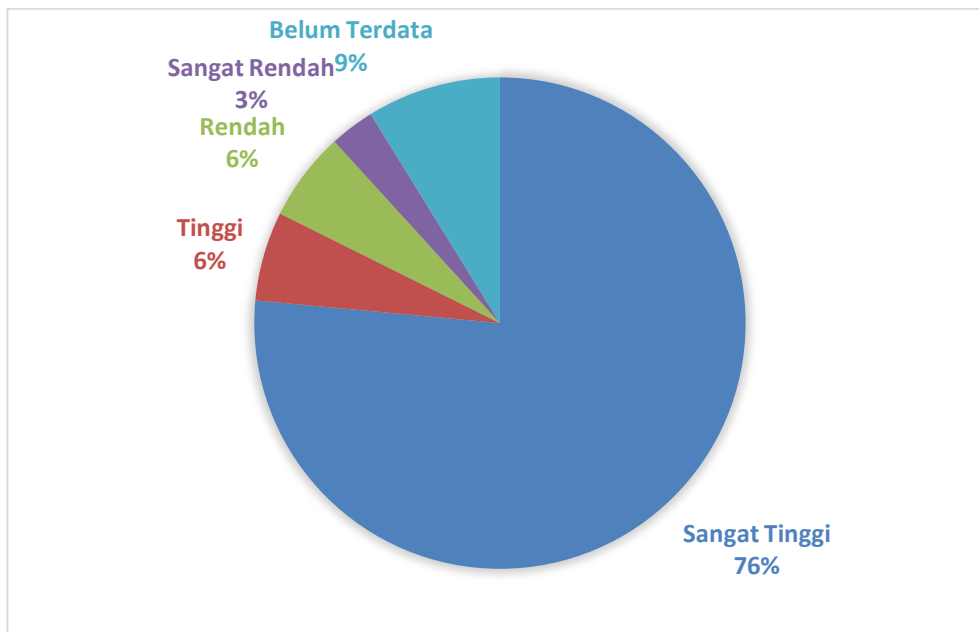
atau pelanggaran PERDA dan PERWAL

- *IKU Nomor 15 merupakan IKU Baru pengganti IKU Skor Pola Pangan Harapan*

Dari 34 Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kota Jambi pada tahun 2021, **26 indikator menunjukkan capaian $\geq 91\%$ atau lebih** masuk dalam kategori **SANGAT TINGGI**. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh stakeholder dalam mendukung capaian sejumlah indikator tersebut.

Untuk sejumlah target IKU Pemerintah Kota Jambi yang tingkat pencapaiannya belum mencapai 100 % pada tahun 2021, masih diperlukan upaya kinerja yang lebih keras, fokus, dan terarah; dengan pertimbangan sejumlah analisa yang mempengaruhi. Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 terdapat **26** indikator menunjukkan capaian **SANGAT TINGGI**, **2** indikator menunjukkan capaian **Tinggi**, **0** indikator capaian **Sedang**, **2** indikator capaian **Rendah**, **1** indikator capaian **Sangat Rendah** dan **3** Indikator **BELUM TERDATA**.

Grafik 3.1
Persentase Pencapaian IKU Tahun 2021



3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Bagian sub-bab ini akan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja secara umum sebagaimana sudah diuraikan dalam sub bab sebelumnya. Penyajian untuk sub bab ini akan disajikan per prioritas pembangunan.

Dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah Kota Jambi dalam kurun waktu 2018-2023 telah merencanakan / menetapkan 4 Prioritas dengan 22 sasaran pembangunan dan 34 Indikator Kinerja Utama.

**SASARAN 1
MENINGKATKAN PROFESIONALISME ASN DAN
AKUNTABILITAS TIK**

Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan dan pelayanan publik. Upaya mengukur profesionalitas ASN dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.



IP ASN ini merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi dalam rangka pengembangan profesionalitas profesi ASN. Indikator pengukuran profesionalitas ASN meliputi 4 (empat) dimensi yaitu: a) Kualifikasi 25%, b) Kompetensi 40%, c) Kinerja 30% dan d) Disiplin 5%.

Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama untuk sasaran 1 (pertama) tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2.1.
Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Sasaran ke 1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGKA AWAL RPJMD	% CAPAIAN 2020	2021			TARGET AKHIR RPJMD	
					TARGET	REALISASI	% CAPAIAN		
1.	Meningkatkan profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,33	-	2,9	1,69	58,27	3,2
		2	Indeks profesionalitas ASN	55	116%	63,08	64,24	101,84	88
		3	Nilai SAKIP	B	94,3%	B	-	-	BB
		4	Indeks survey persepsi korupsi	N/A	94,85%	3,73	-	-	-
		5	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,28%	99,43%	86%	86,5%	100,58%	89%
RATA-RATA % CAPAIAN				101,145%			86,89%		

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi 2021. (Data diolah)

Untuk mencapai sasaran profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK ditetapkan 5 (lima) IKU dengan target yang berbeda. Dalam pelaksanaannya kelima IKU ini dilaksanakan oleh beberapa

perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Jambi, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

IKU kesatu merupakan tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informasi, Sekretariat Daerah dan seluruh perangkat daerah, dengan *leading sector* Dinas Komunikasi dan Informasi yaitu indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan target 2,9 terealisasi 1,69 atau dengan capaian sebesar 58,27 persen masuk dalam kategori **RENDAH**. Pada tahun 2021 pelaksanaan evaluasi SPBE dilaksanakan dengan menggunakan instrument yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE yang sebelumnya 37 indikator menjadi 47 indikator. Penilaian SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen dan penilaian interviu melalui proses verifikasi, klarifikasi dan validasi dokumen pendukung.

Nilai Indeks SPBE dihitung dengan menggunakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan. Nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Rumus penghitungan nilai indeks SPBE dijabarkan sebagai berikut :

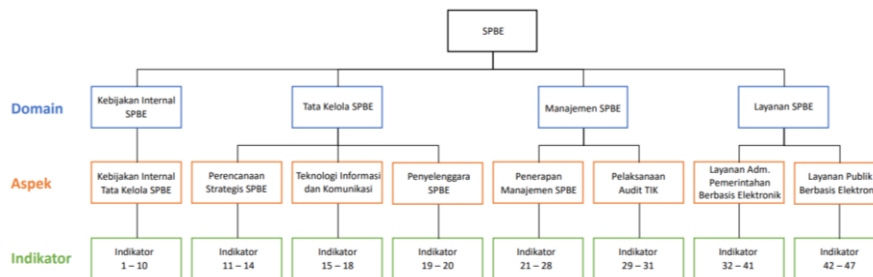
$$\text{Indeks Domain}_i = \frac{1}{BD_i} \sum_{j=m}^n NA_{ij} \times BA_{ij}$$

Dimana :

- ND_j adalah nilai indeks domain ke-j;
- BD_j adalah nilai bobot domain ke-j.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE, pada evaluasi SPBE terdapat penambahan Indikator Penilaian, dari yang sebelumnya 37 Indikator menjadi 47 Indikator, dimana terdiri dari 4 Domain, Adapun Domain terbaru yaitu Domain 3 yang membahas mengenai Manajemen SPBE yang terdiri dari 11 Indikator.



Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi Tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2.2.

Capaian Indikator Kinerja Utama DISKOMINFO Mengacu Pada RPJMD

NO	IKU	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Indeks SPBE	Angka	2,9	1,69	58,28

Dari target yang ditetapkan sebesar 2,9, Pemerintah Kota Jambi pada tahun 2021 hanya mencapai nilai Indeks SPBE sebesar **1,69** yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1503 Tahun 2021 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2021

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut kekuatan dan kelemahan dari pengelolaan SPBE Kota Jambi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2.3.

Tabel Kekuatan dan Kelemahan Pengelolaan SPBE Kota Jambi



No.	Uraian	Kekuatan	Kelemahan
1.	Kebijakan Internal terkait tata Kelola SPBE	<ul style="list-style-type: none">Peraturan Walikota Jambi Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Teknologi dan InformasiPeraturan Walikota Jambi Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengelola Informasi dan DokumentasiPeraturan Walikota Jambi Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektor	<ul style="list-style-type: none">Tidak adanya data dukung dalam dokumen arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Pembangunan aplikasi SPBE, Manajemen Keamanan Informasi, Audit TIK dan Tim Koordinasi.
2.	Perencanaan strategis SPBE	<ul style="list-style-type: none">Adanya Peta rencana SPBE dan Rencana anggaran SPBE	<ul style="list-style-type: none">Tidak ditemukan data dukung dalam dokumen arsitektur SPBE dan inovasi proses bisnis
3.	Teknologi Informasi dan Komunikasi	<ul style="list-style-type: none">Adanya layanan jaringan intra	<ul style="list-style-type: none">Belum ada pembangunan SPBE, layanan pusat data dan penggunaan sistem penghubung layanan (tidak ada data dukung)
4.	Penyelenggaraan SPBE	<ul style="list-style-type: none">Belum ada kekuatan yang dapat diamati	<ul style="list-style-type: none">Belum ada tim koordinasi SPBE dan kolaborasi penerapan SPBE



No.	Uraian	Kekuatan	Kelemahan
5.	Penerapan manajemen SPBE	<ul style="list-style-type: none">• Belum ada kekuatan yang dapat diamati karena• Belum dilaksanakan penerapan manajemen SPBE	<ul style="list-style-type: none">• Belum ada manajemen resiko SPBE, Manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen aset TIK, Kompetensi SDM, Manajemen pengetahuan, manajemen perubahan dan manajemen layanan SPBE (Belum ada data dukung)
6.	Audit TIK	<ul style="list-style-type: none">• Belum ditemukan kekuatan yang dapat diamati karena aspek pelaksanaan audit belum dikerjakan	<ul style="list-style-type: none">• Belum ada audit infrastruktur SPBE, audit aplikasi SPBE dan audit keamanan SPBE (Tidak ada data dukung)
7.	Layanan administrasi Pemerintahan berbasis Elektronik	<ul style="list-style-type: none">• Belum ditemukan kekuatan yang diamati	<ul style="list-style-type: none">• Aspek layanan bersifat interaktif kecuali layanan pengadaan barang dan jasa yang sudah bersifat transaksional
8.	Layanan Publik Berbasis Elektronik	<ul style="list-style-type: none">• Tidak ditemukan kekuatan yang dapat diamati	<ul style="list-style-type: none">• Aspek layanan masih bersifat interaktif (kematangan level 2)

Dengan adanya kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), kedepannya Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika akan berupaya memenuhi kekurangan/kelemahan tersebut.

Adapun rencana perbaikan yang dilakukan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yaitu menyiapkan kebijakan internal terkait Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Pembangunan Aplikasi SPBE, Manajemen Keamanan Informasi, Audit TIK, dan Tim Koordinasi SPBE. Pada Aspek Perencanaan Strategis, akan disusun Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE dan Inovasi Proses Bisnis SPBE. Pada Aspek TIK akan dilakukan perbaikan pada Aspek Penyelenggara SPBE, Aspek Penerapan Manajemen



SPBE, dan pada Aspek Pelaksanaan Audit TIK akan dilakukan Audit TIK Internal dan Eksternal. Sedangkan untuk Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Aspek Layanan Publik akan ditingkatkan sifat layanannya menjadi transaksional (menyediakan fitur seperti pemantauan proses, validasi data, mekanisme persetujuan, transaksi basis data, analitik data, tanda tangan elektronik yang tersertifikasi) dan saling terintegrasi kedepannya.

2. Indeks Profesionalitas ASN

IKU kedua merupakan tanggung jawab dari Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dan seluruh perangkat daerah dengan *leading sector* Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yaitu indeks profesionalitas ASN dengan target sebesar 63,08 persen terealisasi sebesar 64,24 persen atau dengan capaian 101,84 persen masuk dalam kategori **SANGAT TINGGI**, dikarenakan berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Adapun rumus pengukuran indeks profesionalitas ASN merupakan jumlah total hasil perkalian dari bobot dimensi/indikator dikalikan skor/nilai masing-masing jawaban dimensi/indikator. Dimensi terdiri dari 1. Dimensi kualifikasi, 2. Dimensi kompetensi 3. Dimensi kinerja dan 4. Dimensi Disiplin, yaitu:

1. Dimensi Kualifikasi

Dimensi Kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Dimensi Kualifikasi diperhitungkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan Pengukuran. Indikator yang digunakan adalah jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh PNS, meliputi:



- a. Pendidikan S-3 (Strata Tiga);
- b. Pendidikan S-2 (Strata Dua);
- c. Pendidikan S-1 (Strata Satu)/D-IV (Diploma Empat);
- d. Pendidikan D-III (Diploma Tiga);
- e. Pendidikan D-II (Diploma Dua)/D-I (Diploma Satu)/ Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/ sederajat; dan
- f. Di bawah SLTA.

Instrumen Pengukuran pada dimensi kualifikasi bobot penilaiannya sebagai berikut:

- a. Bobot nilai sebesar 25 (dua puluh lima) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan S-3 (Strata Tiga);
- b. Bobot nilai sebesar 20 (dua puluh) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan S-2 (Strata Dua);
- c. Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan S-1 (Strata Satu) /D-IV (Diploma Empat);
- d. Bobot nilai sebesar 10 (sepuluh) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan D-III (Diploma Tiga);
- e. Bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan D-II (Diploma Dua)/D-I (Diploma Satu)/ Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/sederajat; dan
- f. Bobot nilai sebesar 1 (satu) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan di bawah SLTA.

Kualifikasi diartikan sebagai berikut :

- a. Pendidikan khusus untuk memperoleh suatu keahlian
- b. Keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu (menduduki jabatan dsb.)
- c. Tingkatan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kualifikasi adalah



keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu atau menduduki jabatan tertentu. Pada ASN atau PNS Kualifikasi dapat ditempuh dengan pemberian izin belajar dan Tugas Belajar.

Untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (PNS) berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan PNS melalui pendidikan berkelanjutan dalam bentuk pemberian tugas belajar dan izin belajar. Pemberian tugas belajar dan izin belajar didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 196 1 tentang Pemberian Tugas Belajar. Izin belajar dan tugas belajar bagi PNS adalah bentuk dukungan pemerintah dalam meningkatkan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia, khususnya yang bekerja dalam bidang pelayanan publik.

Tabel 3.2.4
Persentase Pendidikan Formal terakhir

No	Indikator	Tahun 2021	
		Target	Realisasi
1	Izin Belajar	120	102
2	Tugas Belajar	15	5
3	Jumlah	135	107
4	Jumlah ASN SLTA yang akan ditingkatkan	526	
Persentase Pendidikan Formal yang akan ditingkatkan $(3/4) \times 100\%$		25,67	20,34

2. Dimensi Kompetensi

Dimensi Kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan. Dimensi Kompetensi diperhitungkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan Pengukuran. Indikator yang digunakan yaitu riwayat pengembangan kompetensi yang terdiri atas:

- a. Diklat Kepemimpinan;
- b. Diklat Fungsional;
- c. Diklat Teknis; dan



d. Seminar/Workshop/Magang/Kursus/sejenisnya.

- Instrumen Pengukuran pada diklat kepemimpinan bobot penilaiannya sebagai berikut:

a. Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan jabatan yang diduduki.

b. Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan jabatan yang diduduki.

- Instrumen Pengukuran pada diklat fungsional bobot penilaiannya sebagai berikut:

a. Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki; dan

b. Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dan belum mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki.

- Instrumen Pengukuran pada diklat teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP dengan bobot penilaian sebagai berikut:

a. Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas dan fungsi jabatannya;

b. Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan



teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas dan fungsi jabatannya;

- c. Bobot nilai sebesar 22,5 (dua puluh dua koma lima) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas jabatannya dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- d. Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas jabatannya dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- Instrumen Pengukuran pada seminar / workshop / kursus / magang / sejenisnya dengan bobot penilaian sebagai berikut:

- a. Bobot nilai sebesar 10 (sepuluh) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang telah mengikuti seminar/ workshop / kursus / magang / sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- b. Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang belum mengikuti seminar / workshop / kursus / magang / sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- c. Bobot nilai sebesar 17,5 (tujuh belas koma lima) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang telah mengikuti seminar / workshop / kursus / magang / sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- d. Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang belum mengikuti seminar/ workshop / kursus / magang/sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir.



Keikutsertaan dalam seminar/workshop/kursus/magang/ sejenisnya tersebut dibuktikan dengan sertifikat/surat tugas dan sejenisnya.

Kompetensi diartikan sebagai kemampuan (*capability*) atau keahlian (*expertise*) yang lebih dari sekedar keterampilan (*skill*) belaka. Kompetensi juga merupakan hasil dari pengalaman yang melibatkan pemahaman/pengetahuan, tindakan nyata serta proses mental yang terjadi dalam jangka waktu tertentu serta berulang-ulang sehingga menghasilkan kemampuan/keahlian dalam bidang tertentu. Oleh karena itu dikatakan pula bahwa kompetensi dibentuk oleh interaksi antara faktor pengalaman dan faktor bawaan. Kompetensi digunakan pula untuk menggambarkan pengelompokan pengetahuan, keahlian dan perilaku yang menentukan keberhasilan atau kegagalan seseorang dalam pekerjaan.

Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur sipil negara dapat diperoleh melalui pengalaman pekerjaan dan diklat. Diklat merupakan program pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi yang memiliki kurikulum sesuai dengan kebutuhan pemenuhan kompetensi SDM, baik berupa *hard* maupun *soft competencies*.

a. Kompetensi Manajerial

Kompetensi Manajerial (*managerial competence*) adalah kompetensi yang berhubungan dengan berbagai kemampuan manajerial yang dibutuhkan dalam menangani tugas organisasi. Kompetensi manajerial meliputi kemampuan menerapkan konsep dan teknik perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi kinerja unit organisasi, juga kemampuan dalam melaksanakan prinsip *good governance* dalam manajemen pemerintahan dan pembangunan termasuk bagaimana mendayagunakan kemanfaatan sumberdaya pembangunan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Jumlah pegawai yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi



manajerial terdiri dari jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat PIM II, III dan IV sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.2.5.
Kompetensi Manajerial

No	Indikator	Tahun 2019		Target 2020		Target 2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi manajerial setiap tahun						
	-Diklat PIM. II	5	5	0	0	0	0
	-Diklat PIM Tk. III	5	5	0	0	7	7
	-Diklat PIM Tk. IV	30	30	30	30	0	0
	Jumlah	40	40	30	30	7	7
2	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi manajerial (akumulasi)						
	-Diklat PIM Tk. II	27	25	27	25	27	25
	-Diklat PIM Tk. III	117	130	117	130	124	137
	-Diklat PIM Tk. IV	528	509	558	539	558	539
	Jumlah	672	664	702	694	709	701
3	Jumlah Pejabat Struktural	1102		1102		1043	
	Persentase pegawai yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi manajerial $(2/3) \times 100\%$	60,98%	60,25%	63,70%	62,98%	67,98%	67,21%
	CAPAIAN IKU	98,8%		98,9%		98,9%	

b. Kompetensi Teknis

Kompetensi Teknik (*technical competence*) yaitu kompetensi mengenai bidang yang menjadi tugas pokok organisasi. Definisi yang sama dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Diklat Jabatan PNS, bahwa kompetensi teknis adalah kemampuan PNS dalam bidang teknis tertentu untuk pelaksanaan tugas masing-masing. Bagi PNS yang belum memenuhi persyaratan kompetensi jabatan perlu mengikuti diklat teknis yang berkaitan dengan persyaratan kompetensi jabatan masing-masing. Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi teknis pada indikator ini merupakan penjumlahan jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat teknis tugas

dan fungsi serta diklat fungsional, dengan capaian sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2.6.
Kompetensi Teknis

No	Indikator	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis setiap tahun :	120	174	160	252	120	170
2	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis (akumulasi)	1790	1804	1950	2056	2070	2226
	Jumlah PNS	6213		5816		5624	
	Persentase pegawai yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis $(2/3) \times 100\%$	28,81%	29,04%	33,53%	35,35%	36,81%	39,58%

Namun demikian, masih terdapat penghambat pencapaian kinerja, diantaranya :

1. Perubahan peraturan perundang-undangan serta kebijakan mengenai pendidikan dan pelatihan.
2. Terdapatnya pandangan bahwa kegiatan Diklat hanya sebagai penugasan bukan sebagai upaya meningkatkan kompetensi/kebutuhan Untuk itu, beberapa langkah yang dilakukan (solusi) untuk meningkatkan kinerja indikator ini dimasa yang akan datang antara lain :

1. Koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pelaksana Pembina diklat yang rutin untuk memperoleh informasi yang tepat dalam menunjang target kinerja.
2. Melaksanakan diklat yang penunjukan peserta berdasarkan analisis kebutuhan sesuai dengan kompetensi yang ingin ditingkatkan.
3. Menciptakan Kerjasama yang baik antara peserta diklat, panitia penyelenggara dan widyaiswara.

3. Dimensi Kinerja

Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/ informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada



tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Dimensi Kinerja diperhitungkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan Pengukuran.

Indikator yang digunakan adalah riwayat hasil penilaian kinerja yang mencakup sebagai berikut:

- a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan
- b. Perilaku Kerja Pegawai (PKP).

Instrumen Pengukuran pada dimensi kinerja bobot penilaiannya sebagai berikut:

- a. Bobot nilai sebesar 30 (tiga puluh) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus) dengan kriteria sangat baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- b. Bobot nilai sebesar 25 (dua puluh lima) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan 90 (sembilan puluh) dengan kriteria baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- c. Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 61 (enam puluh satu) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) dengan kriteria cukup dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- d. Bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 51 (lima puluh satu) sampai dengan 60 (enam puluh) dengan kriteria sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- e. Bobot nilai sebesar 1 (satu) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja 50 (lima puluh) ke bawah dengan kriteria.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Penilaian prestasi kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh



pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.

Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.

Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan. Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana kerja tahunan adalah rencana yang memuat kegiatan tahunan dan target yang akan dicapai sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh instansi pemerintah.

Pejabat penilai adalah atasan langsung PNS yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat struktural eselon V atau pejabat lain yang ditentukan. Atasan pejabat penilai adalah atasan langsung dari pejabat penilai.

Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.

Penilaian prestasi kerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja.

Tabel 3.2.7.
Penilaian Prestasi Kerja PNS

No	KETERANGAN NILAI SKP	JUMLAH PERKATEGORI	JUMLAH PERSENTASE
1	91 - 100 : Sangat baik	400	7,11%
2	79 - 90 : Baik	5180	92,11%
3	61 - 75 : Cukup	30	0,535
4	51 - 60 : Kurang	5	0,09%
5	50 - ke bawah : Buruk	9	0,16%
6	JUMLAH ASN YANG MENYAMPAIKAN	5624	



7	JUMLAH ASN	5624
8	Persentase Penilaian Prestasi Kerja PNS yang mendapatkan Nilai Baik $[(1+2)/7] \times 100\%$	99,22

4. Dimensi Disiplin

Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS. Dimensi Disiplin diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari keseluruhan Pengukuran.

Indikator yang digunakan yaitu data/informasi mengenai hukuman disiplin yang pernah diterima yang mencakup:

- Hukuman disiplin ringan;
- Hukuman disiplin sedang; dan
- Hukuman disiplin berat.

Instrumen Pengukuran pada dimensi kinerja bobot penilaiannya sebagai berikut:

- Bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang memiliki riwayat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
- Bobot nilai sebesar 3 (tiga) bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan;
- Bobot nilai sebesar 2 (dua) bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang; dan
- Bobot nilai sebesar 1 (satu) bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.

Hukuman disiplin yang sebagaimana dimaksud telah mempunyai keputusan final dan dihitung dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai, maka BKPSDMD sebagai lembaga yang memiliki fungsi untuk melaksanakan pembinaan pegawai, berorientasi pada upaya untuk



meningkatkan kepatuhan dan kesadaran PNS terhadap peraturan disiplin dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan pelaksanaan ke pemerintahan yang baik (*Good Governance*) melalui pengukuran persentase Penurunan Hukuman disiplin. Selanjutnya dalam hal peningkatan disiplin, tindaklanjut terhadap PNS yang indisipliner terus dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Sepanjang tahun 2020 telah ditetapkan untuk hukuman ringan SK Kepala OPD sebanyak 13 orang, hukuman tingkat sedang sebanyak 9 orang, sedangkan hukuman tingkat berat sebanyak 4 orang. Dengan demikian Hukuman disiplin yang ditetapkan Pejabat Pembina Kepegawaian dalam tahun 2020 sebanyak 26 Surat Keputusan, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.2.8.
Jumlah PNS yang Menerima Hukuman

No	Tingkatan Hukuman	Jenis Hukuman	Jumlah
1	Hukuman Disiplin tingkat Berat	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri	5
2	Hukuman Disiplin tingkat Sedang	a. Penundaan Gaji Berkala	1
		b. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun	5
		c. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun	1
3	Hukuman ringan SK Walikota	Pernyataan tidak puas secara tertulis	0
4	Hukuman ringan yang ditembuskan Kepala OPS termasuk yang berbentuk SP	Surat Teguran	2
Jumlah			14

Selanjutnya tindaklanjut terhadap PNS yang melakukan tindak pidana telah ditetapkan SK Pemberhentian dengan hormat terhadap 4 (empat) orang PNS, sebagaimana tergambar pada tabel berikut dibawah ini.

Tabel 3.2.9.
Jumlah PNS yang Terlibat Tindak Pidana

No	Jenis Tindak Pidana	Penetapan Status	Jumlah
----	---------------------	------------------	--------



1	Tindak pidana biasa	a. Pemberhentian tidak dengan hormat	0
		b. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri	4
2	Tindak pidana korupsi	1. Pemberhentian tidak dengan hormat	0
JUMLAH			4

Bila dibandingkan antara kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan, maka target telah tercapai 100,20%, seperti dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.10.
Persentase Penurunan Hukuman Disiplin

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		%
		Target	Realisasi	
Persentase Penurunan Hukuman Disiplin	%	4,98	4,99	100,20%

Bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, jumlah pelanggaran disiplin yang ditangani oleh BKPSDMD mengalami penurunan. Peningkatan ini disebabkan karena meningkatnya pembinaan dan sosialisasi yang dilaksanakan oleh BKPSDMD sehingga banyak SKPD yang melaporkan kasus pelanggaran disiplin untuk selanjutnya dilakukan Pembinaan.

Tabel 3.2.11.
Data Jumlah Pelanggaran Disiplin yang Ditangani oleh BKPSDMD Kota Jambi berdasarkan Jenis Pelanggaran Tahun 2019-2021

Jenis Pelanggaran Disiplin	Tahun		
	2019	2020	2021
Ringan	25	13	2
Sedang	4	9	7
Berat	6	4	5
Jumlah	35	26	14

Tabel 3.2.12.
Penurunan Hukuman Disiplin

No	JENIS HUKUMAN DISIPLIN	JUMLAH HUKUMAN DISIPLIN
----	------------------------	-------------------------



		TAHUN 2020	TAHUN 2021
1	RINGAN	13	2
2	SEDANG	9	7
3	BERAT	4	5
4	TIPIKOR	0	0
	JUMLAH	26	14
	Jumlah Pegawai Kota	5816	5624
	Persentase Hukuman Disiplin (5/6) x 100%	0,45%	0,25%

Kategori tingkat profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut:

Tabel 3.2.13.
Rentang Nilai Tingkat Profesionalitas ASN

No.	Nilai	Tingkat Profesionalitas
1.	91 – 100	Sangat Tinggi
2.	81 – 90	Tinggi
3.	71 – 80	Sedang
4.	61 – 70	Rendah
5.	60 ke bawah	Sangat Rendah

Selama tahun 2021 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi melalui DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi dengan total nilai keseluruhan anggaran sebesar **Rp. 17.958.310.600** sedangkan realisasi anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi mencapai **Rp. 16.428.580.715** atau dengan serapan dana APBD mencapai **91,48%**, dengan demikian dapat dikatakan bahwa tahun 2021 baik, dengan kondisi anggaran terakhir adalah **SILPA sebesar Rp. 1.529.729.885,00**. Adapun untuk untuk Belanja Operasi dengan Anggaran sebesar Rp. **15.672.051.286,00** dengan Realisasi



Anggaran Sebesar Rp. **14.162.728.815,00** atau mencapai **90,37%**. Untuk Belanja Modal dengan Anggaran sebesar Rp **2.286.314** dengan Realisasi Anggaran Sebesar Rp **2.265.851.900** atau mencapai **99,10%**.

Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dapat dijelaskan bahwa untuk mengelola sumberdaya aparatur di Kota Jambi dengan jumlah PNS pada akhir Desember 2021 sebanyak 5.624 PNS sedangkan jumlah PNS di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Jambi sejumlah 48 PNS artinya 1 orang harus menangani 117 PNS ini sangat efisien dari dukungan sumber daya. Sedangkan pengelolaan sumberdaya manusia aparatur dilakukan mulai dari proses rekrutmen hingga pensiun yang harus terus menerus dilakukan pembinaan dan pengembangan. Untuk menjaga keberlangsungan proses tersebut menjadi kewenangan tugas pokok dan fungsi bagi PNS di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Jambi yang harus mampu melaksanakan program dan kegiatan serta mencapai target yang sudah ditetapkan. Kemudian dari sisi penggunaan anggaran terdapat sisa anggaran belanja langsung sebesar Rp. **1.529.729.885,00-** (Satu milyar lima ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) atau (8,52 %).

- Analisis Efisiensi

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2021 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang **sangat tinggi**. Hal ini bisa dilihat bahwa keseluruhan sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realisasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil daripada realisasi capaian kinerjanya. Bagian yang disajikan dalam tabel dibawah ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang



pencapaian kinerjanya mencapai atau kurang dari 100%. Terlihat bahwa mayoritas sasaran menunjukkan pencapaian yang sama atau kurang dari 100%.

Tingkat efisiensi tertinggi dapat terlihat pada indikator meningkatnya kualifikasi dan kompetensi Aparatur Sipil Negara yang mencapai 19,91%, sedangkan tingkat efisiensi yang terendah ditunjukkan pada indikator meningkatnya Kualitas Penataan Aparatur Sipil Negara yang hanya memiliki tingkat efisiensi 15,40%.

Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

- Analisis Efektivitas

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah tercapai, dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Secara umum dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan cukup efektif terhadap capaian kinerja organisasi dimana dengan anggaran dibawah 100% dapat menghasilkan kinerja 100% atau lebih.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dimana anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

3. Nilai SAKIP



Selanjutnya IKU ketiga yaitu nilai SAKIP yang merupakan tanggung jawab Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Jambi, Inspektorat Kota Jambi, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan seluruh perangkat daerah dengan target tahun 2021 adalah nilai B dan belum terealisasi atau dengan capaian 0 persen masuk dalam kategori **BELUM TERDATA**. Adapun penilaian dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas dan Pengawasan dan saat ini belum ada pengumuman nilai SAKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang biasanya rutin dilakukan pada bulan Januari atau Februari tahun berjalan terhadap penilaian SAKIP tahun 2021.

Adapun komponen yang dinilai dengan bobot, sebagai berikut:

Tabel 3.2.14
Tabel Komponen Penilaian SAKIP

No	Komponen Yang Di Nilai	Bobot
1.	Perencanaan kinerja	30
2.	Pengukuran kinerja	25
3.	Pelaporan kinerja	15
4.	Evaluasi internal	10
5.	Capaian kinerja	20
	Nilai hasil evaluasi	100

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP dari Kemenpan dan RB, pada tahun 2020, Pemerintah Kota Jambi memperoleh nilai predikat "B". Artinya capaian nilai hasil evaluasi SAKIP untuk tahun 2020 telah mencapai target RPJMD. Bila dibandingkan dengan tahun 2019, perolehan nilai SAKIP tahun 2020 naik sebesar 0,99 poin, namun masih dalam predikat "B". Terdapat beberapa kelemahan yang dihadapi sesuai dengan hasil evaluasi Kemenpan dan RB:

- a. Tujuan dan Sasaran Strategis yang ditetapkan pada dokumen perencanaan pemerintah daerah dan organisasi Perangkat Daerah



- (OPD) belum sepenuhnya menjawab isu strategis yang dihadapi serta belum dilengkapi dengan indikator kinerja yang SMART. Hal tersebut mengakibatkan program dan kegiatan tidak memiliki dampak dan manfaat langsung bagi masyarakat;
- b. Penjabaran kinerja yang disusun belum seluruhnya memenuhi prinsip logis yang menggambarkan hubungan sebab akibat serta belum menggambarkan pemecahan masalah sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Selain itu, penjabaran kinerja masih berorientasi pada urusan sehingga belum terlihat hubungan lintas fungsi antar OPD yang dibutuhkan untuk mendukung tercapainya kinerja secara menyeluruh;
 - c. Kepemilikan kinerja masih belum terlihat pada OPD sehingga implementasi SAKIP masih pada tahap administrasi saja. Belum sepenuhnya terlihat adanya keterlibatan pimpinan OPD dalam pengambilan keputusan strategis yang berhubungan dengan penetapan kinerja dan strategi yang diperlukan;
 - d. Pimpinan OPD belum terlibat aktif dalam pelaksanaan program/kegiatan, pemantauan dan evaluasi efektifitas program/kegiatan dalam mencapai kinerja, serta pengambilan keputusan atas perencanaan kinerja dan strategi dalam pelaksanaannya;
 - e. Kualitas pengungkapan informasi kinerja yang dituangkan dalam laporan kinerja masih terbatas sehingga belum menghasilkan umpan balik berupa perbaikan atas perencanaan kinerja dan strategi dalam pelaksanaannya;
 - f. Hasil evaluasi internal SAKIP yang telah dilakukan oleh Inspektorat terhadap perangkat daerah belum memacu perbaikan akuntabilitas kinerja secara signifikan; dan
 - g. Rendahnya kualitas implementasi SAKIP mengakibatkan upaya reformasi birokrasi yang dilakukan belum mendukung pencapaian

kinerja.

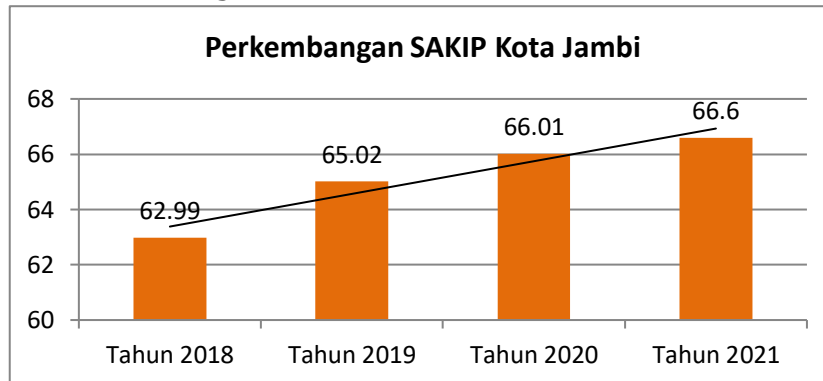
Sedangkan untuk tahun 2021, Pemerintah Kota Jambi menargetkan nilai hasil evaluasi SAKIP adalah "B" dan target tahun akhir 2024 adalah BB . Berikut tren nilai perolehan predikat hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Kota Jambi:

Tabel 3.2.15.
Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Kota Jambi Tahun 2018-2021

Tahun	Target	Realiasi
2018	B (60,01)	B (62,99)
2019	B (60,01)	B (65,02)
2020	B (60,01)	B (66,01)
2021	B (60,01)	B (66,60)

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kota Jambi

Grafik 3.2.15.
Perkembangan SAKIP Kota Jambi Tahun 2018-2021



Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Jambi

Berdasarkan Tabel 3.2 dan Grafik 3.1, dapat dijelaskan bahwa nilai evaluasi SAKIP Kota Jambi tahun 2018-2021 terus mengalami peningkatan bobot nilai.

Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian target kinerja berada dalam tren positif namun belum mencapai target yang diharapkan dalam RPJMD.



Indikator keempat yaitu indeks survey persepsi korupsi dengan penanggungjawab Inspektorat, Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dengan *leading sector* Inspektorat Kota Jambi. Target indeks survey persepsi korupsi ditetapkan dengan indeks 3,73 dan belum terealisasi atau dengan capaian 0 persen masuk dalam kategori **BELUM TERDATA**. Dapat dijelaskan bahwa pada tahun sebelumnya Survei Eksternal Persepsi Anti Korupsi dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan menggunakan skala 1 hingga 4. Namun berdasarkan surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/13/RB.01/2021 tanggal 23 Juni 2021 perihal Penyampaian Informasi Pemanfaatan Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK sebagai Nilai Hasil Survei Eksternal Persepsi Anti Korupsi dalam Evaluasi RB bahwa khusus untuk survey pengukuran Sub Komponen Hasil Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN mulai tahun 2021 akan menggunakan Angka/Indeks dari Survei Penilaian Integritas (SPI) yang menunjukkan level integritas instansi, dengan skala 1 hingga 100; semakin tinggi angka integritas sebuah instansi, maka sistem yang berjalan untuk mendeteksi risiko korupsi dan menangani ketika terjadi tindak pidana korupsi di K/L/PD tersebut juga semakin baik.

Hasil keseluruhan peserta SPI 2021 menunjukkan indeks SPI rata-rata berada di angka 72,4. Sementara itu, Kota Jambi mendapatkan skor sebesar 70. Hasil Survei Penilaian Integritas 2021 menghasilkan penilaian untuk berbagai dimensi integritas. KPK merumuskan rekomendasi agar Kota Jambi dapat melakukan beberapa upaya pencegahan Korupsi dengan focus prioritas sebagai berikut:

1. Prioritas pertama dan yang paling utama adalah penguatan sistem pencegahan korupsi yang ada agar lebih terintegrasi dan berdayaguna. Efektifitas sosialisasi anti korupsi dapat dIKUatkan melalui pendidikan, kampanye, pengawasan dan penegakan secara simultan. Upaya ini



perlu dikomunikasikan secara aktif di internal pegawai dan seluruh pemangku kepentingan.

2. Kedua, pengembangan program sosialisasi dan kampanye anti korupsi pada pengguna layanan serta upaya dan capaian program anti korupsi oleh instansi. Program bertujuan untuk mempengaruhi perubahan perilaku terutama kepada pengguna layanan agar tidak memberi suap atau gratifikasi dan lakukan bila ada pelanggaran.
3. Ketiga, meningkatkan kualitas sistem merit dan pengaturan pengelolaan konflik kepentingan hingga implementasinya pada proses promosi atau mutasi. Tujuannya untuk mendapatkan pegawai atau pejabat yang sesuai dengan kebutuhan instansi. Selain itu instansi perlu memperkuat dan mengoptimalkan kemampuan sistem dan sumber daya internal untuk mendeteksi risiko kejadian korupsi secara proaktif pada proses promosi/mutasi tersebut.
4. Keempat optimalisasi penggunaan teknologi, misalnya layanan *online* atau bentuk lain yang sudah dijalankan. Selanjutnya, meningkatkan keterbukaan dan kemudahan akses untuk mengurangi peran perantara ketika memberi layanan. Tak lupa juga perlunya memperkuat peran Mitra untuk meningkatkan kualitas layanan yang transparan dan akuntabel.
5. Kelima yang tak kalah penting adalah perdagangan pengaruh (*trading in influence*) dapat diminimalisir dengan mendorong transparansi pada proses pelaksanaan tugas dan pemberian layanan. Contohnya dengan optimalisasi penggunaan teknologi keterbukaan dan kemudahan akses informasi, pemangkasan birokrasi yang menghambat serta penguatan tata kelola kelembagaan. Selain itu, instansi perlu mengatur pengelolaan benturan kepentingan untuk mengurangi intervensi pihak-pihak tertentu dalam pencegahan korupsi. Cakupan yang diatur meliputi area rawan dalam pemberian layanan, perizinan,

PBJ, pelaksanaan tugas pegawai, pengelolaan SDM dan pengelolaan anggaran.



Lebih lanjut indikator kelima yaitu indeks kepuasan masyarakat yang didukung oleh Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Sekretariat Daerah, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dan Kecamatan dalam Kota Jambi, dengan

target 86,00 persen dan terealisasi 85,93 persen atau capaian sebesar 99,92 persen masuk dalam kategori **SANGAT TINGGI**. Dimana dapat dijelaskan bahwa semua program atau kegiatan pada tahun 2021 menunjang pada keberhasilan pencapaian pernyataan/perjanjian kinerja, namun belum optimal dalam pelaksanaannya. Dalam artian semua kegiatan dapat terlaksana, sasaran strategis dinas yang merupakan indikator kinerja utama tercapai, namun indeks kepuasan masyarakat tahun 2021 mengalami penurunan dari segi indeks Kepuasan Masyarakat dengan target B terealisasi B.

Dalam penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2021 Pemerintah Kota Jambi dalam hal ini Bagian Organisasi Setda Kota Jambi melakukan survey dengan mengambil sampel pada instansi yang melakukan pelayanan publik, yaitu 15 (lima belas) unit pelayanan public. Dengan jumlah responden sebagai berikut:

Tabel 3.2.16.
Jumlah Responden Survei IKM Kota Jambi

NO	NAMA UNIT PELAYANAN PUBLIK	RESPONDEN
1	2	3
1.	RSUD Abdul Manap	74

NO	NAMA UNIT PELAYANAN PUBLIK	RESPONDEN
1	2	3
2.	Dinas Perhubungan	78
3.	Disperindag	50
4.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	21
5.	Kecamatan Danau Sipin	42
6.	PDAM Tirta Mayang	296
7.	Puskesmas Paal Merah	45
8.	Puskesmas Paal V	81
9.	Puskesmas Putri Ayu	142
10.	Kecamatan Pasar Jambi	21
11.	Kecamatan Alam Barajo	22
12.	Kecamatan Jelutung	21
13.	Kelurahan Simpang Empat Sipin	73
14.	Kelurahan Pakuan Baru	75
15.	Kelurahan Budiman Jambi Timur	75
JUMLAH RESPONDEN		1.116

Sumber : data primer diolah, 2021



Adapun berdasarkan prinsip pelayanan publik sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik Nomor

14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yang kemudian dikembangkan menjadi 9 unsur yang “relevan”, “valid” dan “reliable”, sebagaimana unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Kesesuaian persyaratan pelayanan

Tabel 3.2.17.

Nilai Rata-rata U-1 pengukuran IKM Kota Jambi



NO	NAMA UNIT PELAYANAN PUBLIK	Nilai Rata-rata
1	2	3
1.	Kecamatan Pasar Jambi	3.33
2.	Kecamatan Alam Barajo	2.86
3.	Kecamatan Danau Sipin	3.14
4.	Kecamatan Jelutung	3.04
5.	Kelurahan Budiman Jambi Timur	2.98
6.	Kelurahan Simpang Empat Sipin	2.98
7.	Kelurahan Pakuan Baru	3.01
8.	Puskesmas Putri Ayu	3.02
9.	Puskesmas Paal Merah	3.02
10.	Puskesmas Paal V	3.06
11.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2.9
12.	PDAM Tirta Mayang	2.84
13.	Disperindag	2.88
14.	Dinas Perhubungan	2.65
15.	RSUD Abdul Manap	3.16

Sumber : data primer diolah

2. Kemudahan prosedur pelayanan

Tabel 3.2.18
Nilai Rata-rata U-2 pengukuran IKM Kota Jambi

NO	NAMA UNIT PELAYANAN PUBLIK	Nilai Rata-rata
1	2	3
1.	Kecamatan Pasar Jambi	3.14
2.	Kecamatan Alam Barajo	2.68
3.	Kecamatan Danau Sipin	3.14
4.	Kecamatan Jelutung	2.8
5.	Kelurahan Budiman Jambi Timur	3
6.	Kelurahan Simpang Empat Sipin	2.94
7.	Kelurahan Pakuan Baru	2.98
8.	Puskesmas Putri Ayu	3.04
9.	Puskesmas Paal Merah	3.11
10.	Puskesmas Paal V	3.11
11.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2.71
12.	PDAM Tirta Mayang	2.82
13.	Disperindag	2.82
14.	Dinas Perhubungan	2.74
15.	RSUD Abdul Manap	3.17



Sumber : data primer diolah

3. Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan

Tabel 3.2.19
Nilai Rata-rata U-3 pengukuran IKM Kota Jambi

NO	NAMA UNIT PELAYANAN PUBLIK	Nilai Rata-rata
1	2	3
1.	Kecamatan Pasar Jambi	2.95
2.	Kecamatan Alam Barajo	2.36
3.	Kecamatan Danau Sipin	2.83
4.	Kecamatan Jelutung	2.61
5.	Kelurahan Budiman Jambi Timur	3
6.	Kelurahan Simpang Empat Sipin	2.89
7.	Kelurahan Pakuan Baru	2.84
8.	Puskesmas Putri Ayu	2.87
9.	Puskesmas Paal Merah	2.77
10.	Puskesmas Paal V	2.97
11.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2.85
12.	PDAM Tirta Mayang	2.73
13.	Disperindag	2.66
14.	Dinas Perhubungan	2.64
15.	RSUD Abdul Manap	3.01

Sumber : data primer diolah

4. Kewajaran biaya tarif dalam pelayanan

Tabel 3.2.20.
Nilai Rata-rata U-4 pengukuran IKM Kota Jambi

NO	NAMA UNIT PELAYANAN PUBLIK	Nilai Rata-rata
1	2	3
1.	Kecamatan Pasar Jambi	3.8
2.	Kecamatan Alam Barajo	3.68
3.	Kecamatan Danau Sipin	3.71
4.	Kecamatan Jelutung	3.61
5.	Kelurahan Budiman Jambi Timur	3.77
6.	Kelurahan Simpang Empat Sipin	3.93
7.	Kelurahan Pakuan Baru	3.62
8.	Puskesmas Putri Ayu	3.47
9.	Puskesmas Paal Merah	3.2
10.	Puskesmas Paal V	3.4
11.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3.52



12.	PDAM Tirta Mayang	2.48
13.	Disperindag	2.58
14.	Dinas Perhubungan	2.87
15.	RSUD Abdul Manap	3.64

Sumber : data primer diolah

5. Kesesuaian produk layanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan

Tabel 3.2.21.

Nilai Rata-rata U-5 pengukuran IKM Kota Jambi

NO	NAMA UNIT PELAYANAN PUBLIK	Nilai Rata-rata
1	2	3
1.	Kecamatan Pasar Jambi	3.19
2.	Kecamatan Alam Barajo	2.63
3.	Kecamatan Danau Sipin	3.07
4.	Kecamatan Jelutung	3
5.	Kelurahan Budiman Jambi Timur	3.06
6.	Kelurahan Simpang Empat Sipin	3.08
7.	Kelurahan Pakuan Baru	3
8.	Puskesmas Putri Ayu	3.01
9.	Puskesmas Paal Merah	2.93
10.	Puskesmas Paal V	3.01
11.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3.09
12.	PDAM Tirta Mayang	2.75
13.	Disperindag	2.72
14.	Dinas Perhubungan	2.58
15.	RSUD Abdul Manap	3.06

Sumber : data primer diolah

6. Kompetensi kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan

Tabel 3.2.22.

Tabel Nilai Rata-rata U-6 pengukuran IKM Kota Jambi

NO	NAMA UNIT PELAYANAN PUBLIK	Nilai Rata-rata
1	2	3
1.	Kecamatan Pasar Jambi	3.14
2.	Kecamatan Alam Barajo	2.81
3.	Kecamatan Danau Sipin	3.14
4.	Kecamatan Jelutung	3.09
5.	Kelurahan Budiman Jambi Timur	2.93



6.	Kelurahan Simpang Empat Sipin	3
7.	Kelurahan Pakuan Baru	2.97
8.	Puskesmas Putri Ayu	3.05
9.	Puskesmas Paal Merah	3
10.	Puskesmas Paal V	3.08
11.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3.14
12.	PDAM Tirta Mayang	2.85
13.	Disperindag	2.96
14.	Dinas Perhubungan	2.69
15.	RSUD Abdul Manap	3.08

Sumber : data primer diolah

7. Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan

Tabel 3.2.23.

Tabel Nilai Rata-rata U-7 pengukuran IKM Kota Jambi

NO	NAMA UNIT PELAYANAN PUBLIK	Nilai Rata-rata
1	2	3
1.	Kecamatan Pasar Jambi	2.9
2.	Kecamatan Alam Barajo	2.95
3.	Kecamatan Danau Sipin	3.16
4.	Kecamatan Jelutung	3.38
5.	Kelurahan Budiman Jambi Timur	3.04
6.	Kelurahan Simpang Empat Sipin	3.02
7.	Kelurahan Pakuan Baru	3.12
8.	Puskesmas Putri Ayu	3.04
9.	Puskesmas Paal Merah	3.15
10.	Puskesmas Paal V	3.09
11.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2.85
12.	PDAM Tirta Mayang	2.88
13.	Disperindag	2.92
14.	Dinas Perhubungan	2.73
15.	RSUD Abdul Manap	3.13

Sumber : data primer diolah



8. Kualitas sarana dan prasarana

Tabel 3.2.24.
Tabel Nilai Rata-rata U-8 pengukuran IKM Kota Jambi

NO	NAMA UNIT PELAYANAN PUBLIK	Nilai Rata-rata
1	2	3
1.	Kecamatan Pasar Jambi	2.76
2.	Kecamatan Alam Barajo	2.68
3.	Kecamatan Danau Sipin	2.97
4.	Kecamatan Jelutung	2.47
5.	Kelurahan Budiman Jambi Timur	2.97
6.	Kelurahan Simpang Empat Sipin	2.87
7.	Kelurahan Pakuan Baru	2.66
8.	Puskesmas Putri Ayu	2.4
9.	Puskesmas Paal Merah	2.55
10.	Puskesmas Paal V	3.03
11.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2.33
12.	PDAM Tirta Mayang	2.76
13.	Disperindag	2.4
14.	Dinas Perhubungan	2.64
15.	RSUD Abdul Manap	2.83

Sumber : data primer diolah

9. Penanganan pengaduan pengguna layanan

Tabel 3.2.25.
Nilai Rata-rata U-9 pengukuran IKM Kota Jambi

NO	NAMA UNIT PELAYANAN PUBLIK	Nilai Rata-rata
1	2	3
1.	Kecamatan Pasar Jambi	3.33
2.	Kecamatan Alam Barajo	2.54
3.	Kecamatan Danau Sipin	3.47
4.	Kecamatan Jelutung	2.66
5.	Kelurahan Budiman Jambi Timur	3.3
6.	Kelurahan Simpang Empat Sipin	3.09
7.	Kelurahan Pakuan Baru	3.34
8.	Puskesmas Putri Ayu	3.27
9.	Puskesmas Paal Merah	3.57
10.	Puskesmas Paal V	3.3
11.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3.19
12.	PDAM Tirta Mayang	2.95



13.	Disperindag	3.04
14.	Dinas Perhubungan	2.92
15.	RSUD Abdul Manap	2.85

Sumber : data primer diolah

Nilai IKM dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata ketimbangan” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 13 (tiga belas) unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot Nilai Rata – Rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Perunsur}}{\text{Total Unsur yang Berisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas konversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM} = \text{Unit Pelayanan} \times 25$$

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:

- a. Menambah unsur yang dianggap relevan
- b. Memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 (sembilan) unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah unsur tetap

Tabel 3.2.26.
Nilai Pengukuran IKM Kota Jambi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,61	C	Kurang Baik
3	3,064 - 3,532	76,61 - 88,31	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Tabel 3.2.27.
Hasil pengolahan data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

NO	KELURAHAN	KATEGORI		SKOR
1.	Kecamatan Pasar Jambi	B	Baik	79,1
2.	Kecamatan Alam Barajo	C	Kurang Baik	70.07
3.	Kecamatan Danau Sipin	B	Baik	79.62
4.	Kecamatan Jelutung	C	Kurang Baik	74.2
5.	Kelurahan Budiman Jambi Timur	B	Baik	78
6.	Kelurahan Simpang Empat Sipin	B	Baik	77.32
7.	Kelurahan Pakuan Baru	C	Kurang Baik	76.59
8.	Puskesmas Putri Ayu	C	Kurang Baik	75.62
9.	Puskesmas Paal Merah	C	Kurang Baik	75.92
10.	Puskesmas Paal V	B	Baik	78.05
11.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	C	Kurang Baik	66.76
12.	PDAM Tirta Mayang	C	Kurang Baik	69.73
13.	Disperindag	C	Kurang Baik	69.38
14.	Dinas Perhubungan	C	Kurang Baik	68.01
15.	RSUD Abdul Manap	B	Baik	77.7

Sumber : data primer diolah

Berdasarkan analisa di atas, maka nilai indeks secara keseluruhan diperoleh dengan angka indeks 2.97 setelah dikonversi menjadi 74,40 dengan mutu pelayanan pada kategori kurang baik "C".

Tabel 3.2.28.
Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Jambi

No	Indikator	Kesimpulan
1.	IKM setelah dikonversi	74.40
2.	Mutu pelayanan	C
3.	Kinerja unit pelayanan	Kurang Baik

Sumber : data primer diolah

Dari (9) sembilan unsur yang menjadi fokus penilaian dalam memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat ini, secara keseluruhan dapat



diketahui bahwa unsur yang memiliki **rata-rata skor terendah** adalah unsur kedelapan yaitu kualitas sarana dan prasarana yang menjadi keluhan dari masyarakat selaku pengguna utama pelayanan publik yang disediakan oleh Pemerintah Kota Jambi. Hal yang sebaliknya, unsur yang secara keseluruhan memiliki **rata-rata skor tertinggi** adalah unsur pertama yaitu kesesuaian persyaratan pelayanan dan unsur ketujuh yaitu perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan. Hal ini menunjukkan bahwa selama mendapatkan pelayanan dari instansi yang menjadi sampling masyarakat merasakan kesesuaian persyaratan pelayanan dan keramahan perilaku petugas merupakan unsur yang baik.

Selanjutnya pada tahun 2021 Indeks Kepuasan Masyarakat pada DPMPSTSP Kota Jambi mendapatkan nilai IKM sebesar 85,93 persen dari target 86 persen atau kategori BAIK "B", dengan responden 439 orang.

Tabel 3.2.29.

Nilai Unsur Pelayanan DPMPSTSP Kota Jambi Tahun 2021

No	Unsur Pelayanan	Bobot Rata-Rata Unsur	Nilai Unsur Pelayanan	Nilai Indeks	Nilai IKM Konversi
1	2	3	4	5	6=5x25
U1	Kesesuaian Persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan	1401	3.328	0.355	8.875
U2	Kemudahan Prosedur Pelayanan	1383	3.187	0.351	8.775
U3	Kecepatan Waktu Dalam Memberikan Pelayanan	1620	3.733	0.411	10.275
U4	Kemungkinan Adanya Pungutan Biaya Lainnya Selain Tarif	1736	4	0.44	11



No	Unsur Pelayanan	Bobot Rata-Rata Unsur	Nilai Unsur Pelayanan	Nilai Indeks	Nilai IKM Konversi
1	2	3	4	5	6=5x25
U5	Kesesuaian Produk Pelayanan Antar Tercantum Dalam Standar Pelayanan Dengan Hasil Yang Diberikan	1390	3.203	0.352	8.8
U6	Kompetensi/Kemampuan Petugas Memberikan Pelayanan	1669	3.846	0.423	10.575
U7	Perilaku Petugas Dalam Pelayanan Terkait Kesopanan dan Keramahan	1408	3.244	0.357	8.925
U8	Kualitas Sarana dan Prasarana	1397	3.219	0.354	8.85
U9	Penanganan Pengaduan Layanan Pengaduan	1558	3.59	0.395	9.875

Tabel 3.2.30.
Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMPSTSP Kota Jambi 2021

No	Indikator	Kesimpulan
1.	IKM setelah dikonversi	85,93
2.	Mutu pelayanan	B
3.	Kinerja unit pelayanan	Baik

Sumber : data primer diolah

Sementara itu Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi 2021 mendapatkan nilai sebesar 87,08 persen dari target 87 persen atau kategori BAIK "B", dengan responden 439 orang.

Tabel 3.2.31.
Nilai Unsur Pelayanan Dinas DUKCAPIL Kota Jambi 2021



No	Unsur Pelayanan	Bobot Rata-Rata Unsur	Nilai Unsur Pelayanan	Nilai Indeks	Nilai IKM Konversi
1	2	3	4	5	6=5x25
U1	Kesesuaian Persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan	1237	3255	0.361	9.025
U2	Kemudahan Prosedur Pelayanan	1266	3.332	0.370	9.25
U3	Kecepatan Waktu Dalam Memberikan Pelayanan	1299	3.418	0.379	9.47
U4	Kemungkinan Adanya Pungutan Biaya Lainnya Selain Tarif	1451	3.818	0.424	10.6
U5	Kesesuaian Produk Pelayanan Antar Tercantum Dalam Standar Pelayanan Dengan Hasil Yang Diberikan	1325	3.487	0.387	9.67
U6	Kompetensi/Kemampuan Petugas Memberikan Pelayanan	1364	3.589	0.398	9.95
U7	Perilaku Petugas Dalam Pelayanan Terkait Kesopanan dan Keramahan	1305	3.434	0.381	9.52
U8	Kualitas Sarana dan Prasarana	1273	3.350	0.372	9.3
U9	Penanganan Pengaduan Layanan Pengaduan	1405	3.697	0.410	10.25

Tabel 3.2.32.
Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas DUKCAPIL
Kota Jambi 2021

No	Indikator	Kesimpulan
1.	IKM setelah dikonversi	87,08
2.	Mutu pelayanan	B
3.	Kinerja unit pelayanan	Baik

Sumber : data primer diolah

SASARAN 2 MENURUNKAN TINGKAT PELANGGARAN TERHADAP PERDA DAN PERWAL

Sasaran kedua adalah menurunkan tingkat pelanggaran terhadap PERDA dan PERWAL yang di dukung oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi.

Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama untuk sasaran 2 (kedua) tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2.33.

Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Sasaran ke 2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGKA AWAL RPJMD	% CAPAIAN 2020	2021			TARGET AKHIR RPJMD
					TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
2.	Menurunkan tingkat pelanggaran terhadap PERDA dan PERWAL	6 Persentase PERDA dan PERWAL yang ditegakkan	82,00%	93,75%	81%	90.48%	111,70 %	100,00%
RATA-RATA % CAPAIAN				93,75%			111,70%	

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi 2021. (Data diolah)

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) antara target dan realisasi kinerja tahun 2021 tercapai dengan capaian kinerja 111,70%.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi tahun 2021 di atas apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.2.34.

Dari tabel tersebut terlihat bahwa jumlah kasus atau pelanggaran Perda dan Perwal setiap tahunnya mengalami penurunan terbukti dari tahun 2019



ke 2021 selalu mengalami penurunan kasus dengan tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) mencapai 100%.

Tabel 3.2.34.

Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Dua Tahun Terakhir Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2019			2020			2021		
			T	R	C	T	R	C	T	R	C
1	Menurunkan Jumlah Kasus Pelanggaran Terhadap Perda dan Perwal	Penyelesaian Jumlah Kasus Atau Pelanggaran Perda dan Perwal	82%	82%	100%	80%	80%	100%			
	Optimalisasi Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang Ditegakan							81%	90,48%	100%

Keterangan :

T	Target
R	Realisasi
C	Capaian

Setelah membandingkan antara target dan realisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi tahun 2021 dan membandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir. Maka dapat dibandingkan pula dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi antara lain sebagai berikut:

Tabel 3.2.35.

Perbandingan antara Realisasi dengan Target Jangka Menengah Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA			TARGET JANGKA MENENGAH	KET
				2019	2020	2021		
1	Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Menurunkan Jumlah Kasus Pelanggaran Terhadap Perda dan Perwal	Penyelesaian Jumlah Kasus Atau Pelanggaran Perda dan Perwal	82%	80%		60%	



		Optimalisasi Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang Ditegakan			90,48 %	96%	Revisi Renstra
--	--	--	---	--	--	---------	-----	----------------

Tabel 3.2.36.

Analisis Pencapaian Sasaran 1

Menurunkan Jumlah Kasus Pelanggaran Terhadap Perda dan Perwal

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Penyelesaian Jumlah Kasus Atau Pelanggaran Perda dan Perwal"	%	80	80	100.00			
2	Cakupan Penegakan PERDA dan PERWAL di Kota Jambi	%	69	69				
3	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum	%	75	75				
4	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat	%	54	54				
5	Jumlah GAKLIN dan Pencitraan Polisi Pamong Praja	%	42	42				
6	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang Ditegakan	%				81	90,48	111.70

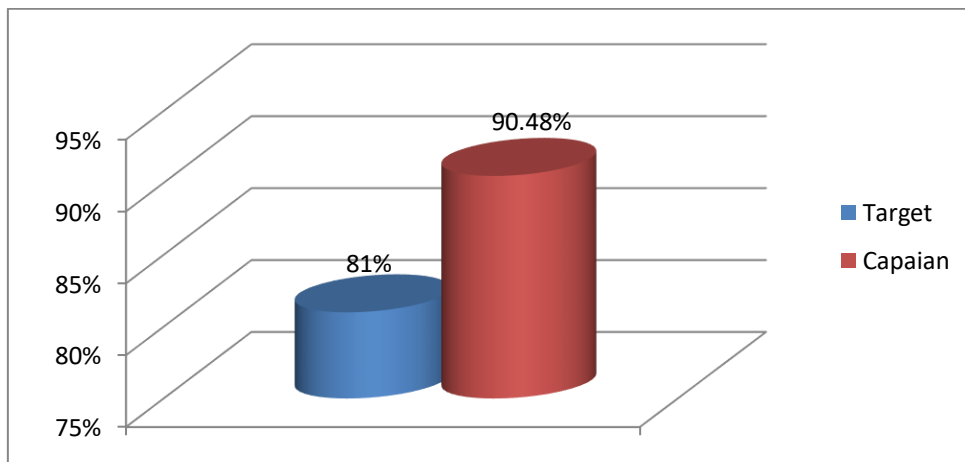
Capaian kinerja nyata indikator 1 " *Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang Ditegakan*" adalah sebesar 19 Perda dan Perwal yang ditegakan dari 21 Perda dan Perwal yang memuat sanksi di tahun 2021, sehingga :

$$Capaian = \frac{\text{Jumlah Perda dan Perwal yang ditegakan}}{\text{jumlah Perda dan Perwal yang memuat sanksi}} \times 100\%$$

$$Capaian = \frac{19}{21} \times 100\% = 90,48\%$$

Grafik 3.3

Capaian Indikator 1



Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, 2021



Tabel 3.2.38.
Laporan Penegakan Perda Dan Perkada
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi Tahun 2021

NO.	PERDA/PERKADA	TENTANG
1.	Perda Kota Jambi No. 05 Tahun 2020	Tentang Perubahan Kedua Atas Perda No. 08 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah
2.	Perda Kota Jambi No. 06 Tahun 2020	Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum
3.	Perda Kota Jambi No. 07 Tahun 2020	Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha
4.	Perda Kota Jambi No. 06 Tahun 2019	Tentang Perubahan Kedua Atas Perda No. 07 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah
5.	Perda Kota Jambi No. 04 Tahun 2017	Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Jambi
6.	Perda Kota Jambi No. 04 Tahun 2017	Tentang Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Beracun
7.	Perda Kota Jambi No. 03 Tahun 2016	Tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
8.	Perda Kota Jambi No. 10 Tahun 2016	Tentang Administrasi Kependudukan
9.	Perda Kota Jambi No. 12 Tahun 2016	Tentang Perubahan Atas Perda No. 05 Tahun 2005 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
10.	Perda Kota Jambi No. 03 Tahun 2015	Tentang Bangunan (IMB)
11.	Perda Kota Jambi No. 02 Tahun 2014	Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila.
12.	Perda Kota Jambi No. 09 Tahun 2013	Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi [RTRW]
13.	Perda Kota Jambi No. 13 Tahun 2017	Tentang Retribusi Perizinan Tertentu
14.	Perda Kota Jambi No. 06 Tahun 2010	Tentang Pergudangan
15.	Perda Kota Jambi No. 07 Tahun 2010	Tentang Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol di Tempat Umum.
16.	Perda Kota Jambi No. 06 Tahun 2006	Tentang Pengelolaan Pasar
17.	Perda Kota Jambi No. 47 Tahun 2002	Tentang Ketertiban Umum

NO.	PERDA/PERKADA	TENTANG
18.	Perwal Kota Jambi No. 35 Tahun 2017	Penetapan Garis Sempadan Jalan Bangunan (GSB) dan Jarak Antar Bangunan.
19.	Perwal Kota Jambi No. 21 Tahun 2020	Tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Di Area Publik/Dilingkungan Usaha dan Masyarakat Dalam Pemberlakuan Relaksasi Ekonomi dan Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi
20.	Perwal Kota Jambi No. 20 Tahun 2013	Penyelenggaraan Usaha Warung Internet (WARNET)
21.	Perwal Kota Jambi No. 53 Tahun 2019	Tata Cara Penerapan Sanksi Administrasi Perda Kota Jambi No. 03 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

SASARAN 3
MENINGKATKAN PELAYANAN KONDISI PRA TANGGAP
DAN PASCA KEBAKARAN SERTA KEBENCANAAN

Sasaran ketiga mengenai meningkatkan pelayanan pada kondisi pra tanggap dan pasca kebakaran serta kebencanaan yang didukung oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi.

Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama untuk sasaran 3 (ketiga) tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2.38.

Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Sasaran ke 3

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGKA AWAL RPJMD	% CAPAIAN 2020	2021			TARGET AKHIR RPJMD
					TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
3.	Meningkatkan pelayanan pada kondisi pra, tanggap dan pasca kebakaran serta kebencanaan	7.	Cakupan pelayanan pemadam kebakaran	100,00 %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
RATA-RATA % CAPAIAN					100,00%		100,00%	

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi 2021. (Data diolah)

IKU ketujuh yaitu cakupan pelayanan pemadam kebakaran dengan target 100,00% terealisasi 100,00 persen atau dengan capaian 100,00

persen masuk dalam kategori **SANGAT TINGGI**, dimana data bersumber dari 5 (lima) indikator penentu, dengan sub indikator dimasing-masing akan dianalisa sebagai berikut:

- 1) Tercapainya Tingkat Waktu Tanggap (*Respon Time Rate*) dan Pelayanan Operasi Pemadam Kebakaran sebesar 100%, artinya seluruh indikator yang menjadi tolak ukur dalam indikator ini sudah mencapai target yang ditetapkan. Ada 2 sub indikator dalam indikator ini, yaitu :
 - a) Tingkat Waktu Tanggap (*Respon Time Rate*) untuk Tahun 2021 targetnya 16 menit dan dari pemadaman kebakaran yang dilakukan selama Tahun 2021 rata-rata di angka 14.4 menit. Ini berarti Tingkat Waktu Tanggap sudah tercapai bahkan melebihi target yang ada.
 - b) Jumlah warga Kota Jambi yang memperoleh layanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan selama Tahun 2021 sebanyak 164 KK, sedangkan target yang ditetapkan sebanyak 85 KK, dengan begitu ketercapaian bagian ini sebesar 100%
- 2) Pelayanan Operasi Pemadam Kebakaran, Pelayanan Operasi Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran/ Operasi Darurat Non Kebakaran/ Operasi Non Kebakaran di Tahun 2021 sebesar 100% sedangkan target ketercapaian sebesar 100%. Berikut rincian sub indikatornya :
 - a) Jumlah Operasi Pemadam Kebakaran selama Tahun 2020 sebanyak 50 Kali sedangkan target operasi pemadaman kebakaran di Tahun 2021 sebanyak 80 kali. Hal ini disebabkan oleh penurunan angka kebakaran di Tahun 2021 yaitu sebanyak 50, ini mengindikasikan bahwa kegiatan preventif yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi telah maksimal sehingga



angka kebakaran di Kota Jambi menurun. Terlayannya seluruh kebakaran yang terjadi di Kota Jambi, sehingga pencapaian di subindikator ini di Tahun 2021 sebesar 100%.

- b) Jumlah Operasi Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran sebanyak 50 kali dari target yang ditetapkan sebanyak 80 kali. Hal ini disebabkan oleh penurunan angka kebakaran di Tahun 2021 yaitu sebanyak 50, ini mengindikasikan bahwa kegiatan preventif yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi telah maksimal sehingga angka kebakaran di Kota Jambi menurun. Terlayannya seluruh kebakaran yang terjadi di Kota Jambi, sehingga pencapaian di subindikator ini di Tahun 2021 sebesar 100%.
- c) Jumlah Operasi Penyelamatan dan Evakuasi (Operasi Darurat Non KebakaranI : Bencana Banjir, Puting Beliung, Tanah Longsor, Orang tenggelam, Orang Masuk Sumur, Bunuh Diri, dsb di tahun 2021 sebanyak 25 kali dari target yang ditetapkan sebanyak 25 kali. Banyaknya operasi penyelamatan dan evakuasi darurat non kebakaran yang melebihi target yang ditetapkan dapat terlayani dengan maksimal oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, dengan begitu ketercapaian subindikator ini sebesar 100%
- d) Jumlah Operasi Penyelamatan dan Evakuasi (Non Kebakaran) : evakuasi sarang tawon, penangkapan ular, penangkapan anjing liar, dsb di tahun 2021 sebanyak 136 kali dari target yang ditetapkan sebanyak 25 kali. Banyaknya operasi penyelamatan dan evakuasi non kebakaran yang melebihi target yang ditetapkan dapat terlayani dengan maksimal oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, dengan begitu ketercapaian subindikator

ini sebesar 100%.

3) Tercapainya Pelayanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi Pasca Kebakaran dan kebencanaan ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi di Tahun 2021 sebesar 100%. Ini didukung oleh beberapa subindikator yaitu :

a) Jumlah Pelayanan Pendataan, Inspeksi dan investigasi pasca kebakaran dan kebencanaan selama Tahun 2021 sebanyak 50 Kali sedangkan target Pelayanan Pendataan, Inspeksi dan investigasi pasca kebakaran dan kebencanaan di Tahun 2021 sebanyak 85 kali. Hal ini disebabkan oleh penurunan angka kebakaran di Tahun 2021 yaitu sebanyak 50 kali, ini mengindikasikan bahwa kegiatan preventif yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi telah maksimal sehingga angka kebakaran di Kota Jambi menurun. Terlayannya seluruh kebakaran yang terjadi di Kota Jambi, sehingga pencapaian di subindikator ini di Tahun 2021 sebesar 100%.

b) Pelayan Jumlah warga Kota Jambi yang menerima dana bantuan korban kebakaran/ bencana lainnya, selama Tahun 2021 sebanyak 50 KK sedangkan target Pelayan Jumlah warga Kota Jambi yang menerima dana bantuan korban kebakaran/ bencana lainnya di Tahun 2021 sebanyak 150 KK. Hal ini disebabkan oleh penurunan angka kebakaran di Tahun 2021 yaitu sebanyak 50 kali, ini mengindikasikan bahwa kegiatan preventif yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi telah maksimal sehingga angka kebakaran di Kota Jambi menurun. Terlayannya seluruh kebakaran yang terjadi di Kota Jambi, sehingga pencapaian di subindikator ini di Tahun 2021 sebesar 100%.



- 4) Tercapainya Standarisasi Sarana dan Prasarana Kebakaran Dan Kebencanaan ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi di Tahun 2021 sebesar 100%. Ini didukung oleh beberapa subindikator yaitu :
- a) Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Pemadam Kebakaran Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran 3.000-5.000 liter di Tahun 2021 ditargetkan sebanyak 1 unit mobil pemadam kebakaran. Dengan adanya rekomendasi dari DPRD Kota Jambi maka ada penambahan anggaran untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi sehingga pengadaan mobil pemadam kebakaran di Tahun 2021 sebanyak 3 unit. Jadi ketercapaian di sub indikator ini sebesar 100%.
 - b) Jumlah Standarisasi Sarana dan Sarana Kebakaran dan Kebencanaan di Tahun 2021 sebanyak 1 kali sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan begitu ketercapaian subindikator ini terealisasi sebesar 100%.
 - c) Jumlah Kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Peralatan dan Kendaraan Fire Truk di Tahun 2021 sebanyak 12 kali sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan begitu ketercapaian subindikator ini terealisasi sebesar 100%.
 - d) Jumlah Kegiatan Pendistribusian/ Pergudangan di Tahun 2021 sebanyak 12 Laporan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan begitu ketercapaian subindikator ini terealisasi 100%.
 - e) Jumlah Kegiatan Pengendalian Sarana/ Prasarana di Tahun 2021 sebanyak 12 Laporan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan begitu ketercapaian subindikator ini terealisasi 100%.
- 5) Tercapainya Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Prakebakaran dan Prakebencanaan di Tahun 2021 sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%, ada beberapa subindikator yang tidak



mencapai target, yang akan dijelaskan sebagai berikut :

- a) Jumlah Pelayanan Pemeriksaan APK dan Sarana Proteksi Kebakaran di Tahun 2021 sebanyak 500 gedung atau bangunan, tetapi terealisasi sebanyak 1.754 kali pemeriksaan gedung dan bangunan lainnya. Hal ini disebabkan oleh pandemic COVID-19 sehingga menghambat berjalannya pemeriksaan ini. Ketercapaian dan subindikator ini sebesar 100%
- b) Jumlah Wilayah Kota Jambi yang memperoleh pelayanan informasi rawan kebakaran dan kebencanaan di Tahun 2021 sebanyak 20 Lokasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan begitu ketercapaian subindikator ini terealisasi sebesar 100%.
- c) Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dan Pembentukan Relawan kebakaran di masyarakat, dunia usaha dan dunia pendidikan terlaksana di Tahun 2021 yang targetkan ada 12 Relawan, dan terealisasi sebanyak 197 relawan. Sehingga realisasi di subindikator ini sebesar 100%.
- d) Jumlah kegiatan Pendidikan Pelatihan Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi dengan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan ditahun 2021 terealisasi sebanyak 30 orang sedangkan ditetapkan sebanyak 30 orang. Sehingga realisasi di subindikator ini sebesar 100%.

Analisis Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan Pencapaian Standard Pelayanan Minimal (SPM) baik eksternal maupun internal serta Solusi penanganannya sebagai berikut :

1. Untuk Indikator Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran dalam Standard Pelayanan Minimal (SPM) di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan belum berjalan optimal, hal ini dapat terlihat dengan belum tercapainya target yang telah ditetapkan. Ketidak optimalan ini



- dapat terjadi karena tidak meratanya Pos Pelayanan Kebakaran, hal ini dapat diminimalisir dengan cara pembangunan Pos Pelayanan Kebakaran disetiap Kecamatan Kota Jambi.
2. Indikator SPM yang kedua yaitu Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) sudah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 17 menit. Untuk mencapai target Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) tahun 2023 yaitu 15 menit, untuk itu diperlukan pembangunan Posyankar disetiap kecamatan dan kendaraan operasional dalam kondisi prima.
 3. Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar merupakan penunjang utama dalam kelancaran operasionalisasi di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, dalam hal ini Indikator ini belum mencapai target yang ditentukan karena belum meratanya pengetahuan dan kompetensi Aparatur Pemadam Kebakaran. Langkah yang harus dilakukan yaitu dengan memaksimalkan atau bahkan menambah Bimbingan Teknis dan Diklat Pemadam, serta dengan mengirim lebih banyak pasukan untuk peningkatan kompetensi dengan cara mengikuti Diklat Kejuruan yang diselenggarakan oleh Kemendagri atau Pemadam Provinsi DKI Jakarta.
 4. Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran diatas 3000-5000 Liter, tahun 2020 penambahan mobil Pemadam Kebakaran sebanyak 3 unit, ini merupakan akumulasi dari pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran di Tahun sebelumnya.

SASARAN 4
MENINGKATKAN PEMAHAMAN TENTANG ARTI
PENTINGNYA IDEOLOGI PANCASILA KEBHINEKAAN
DALAM KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT

Sasaran Keempat yaitu meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya ideologi pancasila dan kebhinekaan dalam kehidupan sosial masyarakat yang didukung oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi.

Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama untuk sasaran 4 (keempat) tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.39.
Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Sasaran ke 4

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGKA AWAL RPJMD	% CAPAIAN 2020	2021			TARGET AKHIR RPJMD
					TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
4.	Meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya ideologi pancasila dan kebhinekaan dalam kehidupan sosial masyarakat	8 Persenta sepembinaan terhadap masyarakat terkait ideologi pancasila	20,00%	100,00%	20,00%	20,00%	100,00%	100,00%
RATA-RATA % CAPAIAN				100,00%			100,00%	

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi 2021. (Data diolah)

Dapat dijelaskan bahwa IKU kedelapan yaitu persentase pembinaan terhadap masyarakat terkait ideologi pancasila dengan target 20,00 persen terealisasi 20,00 persen atau dengan capaian 100,00 persen masuk dalam kategori **SANGAT TINGGI**, dimana formula penghitungan jumlah forum kemasyarakatan yang akan menjadi sasaran dilakukan pembinaan sebanyak 46 Forum dibagi dengan jumlah Forum Kemasyarakatan yang terdaftar sebanyak 230 Forum terdiri dari Orkesmas, Parpol, FKUB, FKDM dan FPK sehingga tercapai 20,00% sesuai target. Pembinaan yang dilakukan terhadap 230 forum kemasyarakatan berupa:

1. Pembinaan Pembauran Kebangsaan

Menitikberatkan pada pembinaan tentang bagaimana memberikan pemahaman tentang kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk (plural) yang terdiri dari banyak suku/etnis, agama dan ras, sehingga dengan kemajemukan tersebut justru menjadi semangat untuk tetap



menyatukan diri dalam bingkai NKRI dan berpegang teguh pada semboyan "Bhinneka Tunggal Ika".

2. Pembinaan Wawasan Kebangsaan

Menitikberatkan pada pembinaan terhadap seseorang atau kelompok masyarakat dalam memaknai keberadaan jatidirinya dan bertingkah laku sesuai falsafah hidup bangsanya, sehingga akan tumbuh rasa persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, UUD Negara RI Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pembinaan Ideologi Pancasila

Menitikberatkan pada pembinaan Ideologi Pancasila sebagai dasar Negara dan harus diimplementasikan oleh seluruh masyarakat secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga Pancasila dapat menjiwai dan menyemangati setiap perilaku rakyat Indonesia dalam segala bidang kehidupan dan tidak mudah tergiur oleh rayuan ideologi lain yang nampak menjanjikan namun kenyataannya justru melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

4. Silaturahmi Kebangsaan

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2021 di Mako Damkar Kota Jambi yang diikuti oleh 150 orang peserta.

5. Fasilitasi Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Tim Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

Peran penting dari Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Tim Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat ini adalah : sebagai Deteksi Dini terhadap gejala yang dapat menimbulkan keresahan dan gangguan kamtibmas di masyarakat. Tim Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) ini diketuai oleh Bapak Walikota Jambi dengan timnya terdiri



dari Kaban Kesbangpol Kota Jambi, Staff Ahli Bidang Pembangunan, Asisten Pemerintahan Sekda Kota Jambi, Kabid Politik dan Kewaspadaan Daerah Badan Kesbangpol Kota Jambi, Kasat Bimas Polresta Jambi, Anggota BIN Daerah Jambi, Kasubbid Kewaspadaan Daerah Badan Kesbangpol Kota Jambi, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan Tokoh Masyarakat. Setiap anggota tim melakukan pemantauan terhadap situasi dan kondisi di wilayahnya khususnya dan Kota Jambi pada umumnya akan adanya gejala gejala atau keadaan yang dapat menimbulkan keresahan dan gangguan kamtibmas di tengah tengah masyarakat. Selanjutnya disampaikan pada kegiatan Rapat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.

Selama tahun 2021 beberapa potensi konflik yang muncul antara lain: masalah pembangunan rumah ibadah dan adanya aliran keagamaan yang menyimpang, masalah banjir di jalan dan lingkungan pemukiman penduduk, masalah pedagang kaki lima , masalah pinjaman online, masalah *crypto currency* (mata uang virtual), masalah minuman keras dan masalah investasi bodong.

6. Fasilitasi Tim Penanganan Konflik Sosial

Tim Penanganan Konflik Sosial ini adalah sebagai upaya untuk pencegahan dan deteksi dini terhadap konflik sosial di daerah dalam rangka pemetaan terhadap potensi konflik sosial yang ada di daerah. Tim PKS terdiri dari Kepala SKPD se Kota. Ruang lingkup Penanganan Konflik Sosial meliputi : Pencegahan Konflik, Penghentian Konflik, dan Pemulihan Pasca Konflik. Rapat Penanganan Konflik Sosial.

7. Fasilitasi Tim Pemantauan Orang Asing Dalam Wilayah Kota Jambi

Keberadaan Tim ini memegang peranan penting dalam upaya mengantisipasi berbagai dampak yang akan timbul sebagai akibat

pesatnya arus globalisasi dan hegemoni politik internasional yang berdampak pada perilaku masyarakat Indonesia khususnya Kota Jambi. Tim POA terdiri dari : Imigrasi, BAIS TNI, BINDA, KeMenag, Intel Polresta, Disdukcapil, Diknas, Disperindag, dan Badan Kesbangpol Kota Jambi.

8. Fasilitasi Forum Kerukunan Ummat Beragama (FKUB)

Tim Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Ummat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Ummat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah.

9. Fasilitasi Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) Kota Jambi.

Tim ini dibentuk berdasarkan SK Walikota Jambi Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kota Jambi Tahun 2020.

10. Fasilitasi Tim Fasilitasi Peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat Dalam Pelestarian Dan Pengembangan serta Komunikasi Pegiat Seni di Kota Jambi.

11. Fasilitasi Tim Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

SASARAN 5
MENINGKATKAN PERAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN DAN PARPOL DALAM
PEMBANGUNAN

Sasaran Kelima yaitu meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan dan parpol dalam pembangunan yang didukung oleh Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kota Jambi.

Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama untuk sasaran 5 (kelima) tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2.40.

Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Sasaran ke 5

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGKA AWAL RPJMD	% CAPAIAN 2020	2021			TARGET AKHIR RPJMD
					TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
5.	Meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan dan Parpol dalam pembangunan	9 Persentase orkesmas dan Parpol yang berperan aktif di masyarakat	20,00%	100,00%	20,00%	21,74%	108,7%	100,00%
RATA-RATA % CAPAIAN				100,00%			108,7%	

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi 2021. (Data diolah)

Selanjutnya IKU kesembilan yaitu persentase orkesmas dan parpol yang berperan aktif dimasyarakat dengan target 20,00 persen terealisasi 21,74 persen atau dengan capaian 108,7 persen masuk dalam kategori **SANGAT TINGGI**, dimana jumlah orkesmas dan parpol yang aktif sebanyak 50 dibagi dengan jumlah orkesmas dan parpol yang terdaftar di database Badan Kesbangpol Kota Jambi sebanyak 232 Orkesmas sehingga tercapai 21,74 persen melebihi target yang ditetapkan.

Adapun upaya yang dilakukan terhadap orkemas dan parpol sehingga berperan aktif dalam pembangunan yaitu melalui :

1. Pembinaan dan Pemantauan Orkemas

Dalam rangka Pembinaan dan Pemantauan Orkemas dibentuk Tim Ketahanan Kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yang telah dirubah dengan PerPu No. 2 tahun 2017.
- b. Peraturan Pemerintah RI No. 58 tahun 2016
- c. Peraturan Pemerintah RI No. 59 tahun 2016 tentang Ormas WNA
- d. Peraturan Pemerintah RI No. 18 tahun 2017 pemberian bantuan dan pencegahan tindakan pidana pendanaan teroris.



- e. Permendagri RI No. 56 tahun 2017 tentang Pengawasan Ormas
- f. Permendagri RI No. 59 tahun 2017 tentang Sistem Informasi Pendaftaran Ormas
- g. Permendagri RI No. 58 tahun 2017 tentang Kerja Sama dalam Negeri dan Kesbangpol dan Pemerintahan Umum.

Badan Kesbangpol Kota Jambi menetapkan lima kriteria Organisasi Kemasyarakatan yang aktif, adapun kriteria tersebut sebagai wujud dalam mendukung program-program pemerintah. Kriteria Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang aktif, adalah sebagai berikut:

1. Memiliki Sekretariat Organisasi Kemasyarakatan;
2. Tersedianya Struktur Organisasi dan AD/ART;
3. Melaksanakan rapat rutin
4. Mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Jambi;
5. Melaksanakan kegiatan di masyarakat

Sebagai contoh dari peran aktif yang telah dilakukan oleh Ormas dan Parpol pada tahun 2021 yaitu Komunitas Muslimah Kreatif (KMK) Kota Jambi dengan kegiatannya yaitu melakukan kegiatan sosial dengan nama kegiatannya yaitu Jumat Berkah dengan membagi-bagikan nasi bungkus ke pesantren, panti-panti, pedagang kaki lima dan warga masyarakat sekitar sekretariat yang kurang mampu, pemberian sembako kepada warga yang kurang mampu dan memberikan pelatihan menjahit secara gratis bagi warga yang kurang mampu.

Berikut disajikan Data Ormas yang dibina dan Data Ormas yang aktif Pada tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.2.41.
Data Ormas yang aktif pada tahun 2021

No	Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang dilakukan pembinaan	Keterangan
1	2	3
1	Pemuda Batak Bersatu	8 s/d 10 Maret 2021
2	Laskar Merah Putih Peruangan	
3	Pejuang Siliwangi	
4	Pemuda Pancasila	
5	Pemuda Katolik	
6	Legiun Veteran RI	
7	Garda Bela Negara	
8	Himpunan Keluarga Tani Indonesia	
9	Kemunitas Pecinta Tekukuk Jambi	
10	Yayasan Sahabat Jambi	
11	Persatuan Umat Budha Jambi	
12	Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia	
13	Komunitas Muslimah Kreatif	
14	Forum Komunikasi Ormas Kota Jambi	
15	Forum Jambi Rembug	
16	Praktisi Pendingin dan Tata Udara Indonesia Kota Jambi	
17	Peduli Lingkungan Jambi	
18	Solidaritas Pemerhati Pembangunan Jambi	
19	Ikatan Pemuda Karya	18 Mei 2021
20	Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia	30 Juni 2021
21	Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia	5 s/d 7 Oktober 2021
22	PARMUSI	
23	Himpunan Keluarga 4 Lawang	
24	Alisa Khadijah	
25	IWAPI	
26	Forum Peduli Remaja Jambi	
27	P Nekad	
28	Badan Komunikasi Majelis Taklim	
29	Gema Plus	
30	Cinema Talent Jambi	
31	Kumfu Kepalan Tangan Bangsawan	



No	Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang dilakukan pembinaan	Keterangan
1	2	3
32	Perempuan Demokrat RI	
33	FKPPNS	
34	OPSI	
35	Bintang Timur Indonesia	
36	Yayasan Penyuluhan Kesehatan Indonesia	
37	Pemuda Pemudi Cinta Jambi	
38	PENJARA	
39	Ikatan Perempuan Mandiri	2 s/d 4 November 2021
40	Bundo Kanduang	
41	Pejuang Siliwangi	
42	Jaringan Pendamping Kebijakan dan Pembangunan	
43	Persaudaraan Setia Hati Terate	
44	Sentra Komunikasi Mitra Polri	
45	Radio Antar Penduduk Indonesia	
46	Yayasan Mulia Dharma Sentosa	
47	Komunitas Ular Jambi	
48	Serikat Pekerja Transport Indonesia	
49	Forum Penggerak Pemantau Pembangunan Jambi	
50	Fatayat NU	
51	Ikatan Persaudaraan Alumni Zuhijjah	
52	Persatuan Wanita Republik Indonesia	
53	Perkumpulan Sadar Jambi	
54	Macam Warna Gaya Jambi	
55	Komunitas Jambi Cerdas	
56	Sido Bangun Lestari	
57	Perempuan Wirausaha Indonesia	
58	Ikatan Pengacara Wanita Jambi	
59	Lembaga Bantuan Hukum	
60	Koalisi Perempuan Indonesia	
61	GM Rebidsi	
62	Lembaga Anti Narkotika	
63	Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia	
64	Syarikat Islam Indonesia	
65	Jambi Oldies Community	



No	Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang dilakukan pembinaan	Keterangan
1	2	3
66	Usaha Terpadu	8 s/d 11 November 2021
67	Sumber Makmur 2	
68	Mayang Lestari	
69	Perintis	
70	Makmur Jaya	
71	Perintis Utama	
72	Tunas Jaya	
73	Tirta Nila	
74	KWT Bunga Raya	
75	Bina Benur Muda	
76	Vinta Lestari	
77	Sido Rukun	
78	Kerupuk Ikan Ais	
79	Tangkap Ikan	
80	Galusa	
81	Fokus Usaha	
82	Nusa Indah	
83	Melati	
84	Margadadi 2	
85	Hidayah	
86	Cahaya Putri	
87	Temam Abadi	
88	Serasi	
89	Indikator Lebah Madu Indonesia	
90	Danau Indah	
91	Jajaran Makmur 1	
92	Jajaran Makmur 2	
93	Jayo Besamo	
94	Harapan Tani	
95	Tanjung Terap	
96	Tunas Harapan	
97	Sadar	
98	Sepakat Jaya	
99	Harapan Sepakat	

Rekapitulasi Data Ormas yang terdaftar, dibina dan aktif tahun 2019



– 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.42.

Data Ormas yang terdaftar, dibina dan aktif tahun 2019 - 2021

No	Tahun	Jumlah Ormas dan Parpol terdaftar	Jumlah Ormas yang dibina	Jumlah Ormas yang aktif
1	2019	230	46	50
2	2020	230	46	100
3	2021	230	99	50

Sumber : Sub Bagian Ketahanan Masyarakat dan Ekonomi

Dalam rangka meningkatkan peran Partai Politik dan meningkatkan motivasi masyarakat dalam Pemilu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi melaksanakan program dan kegiatan yaitu :

1. Fasilitasi Parpol melalui Pendidikan Politik dengan melakukan Sosialisasi tentang Undang Undang Pemilu. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan pengetahuan dan proses pendidikan politik dan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Umum sehingga Indeks Demokrasi Indonesia di Kota Jambi meningkat, adapun peserta Sosialisasi tersebut adalah melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita yang belum mengerti arti pentingnya Pemilu dalam Demokrasi di Indonesia.
2. Fasilitasi Tim Pemantau Situasi Politik Kota Jambintuk mengevaluasi perkembangan politik di daerah, sehingga diperoleh data dan informasi sebagai bahan evaluasi dalam tata kelola pelaporan secara teknis dan non teknis, dalam menyikapi isu-isu politik yang berkembang di tengah masyarakat, kegiatan tersebut berupa pemantauan ke Kecamatan, Partai Politik dan pemantauan ke tempat tempat yang mengganggu berpotensi mengganggu stabilitas politik di daerah, selanjutnya rapat Tim Pemantau Situasi Politik Kota Jambi bertujuan sebagai upaya untuk pencegahan situasi kondisi yang kurang kondusif sebelum dan

setelah dilaksanakan proses Pemilihan Umum ataupun kondisi politik lainnya di Kota Jambi.

3. Fasilitasi Parpol untuk Bantuan Keuangan bagi Parpol dengan pembentukan tim verifikasi bantuan keuangan Parpol serta melakukan pembinaan untuk tertib administrasi bantuan keuangan Parpol. Kegiatan ini sebagai penunjang kegiatan partai politik dalam meningkatkan pemahaman kader partai politik dan pendidikan politik.
4. Fasilitasi Parpol dengan melakukan Bimbingan Tehnis tentang Bantuan Keuangan Bagi Parpol sebagai upaya untuk meminimalisir adanya kesalahan-kesalahan dalam membuat laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai nantinya, kegiatan ini melibatkan partai politik yang mendapatkan bantuan keuangan Parpol tahun sebelumnya yang berjumlah 13 Parpol yaitu : Partai PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Hanura, Partai Golkar, Partai PKS, Partai PAN, Partai PPP, Partai PBB, Partai PKB, Partai Berkarya, Partai Demokrat

Pada tahun 2021 terdapat 13 Partai Politik yang menerima bantuan keuangan Parpol yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.2.43.
13 Partai Politik yang menerima bantuan keuangan Parpol

No	Nama Partai Politik	Jumlah Dana Bantuan Keuangan bagi Parpol	Keterangan
1	2	3	4
1	Partai Nasdem	130.297.362,00	
2	Partai PKB	50.310.312,00	
3	Partai PKS	129.116.286,00	
4	Partai PDIP	160.234.113,00	
5	Partai Golkar	150.075.978,00	
6	Partai Gerindra	203.074.560,00	
7	Partai Demokrat	154.293.477,00	



No	Nama Partai Politik	Jumlah Dana Bantuan Keuangan bagi Parpol	Keterangan
1	2	3	4
8	Partai PAN	112.413.756,00	
9	Partai PPP	64.937.145,00	
10	Partai Hanura	64.796.121,00	
11	Partai PBB	50.310.312,00	
12	Partai Perindo	45.828.393,00	
13	Partai Berkarya	42.011.931,00	Tahun 2021 dana bantuan Parpol tidak dicairkan karena dualisme kepengurusan Partai (sengketa internal)

**SASARAN 6
MENINGKATKAN LAYANAN INFRASTRUKTUR DAN
UTILITAS PERKOTAAN**

Percepatan Peningkatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur dalam periode kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Jambi tahun 2018 – 2023 merupakan prioritas pembangunan yang pertama.

Ketersediaan infrastruktur dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya sehingga meningkatkan produktifitas dan efisiensi.

Infrastruktur sebagai sistem yang dikaitkan dengan unsur yang berada di dalam suatu sistem ruang dan kegiatan, memiliki peran penting terhadap perubahan kemakmuran wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Peran infrastruktur terhadap perkembangan wilayah dan kota memiliki kontribusi yang sangat signifikan, baik pada aspek perekonomian, sosial-kemasyarakatan, maupun kelestarian lingkungan. Akan tetapi arah kebijakan pembangunan sistem infrastruktur yang berlangsung saat ini

belum menunjukkan hasil yang memadai untuk memerankan fungsinya sebagai pengarah dan pendorong pembangunan. Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama untuk sasaran 6 (keenam) tahun 2021 dapat dilihat pada tabel. 3.2.44 berikut.

Tabel 3.2.44.
Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Sasaran ke 6

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGKA AWAL RPJMD	% CAPAIAN 2020	2021			TARGET AKHIR RPJMD
					TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
6.	Meningkatkan layanan infrastruktur dan utilitas perkotaan	10. Cakupan layanan infrastruktur dan utilitas	50,59%	107,88%	56,38%	74,76%	132,60%	70,99%
RATA-RATA % CAPAIAN				107,88%			132,60%	

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi 2021. (Data diolah)

Untuk mencapai sasaran meningkatkan layanan infrastruktur dan utilitas perkotaan ditetapkan 1 (satu) IKU yaitu cakupan pelayanan infrastruktur dan utilitas. Dalam pelaksanaannya IKU ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi, Dinas Perhubungan dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Target IKU cakupan layanan infrastruktur dan utilitas tahun 2021 adalah sebesar 56,38 persen, sampai dengan akhir tahun telah dapat dicapai realisasi sebesar 74,76 persen dengan persentase capaian sebesar 132,60 persen, kategori **SANGAT TINGGI**.

Demikian juga halnya dengan Pemerintah Kota Jambi, untuk mengatasi permasalahan infrastruktur yang ada di Kota Jambi, selama periode tahun 2018 – 2023 melaksanakan beberapa program yaitu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan air bersih, air limbah dan bangunan, meningkatkan jaringan jalan dan jembatan yang berkondisi baik, menurunkan jumlah titik genangan perkotaan, meningkatkan sinergitas pembangunan infrastruktur dan meningkatkan harmonisasi dan konsistensi tata ruang.

Secara garis besar selama periode tahun 2021 Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Kota Jambi dengan sasaran meningkatkan cakupan layanan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan berkelanjutan dengan indikator kinerja berupa:

1. Rasio jalan status kota dalam kondisi baik

Target rasio jalan status kota dalam kondisi baik sebesar 94.53% atau sepanjang 482.522 km dari total panjang jalan Kota Jambi 510.452 km pada tahun 2021 baru mencapai 88.73% atau sepanjang 452.915 km. Kegiatan yang dilakukan hanya pemeliharaan dan perbaikan jalan, tidak ada penambahan jalan. Kendala yang dihadapi sampai saat ini masih sama yaitu terbatasnya alokasi dana anggaran kegiatan pembangunan infrastruktur khususnya perbaikan jalan.

$$\begin{aligned} & \frac{(\text{Panjang jalan kota dalam kondisi baik (km)})}{(\text{Panjang seluruh jalan kota (km)})} \times 100\% \\ &= \frac{452.915}{510.452} \times 100\% \\ &= 88,73\% \end{aligned}$$

Analisis Kinerja

Jalan adalah aset yang harus dikelola dan difungsikan secara optimal. Pada kenyatannya, jaringan jalan cenderung mengalami penurunan kondisi yang diindikasikan dengan terjadinya kerusakan pada jalan. Maka untuk memperlambat laju penurunan kondisi dan mempertahankan kondisi jalan pada tingkat yang layak, perlu dilakukan program pemeliharaan dengan baik agar jalan tersebut dapat berfungsi sesuai dengan yang direncanakan.

Program pemeliharaan jalan harus terus dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan banyaknya kendala dan permasalahan, seperti keterbatasan dana menjadi kendala untuk pemeliharaan jaringan jalan, menyebabkan belum bisa terpenuhinya seluruh kebutuhan pemeliharaan rutin jaringan jalan. Dengan mempertimbangkan hal tersebut maka perlu penentuan urutan yang dapat digunakan sebagai suatu acuan dalam

penyusunan program pemeliharaan jaringan jalan. Penentuan urutan prioritas pemeliharaan jaringan jalan tersebut harus melihat dari berbagai kriteria sehingga menghasilkan hasil yang akurat dan tepat.

Solusi

Meningkatkan frekuensi pemeliharaan dengan interval penanganan setiap satu tahun melalui kegiatan pemeliharaan rutin jalan yang di rencanakan secara rutin dan yang tidak direncanakan tergantung pada kejadian kerusakan. Jenis kegiatan dalam pekerjaan ini antara lain dapat berupa penambahan lapis permukaan, pemotongan rumput dan pembersihan drainase jalan dengan melibatkan peran serta masyarakat agar kondisi jalan terjaga secara kualitas maupun kemantapannya.

2. Rasio Cakupan Pelayanan Air Minum

Target rasio cakupan pelayanan air minum di Kota Jambi sebesar 71.39 persen dengan 80843 SR dari total potensi SR yang ada di Kota Jambi. Dapat direalisasikan pada tahun 2021 sebesar 73.46%. Jumlah SR air minum yang terlayani tahun 2021 = 89066 SR. Jumlah penduduk di Kota Jambi = 606200 (Data dari BP). 1 KK = 5 orang.

$$\begin{aligned} & \frac{(\text{jumlah pelanggan} \times (5 \text{ jiwa per kk}))}{(\text{jumlah penduduk})} \times 100\% \\ &= \frac{(89066 * 5)}{(606200)} \times 100\% \\ &= 73.46\% \end{aligned}$$

Analisis Peningkatan Kinerja

Walaupun akses air minum sudah meningkat, masih terdapat kesenjangan antar wilayah dan status sosial ekonomi. Secara kuantitas masih banyak rumah tangga yang belum mencapai akses minimal tetapi banyak pula rumah tangga yang menggunakan air secara berlebihan. Kualitas air minum masih banyak yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan. Ada alasan rumah tangga memilih untuk tidak mengolah air



minum dengan memilih sumber air yang dianggap aman seperti air minum kemasan dan isi ulang. Kecenderungan ini meningkat sejalan dengan tingginya status sosial ekonomi.

Hal ini mengindikasikan adanya kendala dalam peningkatan cakupan sumber air minum yang improved terutama air PDAM. Kecenderungan ini bisa berdampak negatif terhadap upaya peningkatan air minum perpipaan (PDAM). Padahal kualitas air minum kemasan dan isi ulang juga masih banyak yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan. Kualitas air minum masih belum memadai dan diperberat oleh tingginya sanitasi unimproved termasuk open defecation sebagai sumber pencemaran. Masih tingginya proporsi sanitasi yang buruk menghambat peningkatan kualitas air minum sehingga penularan penyakit melalui air (diare) masih cukup tinggi. Rumah tangga yang menggunakan air minum unimproved cenderung menggunakan sarana sanitasi yang unimproved. Pengawasan kualitas air minum yang telah berjalan belum sepenuhnya.

Solusi

Kendala dalam upaya pencapaian indikator kinerja dan Pemecahan masalahnya:

1. Peningkatan alokasi dana untuk penyediaan air bersih/minum setara dengan jumlah pertambahan penduduk yang belum terlayani sampai tahun 2021.
2. Besarnya pendanaan untuk pencapaian 100% pelayanan air bersih/minum mendorong pemerintah daerah untuk memprioritaskan program dan anggaran untuk pembangunan layanan infrastruktur dasar tersebut.
3. Sulitnya pengolahan sumber air baku yang korosif membutuhkan teknologi yang dapat memisahkan logam tersebut dengan air.

3. Rasio Cakupan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Target Rasio Cakupan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah tahun 2021 sebesar 3.56% dari total potensi SR yang ada di Kota Jambi. Dapat direalisasikan pada tahun 2021 sebesar 3.15 % dengan Jumlah SR Air Limbah yang terlayani tahun 2021 = 5967 SR. Jumlah Kepala Keluarga= 189617. Kendala yang dihadapi sampai saat ini diperlukan *monitoring* dan evaluasi perawatan dan pemeliharaan pasca konstruksi.

$$\frac{(Total\ jumlah\ rumah\ tangga\ yang\ terlayani\ akses\ fasilitas\ sanitasi\ aman)}{(Jumlah\ rumah\ tangga\ keseluruhan)} \times 100\% \dots$$

$$= \frac{5967}{189617} \times 100\% \dots$$

$$= 3.15\%$$

Tabel 3.2.45.

Kondisi layanan sanitasi Dinas PUPR Tahun 2018-2021

No	INDIKATOR	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
	Rasio Cakupan Pelayanan Air Limbah (%)	0.39	1.15	1.30	3.15
	Jumlah rumah yang bersanitasi (SR)	453	1,344	1,520	5967
1	Pembangunan IPAL Komunal (SR)	461	600	50	
2	Pembangunan tangki septik komunal (SR)				
3	Pembangunan IPAL Komunal Kombinasi MCK (SR)				
4	Pembangunan tangki septik Individual (SR)	475	744	1,120	510
	Pembangunan MCK ++ IPAL per Unit				

Sumber: Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Jambi, 2021

Tabel 3.2.46.

Laporan Data SPALD Tahun 2021

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Unit	SR	SPALD - S	SPALD - T
1	Pembangunan Tangki Septik Individual	<u>Kecamatan Alam Barajo</u>				





















No	Program/Kegiatan	Lokasi	Unit	SR	SPALD - S	SPALD - T
	(Dana Alokasi Khusus)	Kelurahan Bagan Pete	50	50	50	
		<u>Kecamatan Jambi Selatan</u>				
		Kelurahan Wijayapura	50	50	50	
		<u>Kecamatan Jelutung</u>				
		Kelurahan Lebak Bandung	50	50	50	
		<u>Kecamatan Danau Teluk</u>				
		Kelurahan Olak Kemang	50	50	50	
		<u>Kecamatan Pelayangan</u>				
		Kelurahan Mudung Laut	50	50	50	
		Kelurahan Tahtul Yaman	50	50	50	
		Sub Jumlah	300	300		
2	Pembangunan Tangki Septik Individual	<u>Kecamatan Jelutung</u>				
	(Dana Hibah APBN)	Kelurahan Handil Jaya	6	6	6	
		Kelurahan Kebun Handil	2	2	2	
		Kelurahan Payo Lebar	31	31	31	
		<u>Kecamatan Paal Merah</u>				
		Kelurahan Paal Merah	69	69	69	
		Kelurahan Selincah	40	40	40	
		<u>Kecamatan Kota Baru</u>				
		Kelurahan Kenali Asam Bawah	17	17	17	
		<u>Kecamatan Jambi Selatan</u>				

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Unit	SR	SPALD - S	SPALD - T
		Tambak Sari	24	24	24	
		Kelurahan Pakuan Baru	21	21	21	
		Sub Jumlah	210	210		
		JUMLAH	510	510	510	

Sumber: Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Jambi, 2021

Tabel 3.2.47.

Dokumentasi Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

No	Nama Pekerjaan	Dokumentasi		
1.	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan di. Kel. Tahtul Yaman (50 Unit)			
2.	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Pasar Induk Grosir Paal X (1 Paket)			
3.	Pembangunan Tangki Septik Hibah Air Limbah Setempat (1 Paket)			
4.	Pembangunan Jaringan perpipaan IPAL Kelurahan Rawasari (1 Paket)			
5.	Penyedotan Rumah Tangga (1 Kali)			
6.	Penyedotan restoran shisimaru (1 Kali)			

No	Nama Pekerjaan	Dokumentasi		
7.	Penyedotan WTE Talang Banjar (1 Kali)			
8.	Pemeliharaan Kolam			
9.	Pemeliharaan Kolam			
10.	Pemeliharaan Kolam			

Sumber: Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Jambi, 2021

Analisis Kinerja

Perlu adanya kajian cepat agar dapat segera memetakan kondisi sanitasi air limbah di kabupaten/kota masing-masing untuk kemudian dapat menetapkan beberapa kebijakan yang sesuai untuk dapat memberi kemudahan bagi kabupaten/kota untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Kendala lain yang dihadapi sampai saat ini dikarenakan *refocusing*/rasionalisasi pendanaan anggaran dari pemerintah pusat. Sehingga target tahun 2021 pencapaiannya tidak tercapai 100 %;

Solusi

Kendala dalam upaya pencapaian indikator kinerja dan Pemecahan masalahnya Keberhasilan penanganan sanitasi adalah yang memenuhi kaidah teknis yang dipersyaratkan;

Meningkatnya permintaan masyarakat akan layanan pengelolaan



sampah dan air limbah yang layak dengan berbagai upaya memberi kemudahan bagi masyarakat.

Belum terintegrasinya perencanaan antar sektor seperti Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) dengan rencana pembangunan daerah dan rencana tata ruang sehingga memerlukan pelaksanaan perencanaan yang maksimal.

Keberjalanannya fasilitas atau infrastruktur sanitasi dapat terjaga dengan partisipasi masyarakat mulai dari perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengelolaan.

Pembiayaan untuk penyediaan fasilitas sanitasi layak perlu ditingkatkan melalui evaluasi atas alokasi secara spesifik agar data lebih akurat.

Selain pembangunan fisik, pemberian edukasi dan advokas (mengeluarkan kebijakan agar masyarakat mau melakukan kewajibannya untuk tidak mencemari lingkungan baik disektor air limbah maupun persampahan kepada masyarakat akan pentingnya sanitasi baik pembangunan dan pemeliharaan.

Dalam penanggulangan masalah persampahan upaya yang dilakukan pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait adalah membangun kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan sampah secara mandiri melalui Aksi bank sampah /TPS3R yang telah ada, diharapkan sampah yang masuk ke TPA merupakan residu yang tidak dapat dimanfaatkan lagi.

4. Rasio Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik

Target Rasio Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik di Kota Jambi sebesar 61.46 %. Dapat direalisasikan pada tahun 2021 sebesar 71.28% dari total Jumlah bangunan gedung pemerintah dalam Kondisi Baik pada tahun 2021 adalah 273 unit. Total jumlah gedung di Kota

Jambi sebanyak 383 unit;

$$\frac{(Total\ Bangun\ Pemerintah\ dalam\ Kondisi\ Baik)}{(Total\ Bangunan\ Pemerintah\ Kota\ Jambi)} \times 100\%$$

$$= \frac{273}{383} \times 100\%$$

$$= 71.28\%$$

Tabel 3.2.48.

Jumlah bangunan dalam kondisi baik Dinas PUPR Kota Jambi

No	INDIKATOR	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Rasio Bangunan dalam kondisi baik (%)	37.20	58.22	69.54	71.28
2	Jumlah bangunan dalam kondisi baik (Unit)	138	216	258	273

Sumber: Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Jambi, 2021

5. Rasio Bangunan dan Lingkungan dalam Kondisi Baik


Target Rasio Bangunan dan Lingkungan dalam Kondisi Baik sebesar 17.52% dari Total Penataan Bangunan dan Lingkungan dalam Kota Jambi 175998.5 M² dan terealisasi 33.80% atau sepanjang 59487.87 M²

$$\frac{(Total\ Penataan\ Bangunan\ dan\ Lingkungan\ dalam\ Kondisi)}{(Total\ Penataan\ Bangunan\ dan\ Lingkungan\ dalam\ Kota\ Jambi)} \times 100\%$$

$$= \frac{59487.87}{175998.5} \times 100\% = 33.80\%$$

Tabel 3.2.49.

Dokumentasi Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya

No	Nama Pekerjaan	Dokumentasi
1.	Penataan Trotoar/Pedestrian Dalam Kota (5.600 M1)	

<p>2. Pedestrian Jln. Sumantri Brojonegoro (Lanjutan) (800 M1)</p>			
<p>3. Pedestrian Jln. Hm. Thamrin - Jln. Hp. Kusuma (Depan Terminal Rawasari)(Lanjutan) (822 M1)</p>			
<p>4. Rehabilitasi Pedestrian Jln. Basuki Rahmat Dan Jln. Zainir Haviz (2.610 M1)</p>			
<p>5. Pembangunan Jogging Track Danau Sipin (Lanjutan) (1 Paket)</p>			

Sumber: Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Jambi, 2021

6. Rasio Sistem Jaringan Drainase dalam Kondisi Baik

Target Rasio Sistem Jaringan Drainase dalam Kondisi Baik sebesar 31.58% dari Total panjang drainase dalam Kota Jambi yang telah ditangani dari tahun 2018 s/d 2020 adalah 17447.83M dan terealisasi 5.03% atau sepanjang 877.86 M.

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{(Panjang Jaringan Drainase yang dibangun tahun n)}}{\text{(Total Panjang Jaringan Drainase yang telah ditangani di Kota Jambi)}} \times 100\% \\
 &= \frac{877.86}{17447.83} \times 100\% \\
 &= 5.03\%
 \end{aligned}$$

7. Rasio Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik

Target Rasio Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik sebesar 84.00% dari Total Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik yang telah ditangani



dari tahun 2015-2020 adalah 365.86km dan terealisasi 13.73% atau sepanjang 50.23 km.

$$\frac{(Panjang\ jalan\ lingkungan\ yang\ dibangun\ tahun\ n)}{(Total\ Panjang\ Jalan\ Lingkungan\ yang\ telah\ ditangani\ di\ Kota\ Jambi)} \times 100\%$$

$$= \frac{50.23}{365.85} \times 100\%$$

$$= 13.73\%$$

Secara keseluruhan pekerjaan jalan di Kota Jambi pada Tahun 2021, sebagai berikut:

Tabel 3.2.50.
Jumlah keseluruhan pekerjaan jalan di Kota Jambi tahun 2021

No	Uraian	Capaian
	Jalan Lingkungan (Km)	
1.	Kecamatan Jambi Selatan	5,119
2.	Kecamatan Jambi Timur	5,145
3.	Kecamatan Jelutung	3,363
4.	Kecamatan Kota Baru	6,884
5.	Kecamatan Pasar Jambi	864
6.	Kecamatan Telanaipura	5,387
7.	Kecamatan Danau Teluk	1,697
8.	Kecamatan Pelayangan	1,410
9.	Kecamatan Paal Merah	7,062
10.	Kecamatan Alam Barajo	10,837
11.	Kecamatan Danau Sipin	2,455
	Total Jaling (Km)	50,227
	Jalan Status Kota (Km)	
1.	Kecamatan Jambi Selatan	3,410
2.	Kecamatan Jambi Timur	0,150
3.	Kecamatan Jelutung	1,189
4.	Kecamatan Kota Baru	11,461
5.	Kecamatan Pasar Jambi	0,439
6.	Kecamatan Telanaipura	2,129
7.	Kecamatan Danau Teluk	0,064
8.	Kecamatan Pelayangan	7,337
	Total Status Kota (Km)	26,179
	Parit Jalan (Km)	
1.	Kecamatan Jambi Selatan	0,705



No	Uraian	Capaian
2.	Kecamatan Jambi Timur	-
3.	Kecamatan Jelutung	0,215
4.	Kecamatan Kota Baru	1,322
5.	Kecamatan Pasar Jambi	-
6.	Kecamatan Telanaipura	1,514
7.	Kecamatan Danau Teluk	-
8.	Kecamatan Pelayangan	-
Total Parit Jalan (Km)		3,756

8. Rasio Cakupan Sarana dan Prasarana Persampahan

Target Rasio Cakupan Sarana dan Prasarana Persampahan sebesar 79.87%. Capaian untuk tahun 2021 adalah 100%. Dengan target kegiatan Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun 4 Unit TPS dan 1 Unit TPS-3R. Jumlah Penyediaan prasarana dan prasarana TPS/TPA/TPST 1 Unit. Pada tahun 2021 terjadi perubahan nomenklatur. Pada Peraturan Walikota No. 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja pada DPUPR Kota Jambi. Sebelumnya kegiatan sarana dan prasarana persampahan ada di DLH tetapi pada tahun 2021 berpindah ke DPUPR di bidang cipta karya dibawah seksi penyehatan lingkungan perumahan/permukiman. Sehingga Dinas PUPR tidak memiliki Total Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Jambi.

9. Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Di tahun 2019 bidang Sumber Daya air menangani Pengurangan titik genangan, Jumlah total titik genangan adalah 19 titik sama dengan luasan 965.19 ha. Target sampai dengan tahun 2021 adalah 9 titik genangan dan telah terealisasikan 12 titik sampai dengan tahun 2021, dikarenakan intensitas curah hujan yang cukup tinggi di Kota Jambi sehingga mengakibatkan beberapa wilayah tergenang banjir. Adapun penanganan yang telah dilakukan yaitu dilaksanakannya normalisasi

pembersihan, pengerukan sedimen dan pemeliharaan sungai yang menjadi titik terjadinya banjir yang mengakibatkan aliran sungai terhambat karena sampah dan sedimentasi. Beberapa pembangunan infrastruktur drainase juga telah dilakukan untuk mengurangi genangan banjir yang terjadi dan terus meningkatkan kualitas pembangunan dengan mengawasi pembangunan infrastruktur sesuai teknis pelaksanaan dan kerangka acuan kerja yang telah disepakati.

$$\frac{\text{(Luas Genangan yang ditangani Sampai Tahun N)}}{\text{(Total Luasan daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang dikota Jambi)}} \times 100\%$$

$$= \frac{(527.165)}{(965.19)} \times 100\%$$






$$= 54.62\%$$

Tabel 3.2.51.
Tahapan Penanganan 12 Titik Genangan Dinas PUPR Kota Jambi

Titik	LOKASI BANJIR	Panjang/ Luas/Unit	PENANGANAN	FOTO PENANGANAN TITIK BANJIR KOTA JAMBI
1	Hotel Aini Kel. Payo Lebar Kec. Jelutung	8,24 Ha	1. Penggantian Box AINI 2. Rehabilitasi saluran dari Box AINI menuju Sungai Asam (sebelum jembatan kemang/lap. Bola Aries)	
2	Kel. Lebak Bandung Kec. Jelutung Bawah Diklat	7.46 Ha	1. Pembongkaran saluran diperumahan dekat kelenteng s/d sungai puntung (sungai asam) 2. Pembersihan/pemeliharaan dan normalisasi (rutin)	
3	Jl. Kaca Piring Perum. Pemda Kel. Simpang IV Sipin Kec. Telanaipura	37.61 Ha	1. Pembangunan dan pelebaran saluran drainase dari Jln. Kaca Piring - Kenali Besar Uk. 2,5m x 1,5m 2. Pembersihan/pemeliharaan dan normalisasi (rutin)	

Titik	LOKASI BANJIR	Panjang/ Luas/Unit	PENANGANAN	FOTO PENANGANAN TITIK BANJIR KOTA JAMBI
4	SPBU Jl. Patimura Depan UPCA Kel Rawasari Kec. Alam Barajo	38.77 Ha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan pelebaran saluran drainase dari SPBU Patimura s/d Jln. Kaca Piring 2,5m x 1,5m 2. Penggantian Box UPCA (2021) / Pagar SPBU dan ruko (tentative) 	
			<ol style="list-style-type: none"> 3. Pembersihan/pemeliharaan dan normalisasi (rutin) dari box UPCA ke sungai kenali besar 4. Rehap saluran drainase RT 10 Kel. Rawasari s/d sebelum kolam pancing 	
5	Belakang Hotel Makmur Kel. Beringin Kec. Pasar Jambi	9 Ha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggantian box Jln. Dewi Sartika uk. 1,5m x 1,5m (2020) 2. Pembersihan/pemeliharaan dan normalisasi (rutin) dari Box Dewi Sartika s/d Depan Kuburan Kebun Jahe (Nasir Daging) 	 

Titik	LOKASI BANJIR	Panjang/ Luas/Unit	PENANGANAN	FOTO PENANGANAN TITIK BANJIR KOTA JAMBI
6	1. Perumahan Kembar Lestari 2. Perumahan Bougenville 3. Perumahan Kota Baru Indah 4. Perumahan Namura Indah 5. Perumahan Permata Regency (Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo)	79.27 Ha	1. Pembangunan jembatan walisongo (Bina Marga 2019) 2. Penggantian jembatan pasar aurduri (Bina Marga 2019) 3. Pembangunan Jembatan RT. 19 Kel. Penyengat Rendah (SDA 2020) 4. Pembangunan jembatan perum kembar lestari (SDA 2020) 5. Pembangunan kolam retensi di perum bogenvile 6. Pembersihan/pemeliharaan dan normalisasi (rutin) 7. Pembangunan saluran drainase dari RT. 12 Kel. Kenali Besar s/d RT 24 Kel. Penyengat Rendah	
7	Lorong Gado Gado Paal VII Kota Baru	135.395 Ha	Penggantian Box SMP 18 s/d SMA 08	
8	Lapas Klas II.A Jambi (Kel. Rawasari Kec. Alam Barajo)	27.82 Ha	Penggantian Box di Jln Hibah Ibrahim	

Titik	LOKASI BANJIR	Panjang/ Luas/Unit	PENANGANAN	FOTO PENANGANAN TITIK BANJIR KOTA JAMBI
9	JL. H. Juanda Ke. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru	2.4 Ha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rehab saluran drainase RT. 19 Kel. Simpang III Sipin 2. Penggantian Box di Jln. Bakarudin 	
10	Belakang Jamtos Kel Beliung Kec. Alam Barajo	4.92 Ha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rehab saluran drainase dari Lrg. Bersama SMAN 04 s/d sungai kambang uk, 2,5 x 1,2 2. Penggantian box Lrg. Rina Mayang (Belakang Jamtos) tinggi 1,5 lebar 3 m 	
11	RT. 25 Kel. The Hok Kec. Jambi Selatan	37 Ha	Pembuatan drainase tertutup uk. 1,5m x 1m tebal 20cm, depan perum parma	
12	Samping Asrama PM Jl. Gajah Mada Kel.Jelutung Kec. Jelutung	125.57 Ha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggantian jembatan kemang 	
			<ol style="list-style-type: none"> 2. Pembersihan/pemeliharaan dan normalisasi (rutin) dari Jembatan Jln. Gajah Mada s/d Sungai Asam 	

Sumber: Bidang Sumber Daya Air DPUPR Kota Jambi, 2021

Beberapa dokumentasi pekerjaan pada program pengelolaan sumber

daya air (SDA) adalah sebagai berikut;

Tabel 3.2.52.

Indikator Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

NO	INDIKATOR	TARGET 2021	REALISASI 2021
1	Jumlah Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	8554.55 meter	8842.22 Meter
2	Jumlah Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	776 meter	745 meter
3	Jumlah Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	340 meter	340 meter
4	Jumlah Panjang Normalisasi/ Restorasi Sungai	7400 meter	7400 meter
5	Jumlah Panjang Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai yang dikerjakan	90581 meter	152855 meter

Sumber: Bidang Sumber Daya Air PUPR Kota Jambi, 2021

Tabel 3.2.53.

Dokumentasi Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) DPUPR

No	Nama Pekerjaan	Dokumentasi		
1.	Pembangunan Dinding Penahan Tanah Sungai Kenali Besar (Garuda 3) (230 Meter)			
2.	Pembangunan Tanggul Saluran Rt. 56 Kel. Lingkar Selatan (Lanjutan) (98 Meter)			
3.	Pembangunan Tanggul Saluran RT. 35 Kel. Mayang Mangurai (142 Meter)			

No	Nama Pekerjaan	Dokumentasi		
4.	Pembangunan Tanggul Saluran dan Box Culvert RT. 07 Kel. Kenali Asam Bawah (32 Meter dan 1 Unit Box)			
5.	Rehab Tanggul Saluran RT. 26, 27 Kelurahan Talang Banjar (55 Meter)			
1.	Pemeliharaan Pemeliharaan Rutin dan Pembersihan Rutin Tanggul Sungai/Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kecamatan Telanaipura (Swakelola) (937 Meter)			

Sumber: Bidang Sumber Daya Air PUPR Kota Jambi, 2021

10. Peningkatan Kualitas Jasa Konstruksi ke-PU-an

Target Peningkatan Kualitas Jasa Konstruksi ke-PU an sebesar 15.09% dari Total Persentase Bobot Perkegiatan, 40% dari kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi, 10% dari kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, 30% dari kegiatan Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil), 20% dari kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi. Sehingga untuk Program Pengembangan Jasa Konstruksi pada tahun 2021 terealisasi 13.02%.

(Persentase Bobot Perkegiatan)

$$\frac{(12.37\% \times 40\%) + (12\% \times 10\%) + (18.12\% \times 30\%) + (7.25\% \times 20\%)}{100} = 13.02\%$$

SASARAN 7 MENINGKATKAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Sasaran ketujuh yang ditetapkan dalam mencapai Percepatan Peningkatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur adalah meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Tabel 3.2.54.
Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Sasaran ke 7

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGKA AWAL RPJMD	% CAPAIAN 2020	2021			TARGET AKHIR RPJMD
					TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
7.	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	11. Indeks kualitasair	32,11	103,40%	39,75	43,99	110,6%	40,2
		12. Indeks kualitas udara	80,68	104,70%	80,74	85,02	105,3%	80,8
		13. Indeks kualitas tutupan lahan	39,33	107,48%	44,85	49,91	111,3%	44,92
RATA-RATA % CAPAIAN				101,69%			109,06%	

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi 2021. (Data diolah)

Dalam pelaksanaannya pencapaian sasaran ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dengan menetapkan 3 (tiga) IKU yaitu indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks kualitas tutupan lahan, yang mana cara pengukuran ketiga IKU tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri LHK Nomor 78/MENLHK/Setjen/SET.19/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama.

IKU indeks kualitas air dari target 39,75 terealisasi sebesar 43,99 sehingga tercapai sebesar 110,6% dengan kategori **SANGAT TINGGI**. capaian ini melebihi dari target yang diperjanjikan. Nilai Indeks Kualitas Air didapatkan dari pengujian kualitas air anak sungai di Kota Jambi dengan dilakukan beberapa tahap sebagai berikut :

Perhitungan indeks Pencemaran untuk indikator kualitas air sungai dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Dalam pedoman tersebut dijelaskan antara lain mengenai penentuan status mutu

air dengan metoda indeks pencemaran (Pollution Index-PI). Menurut definisinya PI_j adalah indeks pencemaran bagi peruntukan j yang merupakan fungsi dari C_i/L_{ij} , dimana C_i menyatakan konsentrasi parameter kualitas air I dan L_{ij} menyatakan konsentrasi parameter kualitas air i yang dicantumkan dalam baku peruntukan air j . Dalam hal ini peruntukan yang akan digunakan adalah klasifikasi mutu air kelas II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Formula penghitungan indeks pencemaran adalah:

$$PI_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_R}{2}}$$

Dimana :

L_{ij} : Konsentrasi Baku peruntukkan air (j)

C_i : Konsentrasi sampel parameter kualitas air (i)

PI_j : Pencemaran Bagi Peruntukkan (j)
 $(C_i/L_{ij})_M$: Nilai Maksimum dari C_i/L_{ij}

$(C_i/L_{ij})_R$: Nilai rata-rata dari C_i/L_{ij}

Untuk menghitung indeks pencemaran air maka dilakukan beberapa tahap sebagai berikut:

- Langkah 1 : Masing-masing titik pemantauan diasumsikan memiliki 1 (satu) data dan memiliki status mutu air.
- Langkah 2: Kemudian konsentrasi parameter dibandingkan dengan baku mutu. Apabila nilai (C_i/L_{ij}) hasil pengukuran lebih besar dari 1,0 maka digunakan nilai (C_i/L_{ij}) baru yaitu dengan rumus sebagai berikut : $(C_i/L_{ij}) \text{ baru} = 1,0 + P.\log(C_i/L_{ij})$
- Langkah 3 : Merangkum langkah No. 1 dan No.2 kemudian membuat tabel indeks pencemaran air, masukkan data analisis uji

laboratorium setiap sungai dalam rumus software Microsoft excel untuk mendapatkan nilai indeks kualitas air sungai.

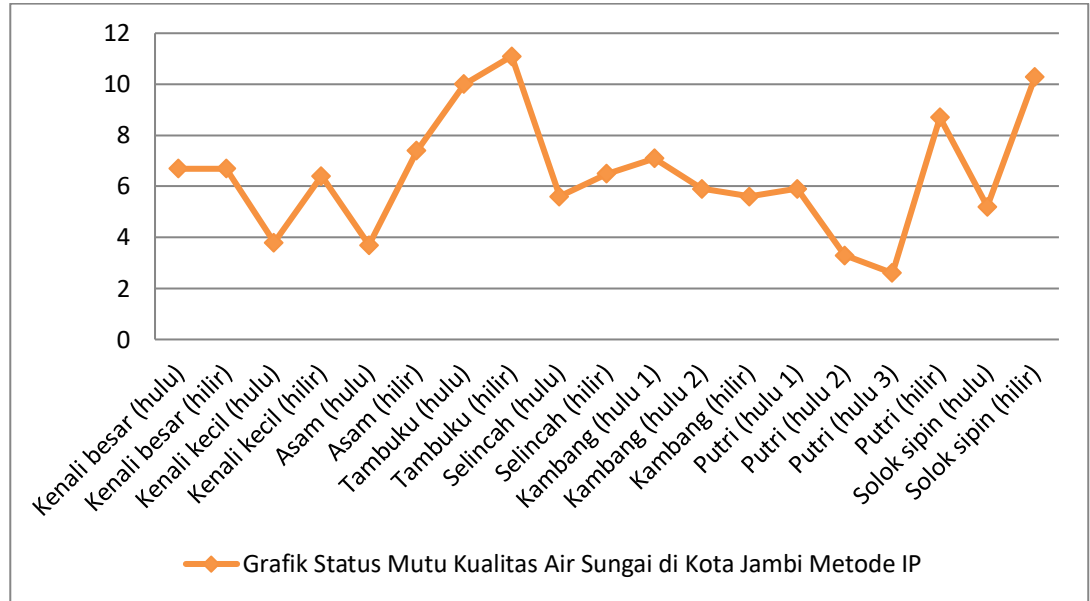
Hasil analisis dan kualitas air sungai di kota Jambi disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2.55.
Indeks Kualitas Air Sungai di Kota Jambi Metode IP

No	Nama Anak Sungai	IP	Status Mutu Air	IKA
1	2	3	4	5
1.	Kenali besar (hulu)	6,7	Sedang	36,32
2.	Kenali besar (hilir)	6,7	Sedang	
3.	Kenali kecil (hulu)	3,8	Ringan	
4.	Kenali kecil (hilir)	6,4	Sedang	
5.	Asam (hulu)	3,7	Ringan	
6.	Asam (hilir)	7,4	Sedang	
7.	Tambuku (hulu)	10,0	Sedang	
8.	Tambuku (hilir)	11,1	Berat	
9.	Selincah (hulu)	5,6	Sedang	
10.	Selincah (hilir)	6,5	Sedang	
11.	Kambang (hulu 1)	7,1	Sedang	
12.	Kambang (hulu 2)	5,9	Sedang	
13.	Kambang (hilir)	5,6	Sedang	
14.	Putri (hulu 1)	5,9	Sedang	
15.	Putri (hulu 2)	3,3	Ringan	
16.	Putri (hulu 3)	2,6	Ringan	
17.	Putri (hilir)	8,7	Sedang	
18.	Solok sipin (hulu)	5,2	Sedang	
19.	Solok sipin (hilir)	10,3	Berat	

Sumber: data primer diolah, 2021

Grafik 3.4. Status Mutu Kualitas Air Sungai di Kota Jambi



Sumber: data primer diolah, 2021

Berdasarkan grafik dan tabel diatas terlihat bahwa nilai indeks pencemaran (IP) berkisar antara 2,6 – 11,1 nilai indeks pencemaran air (IP) terendah terdapat di lokasi Sungai Putri pada bagian hulu yaitu dengan nilai sebesar 2,6 **kategori tercemar ringan** dan nilai terbesar indeks pencemaran air (IP) terdapat di sungai Tambuku bagian hilir yaitu sebesar 11,1 **kategori tercemar berat** dan **nilai indeks kualitas air 36,32**.

Tabel 3.2.56.
Indeks Kualitas Air Kota Jambi Tahun 2021

No	Status	Jumlah	Persen	Bobot	Nilai
1	2	3	4=(status/jml status)	5	6=(4 x 5)
1	Memenuhi	3	0,03	70	2,21
2	Ringan	34	0,36	50	17,89
3	Sedang	48	0,51	30	15,16
4	Berat	10	0,11	10	1,06
	Jumlah	95			36,32

Pencemaran air sungai di Kota Jambi, didominasi oleh tingginya kadar BOD5, COD, DO, PO4. Cu, dan Zn. Kandungan Cu²⁺ dan Zn merupakan

logam berat yang biasanya terdapat di sedimen sungai, adanya kandungan Cu^{2+} dan Zn yang tinggi di badan air kemungkinan berasal dari aktivitas masyarakat yang berada di sepanjang hulu dan hilir sungai. Salah satu contoh dari aktivitas masyarakat tersebut yaitu kegiatan penumpukan barang bekas atau dikalangan masyarakat dikenal dengan sebutan robet (rombongan besi tua) dimana diantara barang-barang bekas tersebut terdapat limbah B3 seperti batu baterai dan besi, dimana kedua barang tersebut bersifat korosif. Barang-barang bekas tersebut diletakkan di tempata terbuka (tanpa atap/penutup) sehingga pada siang hari di cuaca panas suhu menjadi naik, Semakin tinggi suhu, semakin cepat korosi terjadi. Hal ini sebagaimana laju reaksi kimia meningkat seiring bertambahnya suhu. Sedangkan pada saat cuaca hujan barang-barang bekas tersebut terkena air hujan dan menjadi basah, Dalam kondisi kelembaban yang lebih tinggi, besi akan lebih cepat berkarat. Selain itu, dalam air yang kadar oksigen terlarutnya lebih tinggi, proses percepatan korrosif juga akan lebih cepat. Hal ini sebagaimana air dan oksigen masing-masing berperan sebagai medium terjadinya korosi dan agen pengoksidasi besi.

Selain aktivitas masyarakat kegiatan usaha juga memiliki peran dalam adanya kandungan Cu^{2+} dan Zn , kegiatan usaha yang dimaksud adalah cucian mobil, motor dan bengkel yang letaknya di sepanjang aliran sungai dari hulu sampai hilir. Ceceran oli, larutan oli pada air cucian mobil dan motor pada saat proses pencucian. Rata-rata usaha cucian mobil dan motor 80% tidak memiliki IPAL air buangan sisa pencucian dialirkan langsung menuju drainase kota. Hal inilah menjadi salah satu penyebab tingginya kandungan Cu^{2+} dan Zn di delapan sungai Kota Jambi.

Sementara untuk tingginya kadar BOD5 dan COD jelas karena tingginya bahan organik yang masuk ke badan air, hal ini bisa disebabkan

oleh limbah cair domestik. Dengan demikian, selisih nilai antara COD dan BOD5 memberikan gambaran besarnya bahan organik yang sulit terurai diperairan. Tingginya kadar BOD5 dan COD akan menurunkan tingkat DO, hal ini juga menjadi salah satu parameter yang hampir selalu diluar baku mutu. Kondisi ini menunjukkan bahwa semua sungai yang melewati Kota Jambi sudah perlu untuk dikelola dengan baik sehingga kedepan kondisi seperti ini dapat diperbaiki kearah yang lebih baik.

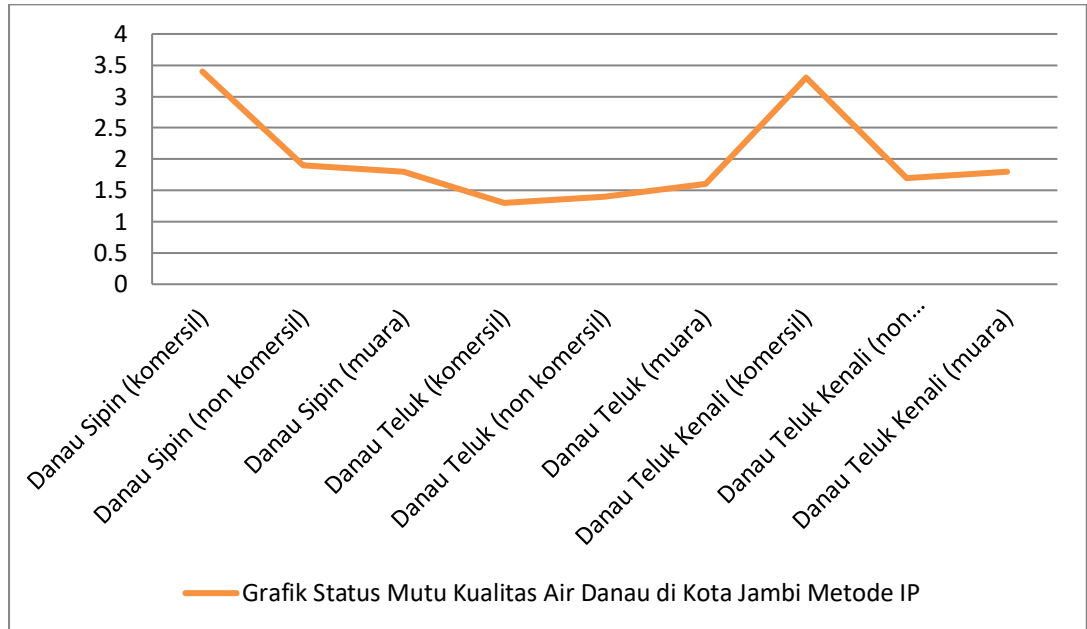
Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi juga melakukan perhitungan Indeks Pencemaran Air Danau dengan hasil disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.2.57.
Indeks Kualitas Air Danau di Kota Jambi Metode IP

No	Nama Anak Sungai	IP	Status Mutu Air	IKA
1	Danau Sipin (komersil)	3,4	ringan	51,67
2	Danau Sipin (non komersil)	1,9	ringan	
3	Danau Sipin (muara)	1,8	ringan	
4	Danau Teluk (komersil)	1,3	ringan	
5	Danau Teluk (non komersil)	1,4	ringan	
6	Danau Teluk (muara)	1,6	ringan	
7	Danau Teluk Kenali (komersil)	3,3	ringan	
8	Danau Teluk Kenali (non komersil)	1,7	ringan	
9	Danau Teluk Kenali (muara)	1,8	ringan	

Sumber : hasil analisis 2021

Grafik 3.5.
Status Mutu Kualitas Air Danau di Kota Jambi



Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan tabel 2.15 di atas terlihat bahwa nilai indeks pencemaran (IP) berkisar 1,3 - 3,3 nilai indeks pencemaran air (IP) terendah terdapat dilokasi Danau Teluk (komersil) yaitu sebesar 1,3 Katagori Tercemar Ringan dan nilai terbesar indeks pencemaran air (IP) terdapat di Danau Teluk Kenali (komersil) sebesar 3,3 Katagori Tercemar ringan dengan **Nilai Indeks Kualitas Air Danau 51,67**.

Pencemaran air danau di kota Jambi lebih di dominasi tingginya kadar BOD5, COD, sebagian di beberapa titik pengambilan sampel terdapat parameter PO4, Nitrit, Cu, dan Zn. Faktor-faktor yang mempengaruhi BOD yaitu meningkatnya jumlah senyawa organik yang diuraikan, tersedianya mikroorganisme aerob, dan tersedianya jumlah oksigen yang dibutuhkan. Tingginya nilai BOD dapat disebabkan oleh tingginya kandungan bahan organik pada danau. Bahan organik dan logam berat yang masuk ke badan



air, hal ini bisa disebabkan oleh limbah cair domestik dan aktivitas kegiatan masyarakat lainnya yang sebagian terbawa dari anak-anak sungai yang mengalir menuju danau disamping itu dimungkinkan berasal dari endapan pakan ikan maupun jasad biota yang telah mati.

Selain itu keterlibatan dan peran aktif dari berbagai *stakeholders* baik pemerintah, swasta maupun masyarakat dalam upaya penurunan beban pencemar air sangat diperlukan, adapun yang dapat dilakukan antara lain:

1. Pembuatan septictank komunal.
2. Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup telah mewajibkan kepada developer perumahan melalui dokumen lingkungan agar membuat septictank komunal diperumahan masing-masing untuk mengurangi beban pencemaran air.
3. Kampanye atau promosi perilaku menjaga sungai dan stop membuang sampah ke sungai melalui iklan layanan masyarakat di media cetak dan elektronik
4. Melarang pembuangan hasil kegiatan yang ada di Kota Jambi secara langsung ke sungai sebelum melalui proses pengolahan.
5. Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang menghasilkan air limbah, pada tahun 2021 telah dilakukan pembinaan sebanyak 60 dunia usaha dan pengawasan terhadap 100 perusahaan.
6. Penegakan hukum Perda Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah kepada perorangan atau badan usaha yang membuang limbahnya sembarangan.

Adapun Prgram yang mendukung indikator ini adalah :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan



lingkungan hidup Kabupaten/Kota, kegiatan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota, kegiatan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota, dengan melakukan :

- a. Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemaran di Kota Jambi:
 - b. Melakukan koordinasi pengendalian pencemaran.
 - c. Melakukan pengujian sampel sebanyak 332 sampel di 41 titik.
 - d. Melakukan kegiatan gotong royong di Danau Sipin.
3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).
4. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan melakukan :
- Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH (daftar Izin Lingkungan dapat dilihat pada lampiran 3).
 - Melakukan pembinaan 60 usaha dan pengawasan terhadap pelaku usaha sebanyak 100 pelaku usaha.

IKU kedua belas yaitu indeks kualitas udara dengan target 80,72 terealisasi pada angka 84,51 atau dengan capaian sebesar 104,70 persen dengan kategori **SANGAT TINGGI** dikarenakan pada tahun 2020 tidak terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi sehingga tidak terjadi dampak kabut asap di Kota Jambi yang dapat mempengaruhi kualitas udara di Kota Jambi.

Pemantauan kualitas udara berfungsi untuk memberikan informasi faktual tentang kondisi (status) kualitas udara saat ini, kecenderungan masa lalu dan prediksi perubahan lingkungan masa depan. Informasi dasar yang dihasilkan dari kegiatan pemantauan dapat dijadikan acuan untuk

menyusun perencanaan, evaluasi, pengendalian dan pengawasan lingkungan, rencana tata ruang, ijin lokasi untuk usaha atau kegiatan, serta penentuan baku mutu kualitas udara. Data hasil pemantauan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan, penyusunan kebijakan ataupun pengambilan keputusan dan evaluasi kebijakan pengelolaan lingkungan dalam peraturan perundangan lingkungan hidup di daerah. Polusi udara ditimbulkan dari berbagai faktor sebagai akibat terjadinya pencemaran udara seperti polusi kendaraan bermotor, pabrik, pembakaran hutan dan lahan.

Alat pemantauan kualitas udara otomatis atau yang disebut Air Quality Monitoring System (AQMS) dan alat Pasive Sampler yang digunakan oleh Pemerintah Kota Jambi untuk melakukan pemantauan kualitas udara Ambien yang bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Titik peruntukan pengambilan sampel kualitas udara otomatis atau yang disebut Air Quality Monitoring System (AQMS) stationnya yang berlokasi di lapangan depan kantor Walikota Jambi sementara untuk pasive sampler yang berlokasi di 4 (empat) titik sebagai peruntukan sumber pencemaran udara yaitu Peruntukan wilayah pemukiman, Perkantoran, Transportasi dan area Industri. Sebaran lokasi pengambilan sampel udara Ambien disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 3.2.58.
Lokasi Titik Sampel Kualitas Udara Ambien Kota Jambi

No	Nama Peruntukkan	Alamat	Titik Koordinat
1.	Station AQMS	Lapangan Depan Kantor Walikota	X: -1.629584 Y: 103.607389
2.	Transportasi	Jl. D.I Panjaitan, Kel. Jelutung	X: -1.615830 Y: 103.616419
3.	Industri	Kawasan Industri crumb rubber Kel. Sijenjang	X: -1.574666 Y: 103.628226



No	Nama Peruntukkan	Alamat	Titik Koordinat
4.	Pemukiman	Pemukiman (perum Villa Kenali, Kel. Mayang Mangurai)	X: -1.645444 Y: 103.585694
5.	Perkantoran	Komplek perkantoran Walikota Jambi	X: -1.629584 Y: 103.607389

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Data hasil pemantauan kualitas udara ambien yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan Baku Mutu Udara Ambien yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Kemudian data hasil pemantauan kualitas udara dianalisa menggunakan metode analisa perhitungan ISPU (Indeks Standar Pencemar Udara) sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2020 Tahun 2020 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara. Dalam peraturan tersebut terdapat penetapan parameter-parameter dasar untuk indeks standar pencemar udara (ISPU), yaitu NO₂, SO₂, Karbon Monoksida (CO), Ozon (O₃), dan PM₁₀. Selanjutnya Kadar SO₂ dan kadar NO₂ sebagai indikator perhitungan nilai IKU tingkat Nasional.

Dari hasil pemantauan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) selama periode bulan Januari sampai dengan bulan Nopember Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel dan grafik dibawah ini :

Tabel 3.2.59.

Hasil Data Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) Kota Jambi Tahun 2021

No.	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nop	Des
1	43	44	-	26	19	27	36	54	28	50	37	52
2	26	22	-	49	34	30	29	47	38	50	63	50
3	24	19	-	24	40	31	35	42	32	69	51	-
4	20	32	-	35	8	30	38	45	14	81	60	-
5	20	17	-	34	11	35	43	49	11	80	33	-
6	19	23	-	22	31	20	71	47	-	77	30	-
7	23	19	-	24	45	39	41	42	-	74	24	43
8	30	18	-	52	39	31	54	43	-	63	39	46



No.	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nop	Des
9	32	30	-	37	33	46	40	46	15	-	33	43
10	34	50	-	23	19	50	45	41	24	80	35	37
11	33	-	-	18	22	41	51	38	39	70	10	44
12	41	-	-	32	23	58	50	43	42	76	23	-
13	42	-	-	27	13	31	50	44	50	77	22	-
14	50	-	-	61	9	31	50	45	40	82	14	43
15	60	52	-	0	9	24	55	45	36	79	21	40
16	55	-	-	39	8	23	40	46	36	78	25	51
17	34	33	-	16	14	21	46	50	37	86	-	36
18	41	86	-	15	13	11	37	43	38	60	13	40
19	43	-	-	38	25	20	37	50	43	72	68	33
20	48	-	-	14	28	31	39	50	51	58	43	-
21	53	-	-	17	25	49	42	45	38	32	60	48
22	47	-	-	17	15	32	40	40	44	65	58	46
23	25	-	-	23	38	33	42	45	45	70	56	35
24	31	-	-	23	46	34	50	43	33	63	59	41
25	34	-	63	30	46	45	38	46	38	52	45	45
26	38	-	34	26	27	34	40	45	35	55	45	33
27	39	-	39	47	42	30	44	43	42	67	46	37
28	46	0	55	44	35	39	46	45	37	60	39	35
29	35	0	54	48	30	30	55	36	38	79	43	51
30	47	0	27	14	16	22	33	14	42	62	47	51
31	43	0	28	0	35	0	48	37	0	58	0	39
Rata2	37,29	34,23	42,86	30,17	25,74	32,60	44,03	43,52	35,78	67,50	39,38	42,46

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan Kepmen LHK Nomor : P.14/MENLHK/7/2020

0 - 50 Baik

51 - 100 Sedang

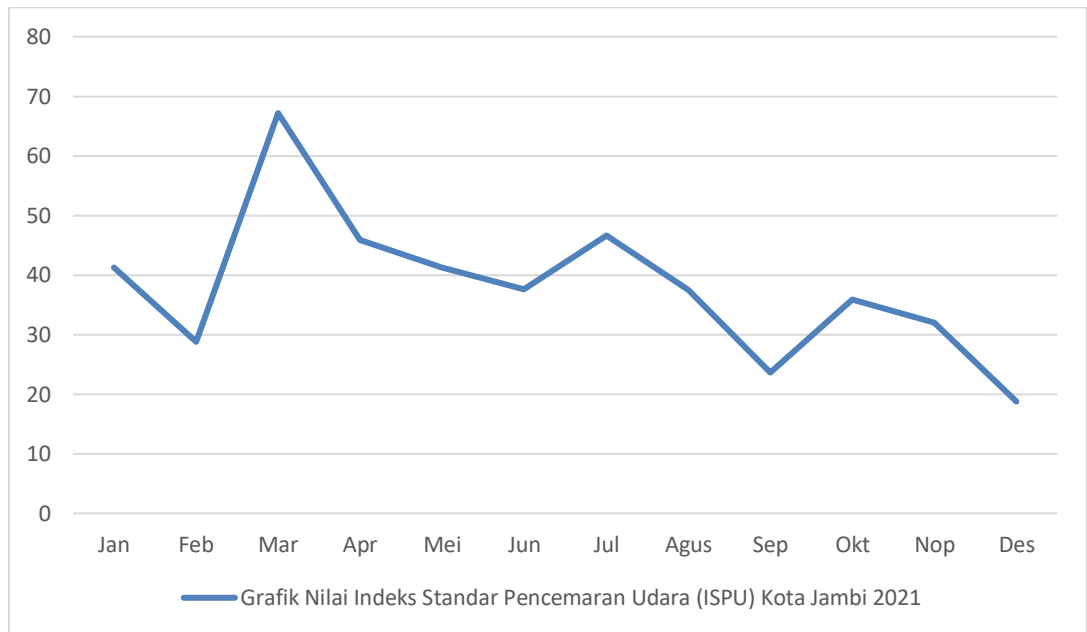
101 - 199 Tidak Sehat

200 - 299 Sangat Tidak Sehat

300 - keatas Berbahaya

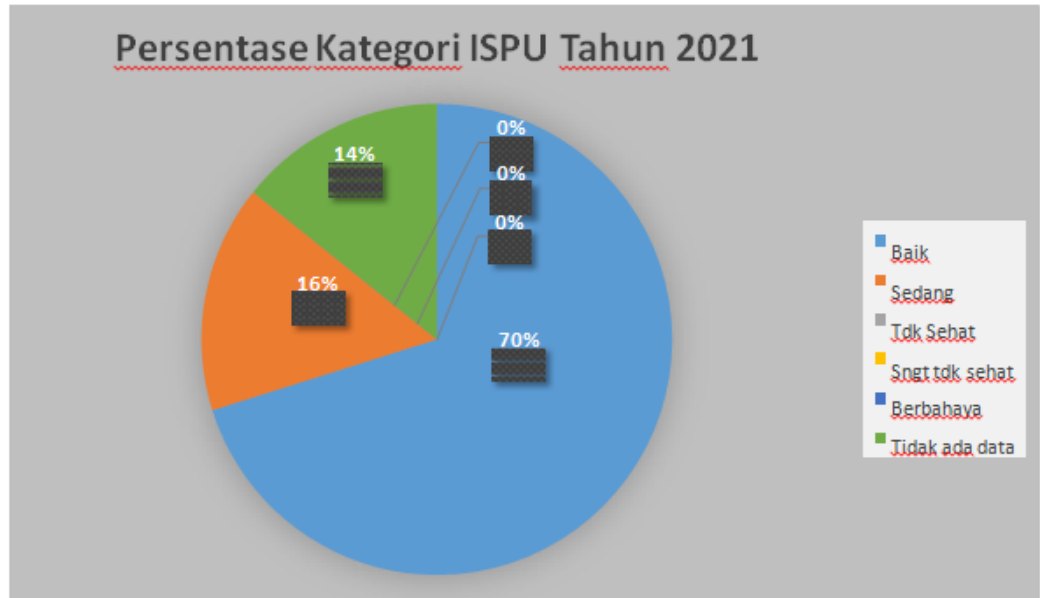
Grafik 3.6.

Nilai Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) Kota Jambi



Berdasarkan Tabel dan grafik Nilai Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) Kota Jambi Tahun 2021 tersebut diatas menunjukkan bahwa nilai Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) berfluktuasi nilai tertinggi terjadi pada bulan Oktober Tahun 2021 yaitu sebesar 67,50 dengan katagori sedang selanjutnya di bulan Juli Tahun 2021 dan seterusnya cenderung menurun di bawah nilai Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) 25,74 dengan katagori Baik, Jika di rata-ratakan nilai Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) Kota Jambi Tahun 2021 sebesar 39,63 hal ini menunjukkan kategori Baik berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2020 Tahun 2020 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara. Presentasi Kategori Nilai Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) dapat di lihat pada grafik berikut ini :

Grafik 3.7.
Persentase Kategori Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) Tahun 2021



Sumber : Hasil Analisis 2021

Berdasarkan data pada grafik di atas menunjukkan bahwa presentasi Katagori Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) Kota Jambi Tahun 2021 yang terbanyak adalah dengan Katagori Baik yaitu sebesar 70% sementara katagori sedang sebanyak 16% dan Tidak Ada Data sebesar 14%.

Dari hasil uji laboratorium di 4 (empat) titik sebagai peruntukan sumber pencemaran udara yaitu Peruntukan untuk wilayah pemukiman, Perkantoran, Transportasi dan area Industri yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2020 yang bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dapat di lihat pada berikut ini :

Tabel 3.2.60.
Hasil Pemantauan Pasive Sampler

NO	PERUNTUKAN	Kadar NO ₂ (BM EU 40 µg/m ³)	Kadar SO ₂ (BM EU 20 µg/m ³)	Kadar NO ₂	Kadar SO ₂
		µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³
1	Transportasi	21.78	4.32	21.43	5.18
2	Industri	9.48	7.90	13.77	6.29
3	Pemukiman	14.30	4.14	13.43	2.57
4	Perkantoran	14.16	5.00	7.15	7.15
5	BLANK	<0,41	<2,57	<0,41	<2,57

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan Tabel Hasil Pemantauan kualitas udara dengan metode Pasive Sampler Kota Jambi Tahun 2021 tersebut diatas menunjukkan bahwa untuk parameter NO₂ maupun Parameter SO₂ masih di bawah baku mutu jika di bandingkan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah.

Indikator perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) parameter yang di gunakan adalah Kadar SO₂ dan kadar NO₂ sebagai indikator perhitungan nilai IKU tingkat Nasional. Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Udara dapat di lihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 3.2.61.
Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Udara Kota Jambi Tahun 2021

No	PERUNTUKAN	Kadar NO ₂	Kadar SO ₂	Kadar NO ₂	Kadar SO ₂	Kadar NO ₂	Kadar SO ₂	NO ₂ Rata-rata Peruntukan	SO ₂ Rata-rata Peruntukan	NO ₂ Rata-rata Kab	SO ₂ Rata-rata Kab	Indeks NO ₂	Indeks SO ₂	Ieu	IKU Kota Jambi
		µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³								
1	Transportasi	21.78	4.32	21.43	5.18			21.61	4.75	15.32	7.13	0.38	0.36	0.37	85.02
2	Industri	9.48	7.90	13.77	6.29			11.63	7.10						
3	Pemukiman	14.30	4.14	13.43	2.57			13.87	3.36						
4	Perkantoran	14.16	5.00	7.15	7.15	21.24	27.79	14.18	13.31						

No	PERUNTUKAN	Kadar NO2	Kadar SO2	Kadar NO2	Kadar SO2	Kadar NO2	Kadar SO2	NO2 Rata-rata Peruntukan	SO2 Rata-rata Peruntukan	NO2 Rata-rata Kab	SO2 Rata-rata Kab	Indeks NO2	Indeks SO2	Ieu	IKU Kota Jambi
5	BLANK	<0,41	<2,57	<0,41	<2,57										

Sumber: Data Primer diolah, 2021

Berdasarkan Tabel Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Udara Kota Jambi Tahun 2020 tersebut diatas menunjukkan bahwa nilai IKU Kota Jambi Tahun 2021 sebesar 85,02 dengan Katagori Baik dan hal ini menunjukan masih di atas target Nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu sebesar 80,74.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung indikator Indeks Kualitas Udara adalah :

- Kegiatan Pemantauan Kualitas Udara Air Quality Monitoring System (AQMS).
- Kegiatan pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor (spotcheck kendaraan bermotor) selama tiga hari berturut-turut pada ruas jalan yang berbeda dengan target total 1500 kendaraan.

Pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor hari pertama dilaksanakan pada tanggal 21 September 2021 di Jalan Hos Cokroaminoto (Halaman Parkir Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi) pada pukul 08.00 s.d 15.00 WIB. Acara secara simbolik dibuka oleh Wakil Walikota Jambi dan kemudian dilanjutkan dengan pengujian emisi kendaraan dinas Wakil Walikota dan staf ahli walikota Jambi, Kepala DLH Kota Jambi serta mobil dinas lainnya kemudian diteruskan pengujian kendaraan umum.

Foto 3.2.1.

Pengujian emisi kendaraan yang dilakukan Wakil Walikota



Pengujian emisi kendaraan bermotor hari kedua tanggal 22 September 2021 dilaksanakan di Jalan Sultan Taha (Depan WTC) dan pengujian uji emisi hari ketiga tanggal 23 September 2010 di Jalan H. Agus Salim (halaman parkir Gedung Senam Kotabaru).

Foto 3.2.2.

Uji Emisi hari ke 2 di depan WTC Kota Jambi



Foto 3.2.3.

Uji Emisi hari ke 3 di Parkiran Gedung Senam Kota Jambi



Ambang batas yang digunakan untuk menentukan lulus atau tidak lulus uji emisi adalah berdasarkan Kepmen LH Nomor 05 Tahun 2006. Adapun hasil uji emisi gas buang kendaraan bermotor selama tiga hari pelaksanaan adalah sbb:

Tabel 3.2.62

Data Hasil Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tahun 2021

NO	Jenis Kendaraan	Lulus Uji		Tidak lulus		Jumlah Unit
		Unit	%	Unit	%	
1	Premium	1187	95	58	5	1245
2	Solar	317	57	236	43	553
Jumlah						1798

98 kendaraan yang tercatat telah di uji sejumlah 1245 unit adalah mobil berbahan bakar Premium dan 553 unit adalah mobil berbahan bakar solar. Untuk mobil berbahan bakar bensin 95% lulus uji dan 5% tidak lulus uji, sedangkan untuk mobil berbahan bakar solar 57% lulus uji dan 43% tidak lulus uji.

Hal ini menunjukkan bahwa hampir rata-rata kendaraan berbahan

bakar bensin telah melakukan perawatan atau dalam kondisi baik. Sementara untuk bahan bakar solar, jika dilihat dari uji opasitasnya rata-rata 54,24% maka kendaraan tersebut kurang dilakukan service secara berkala.

- Pemantauan kualitas udara jalan raya (road side monitoring) Pemantauan kualitas udara jalan raya dilaksanakan mulai pukul 06.00 sampai dengan 05.30 hari berikutnya. Hari pertama dilaksanakan di jalan H. Agus Salim, hari kedua di Jalan Slamet Riyadi, dan Hari ketiga di Jalan HOS Cokroaminoto. Pemantauan dilakukan oleh PT. NUSA LABORATORIUM INDONESIA sebagai laboratorium rekanan yang ditunjuk.

Foto 3.2.4.
Alat Pemantauan Kualitas Udara jalan Raya

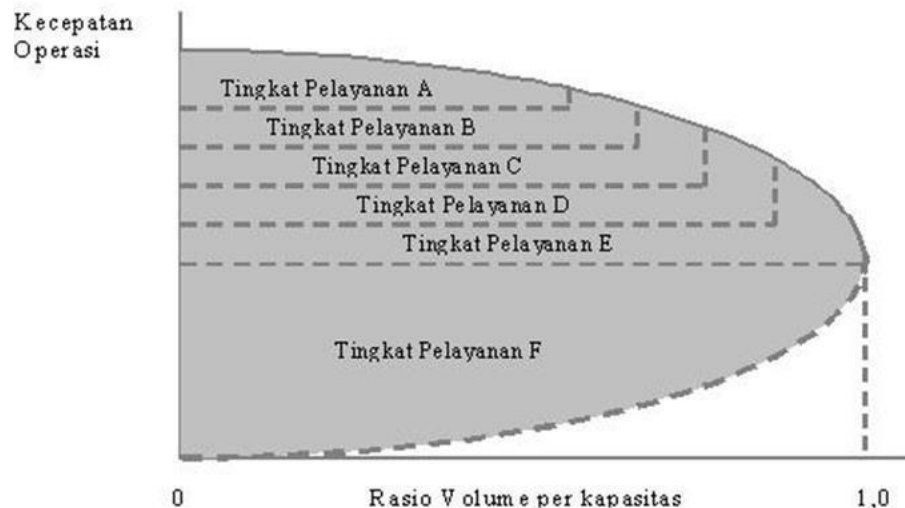


- Pemantauan kinerja lalu lintas (traffic counting) Pemantauan kinerja lalu lintas (traffic counting) hari pertama dilakukan di Jl. H. Agus Salim (Depan Kantor DLH Provinsi Jambi), hari kedua di Jalan Slamet Riyadi (depan kantor BPJS/Jamsostek) dan hari ketiga di jalan Jl.HOS

Cokroaminoto. Camcorder untuk pemantauan ditempatkan di titik lokasi yang sama dengan penempatan alat pemantau kualitas udara jalan raya.

VCR adalah perbandingan antara jumlah kendaraan yang melintas dengan kapasitas maksimum yang dapat ditampung ruas jalan tersebut, dan merupakan gambaran dari tingkat pelayanan ruas jalan. Standar nilai VCR yang ditetapkan berdasarkan manual kapasitas jalan Indonesia (NKJI,1997). Dengan diketahuinya nilai rata-rata kecepatan lalulintas (SMS) dan nilai VCR atau DS per jalan dari semua jalan yang dipantau maka dapat diketahui dengan mudah level atau tingkat pelayanan (LoS) dari masing-masing jalan. Berdasarkan grafik dibawah inilah kita bisa tentukan nilai LoS dengan cara menyilangkan nilai VCR atau DS dengan nilai SMS ke dalam grafik maka akan diperoleh nilai LoS untuk setiap jalan maupun nilai LoS Kota.

Grafik 3.8.
Level Of Service (LOS)



Sumber : Morlok. 1991

Untuk pemantau kinerja lalulintas, berdasarkan perhitungan menggunakan Software data base Langit Biru menunjukkan Nilai VCR

(Volume Capacity Ratio) sebagai berikut:

Tabel 3.2.63.
VCR Pada Ketiga Ruas Jalan yang Dipantau

No	Jalan	VCR Maksimum
1.	H. Agus Salim	0,62
2.	Slamet Riyadi	0,38
3.	HOS Cokroaminoto	0,50

Selanjutnya nilai LoS yang diperoleh tersebut maka situasi lalu lintas dan pelayanan jalan dapat digambarkan secara teknis seperti dalam Tabel diatas Kriteria tingkat pelayanan (TP) jalan dibawah ini sebagaimana yang tercantum dalam MKJI.

Dengan diketahuinya nilai (LoS) dari masing-masing jalan dan kota maka keterangan karakter lalulintas yang tergambar menunjukkan kondisi riil lalu lintas.

Tabel 3.2.64.
Kriteria Tingkat Pelayanan (TP) Jalan

No	Tingkat Pelayanan	Kriteria	Nilai	Keterangan
1.	A	TP Sangat Tinggi	0,00-0,20	Kondisi arus bebas kecepatan tinggi volume lalu lintas rendah
2.	B	TP Tinggi	0,21-0,44	Arus stabil kecepatan mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas
3.	C	TP Sedang	0,45-0,74	Arus stabil kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan
4.	D	TP Rendah	0,75-0,84	Arus mendekati tidak stabil kecepatan masih dapat dikendalikan V/C masih dapat ditolerir
5.	E	TP Sangat Rendah	0,85-1,00	Arus tidak stabil kecepatan kadang terhenti permintaan mendekati kapasitas
6.	F	TP Sangat-sangat Rendah	>1.00	Arus dipaksakan kecepatan rendah volume dibawah kapasitas antrian panjang

Berdasarkan dari tabel kriteria diatas, tingkat pelayanan pada jalan H. Agus Salim berada pada peringkat C yang berarti bahwa kemampuan ruas jalan untuk melayani volume kendaraan yang melintas masuk kriteria rendah sampai dengan sedang. Tingkat pelayanan pada jalan Slamet Riyadi berada pada tingkat B berarti bahwa kemampuan ruas jalan untuk melayani volume kendaraan yang melintas masuk kriteria tinggi sampai sangat tinggi. Sedangkan tingkat pelayanan pada jalan HOS Cokroaminoto berada pada tingkat C yang berarti bahwa kemampuan ruas jalan untuk melayani volume kendaraan yang melintas masuk kriteria rendah sampai dengan sedang.

Pelaksanaan kegiatan Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (EKUP) pada tahun 2021 telah memperhatikan beberapa hal yang perlu diperbaiki pada pelaksanaan tahun 2020 yang lalu yaitu publikasi ke masyarakat tentang pelaksanaan kegiatan, ketersediaan Alat Uji Emisi, serta pemenuhan alat yang memenuhi standar dan terkalibrasi baik. Selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatan EKUP tahun 2020 masih perlu memperhatikan beberapa hal untuk perbaikan penyelenggaraan kegiatan diwaktu mendatang sebagai berikut :

- Lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
- Dalam uji emisi kendaraan yang berbahan bakar solar, teknik samplingnya perlu penyempurnaan dan disesuaikan dengan SNI.
- Laboratorium yang bekerjasama hendaknya laboratorium yang memiliki 6 jenis parameter dapat di uji lengkap dan terakreditasi.
- Lebih meningkatkan partisipasi Dealer Kendaraan dalam ketersediaan Alat Uji Emisi serta Pemeliharaan Alat/Kalibrasi.

Secara umum hasil evaluasi menunjukkan bahwa pencemaran udara dari sumber bergerak di Kota Jambi belum menunjukkan situasi yang



memerlukan perhatian serius. Namun demikian sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan kota, hal ini perlu tetap diperhatikan.

IKU ketiga belas mengenai indeks kualitas tutupan lahan dengan target 44,85 terealisasi dengan angka 49,91 atau tercapai sebesar 111,3 persen masuk kategori **SANGAT TINGGI**.

Adapun program atau kegiatan yang dilakukan untuk mendukung indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan diantaranya adalah:

1. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
 - a. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan (3 lokasi hutan kota)
 - b. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - c. Pengelolaan Saran dan Prasarana Keanekaragaman Hayati

Faktor Pendorong:

- a. Masih adanya penambahan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau
- b. Koordinasi antar OPD dan Bagian Tata Kelola Pemerintahan Sekretariat Kota Jambi yang memiliki kewenangan dalam hal pengadaan lahan dan identifikasi terhadap lahan-lahan yang bisa dijadikan RTH Publik

Faktor Penghambat:

- a. Tidak semua RTH di Kota Jambi dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
- b. Adanya alih fungsi lahan
- c. Adanya pandemic Covid-19 sehingga terjadi rasionalisasi anggaran (recofusing) untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi

SASARAN 8 MENINGKATNYA PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAYANAN PERDAGANGAN

Sasaran yang kedelapan yaitu meningkatnya pembinaan, pengawasan dan pelayanan perdagangan.

Tabel 3.2.65.

Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Sasaran ke 8

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		ANGKA AWAL RPJMD	% CAPAIAN 2020	2021			TARGET AKHIR RPJMD
						TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
8.	Meningkatnya pembinaan, pengawasan dan pelayanan perdagangan	14.	Persenta se pembinaan, pengawasan dan pelayanan perdagangan	20,00%	223,52%	68,00%	37,92%	55,76%	100,00%
RATA-RATA % CAPAIAN					223,52%			55,76%	

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi 2021. (Data diolah)

Sasaran ke delapan dengan 1 (satu) buah IKU ini dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi, yaitu persentase pembinaan, pengawasan dan pelayanan perdagangan dengan kategori **RENDAH**. Adapun capaian kinerja indikator ini pada tahun 2021, dimana ditargetkan sebesar 68 % dan realisasinya sebesar 37,92 %, dengan capaian kinerja sebesar 55,76 %. Suatu prestasi kerja yang kurang baik karena realisasi kinerja tidak sesuai dengan target yang ditetapkan hal ini disebabkan anggaran yang sangat terbatas dan dalam suasana pandemic covid 19, dengan demikian nilai capaian kinerja indikator sasaran RPJMD ini rendah (interval penilaian $51 \leq 65$).

Untuk implementasi pencapaian indikator kinerja sasaran ini bergantung dari capaian kinerja 6 (enam) indikator kinerja program yang merupakan urusan perdagangan. Realisasi indikator kinerja program inilah yang menentukan tercapainya realisasi indikator sasaran ini. Dalam artian bahwa capaian kinerja sasaran ini bergantung pada capaian kinerja program sebagaimana dimaksud.

Adapun formulasi yang dipergunakan untuk menghitung capaian



kinerja sasaran ini yaitu :

Capaian rata-rata realisasi indikator program tahun pelaksanaan (tahun n) dibagi dengan target sasaran tahun pelaksanaan (tahun n) dikalikan 100 %.

Atau

$$\frac{\text{Capaian rata – rata realisasi indikator program tahun pelaksanaan (tahun n)}}{\text{Target indikator kinerja sasaran (tahun n)}} \times 100\% = \text{Realisasi}$$

$$\frac{(33,33\%) + (28,67\%) + (33,33\%) + (50,51\%) + (20,83\%) + (60,87\%)}{6} \times 100\% = 37,92\%$$

Berdasarkan rumusan diatas maka dapatlah diketahui realisasi kinerja indikator sasaran yaitu :

$$\frac{37.92\%}{68\%} \times 100\% = 55.76\%$$

Ketidaktercapaian target indikator kinerja sasaran ini disebabkan :

- a. Keterbatasan anggaran akibat rasionalisasi.
- b. Wabah covid 19 sebagai penyebab yang krusial.
- c. PPKM juga menyebabkan terbatasnya pergerakan ASN dalam melaksanakan rencana aksi.
- d. Kurang kooperatifnya masyarakat dan juga kurang memahami regulasi sehingga dianggap pemerintah membuat mereka susah untuk berusaha.
- e. Kelemahan secara internal adalah tidak dilakukannya perubahan target kinerja dalam Renja Perubahan Tahun 2021 dan RKA/DPA Perubahan Tahun 2021, sementara anggaran untuk pencapaian kinerja dimaksud telah dirasionalisasi sehingga rencana aksinya tidak dapat dilaksanakan.

Adapun capaian dan pengukuran indikator kinerja program dalam RPJMD, sebagai berikut :



1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Capaian kinerja indikator ini pada tahun 2021, dimana ditargetkan sebesar 33,33 % dan realisasinya sebesar 33,33 %, dengan capaian kinerja sebesar 100 %. Suatu prestasi kerja yang sangat baik sekali realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan walaupun dengan anggaran yang sangat terbatas dan suasana pandemic covid 19. Dengan demikian nilai capaian kinerja indikator program ini **sangat tinggi** (interval penilaian $91 \leq$).

2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Capaian kinerja indikator ini pada tahun 2021, dimana ditargetkan sebesar 33,33 % dan realisasinya sebesar 28,67 %, dengan capaian kinerja sebesar 86,01 %. Suatu prestasi kerja yang baik walaupun realisasi kinerja tidak mencapai target hal ini disebabkan anggaran yang sangat terbatas dan suasana pandemic covid 19. Dengan demikian nilai capaian kinerja indikator program ini **tinggi** (interval penilaian $76 \leq 90$).

3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Capaian kinerja indikator ini pada tahun 2021, dimana ditargetkan sebesar 33,33 % dan realisasinya sebesar 33,33 %, dengan capaian kinerja sebesar 100 %. Suatu prestasi kerja yang sangat baik sekali realisasi kinerja sesuai dengan target walaupun dengan anggaran yang sangat terbatas dan suasana pandemic covid 19. Dengan demikian nilai capaian kinerja indikator program ini **sangat tinggi** (interval penilaian $91 \leq$).

4. Program Pengembangan Ekspor

Capaian kinerja indikator ini pada tahun 2021, dimana ditargetkan sebesar 41,67 % dan realisasinya sebesar 20,83 %, dengan capaian kinerja sebesar 50 %. Suatu prestasi kerja yang kurang baik karena realisasi kinerja tidak sesuai dengan target hal ini disebabkan anggaran

yang sangat terbatas dan suasana pandemic covid 19. Dengan demikian nilai capaian kinerja indikator program ini **sangat rendah** (interval penilaian ≤ 50).

5. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Capaian kinerja indikator ini pada tahun 2021, dimana ditargetkan sebesar 58,98 % dan realisasinya sebesar 50,51 %, dengan capaian kinerja sebesar 85,63 %. Suatu prestasi kerja yang sangat baik sekali realisasi kinerja melampaui dari yang ditargetkan walaupun dengan anggaran yang sangat terbatas dan suasana pandemic covid 19. Dengan demikian nilai capaian kinerja indikator program ini **tinggi** (interval penilaian $76 \leq 90$).

6. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Capaian kinerja indikator ini pada tahun 2021, dimana ditargetkan sebesar 60,87 % dan realisasinya sebesar 60,87 %, dengan capaian kinerja sebesar 100 %. Suatu prestasi kerja yang sangat baik sekali realisasi kinerja sesuai dengan target walaupun dengan anggaran yang sangat terbatas dan suasana pandemic covid 19. Dengan demikian nilai capaian kinerja indikator program ini **sangat tinggi** (interval penilaian $91 \leq$).

**SASARAN 9
MENINGKATNYA KETAHANAN PANGAN**

Sasaran kesembilan adalah meningkatnya ketahanan pangan yang dalam pelaksanaannya Prioritas pembangunan yang kelima adalah Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi.

Tabel 3.2.66.
Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Sasaran ke 9

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		ANGKA AWAL RPJMD	% CAPAIAN 2020	2021			TARGET AKHIR RPJMD
						TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
9.	Meningkatnya ketahanan pangan	15.	Indeks Ketahanan Pangan	N/A	-	78%	79,73%	102,21%	84%
RATA-RATA % CAPAIAN					100,55%			102,21%	

Sumber : *Bagian Organisasi Setda Kota Jambi 2021. (Data diolah)*

Sasaran meningkatnya ketahanan pangan menetapkan 1 (satu) IKU yaitu skor pola pangan harapan namun pada 2021 IKU yang ada di RPJMD tersebut mengalami perubahan dari Skor Pola Pangan Harapan menjadi Indeks Ketahanan Pangan (IKP). PPH itu sendiri merupakan bagian dari Indeks Ketahanan Pangan.

Indeks ketahanan pangan terdiri dari 3 dimensi yaitu dimensi ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan.

Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, IKP Kota Jambi meliputi dua dimensi yaitu keterjangkauan/akses pangan dan pemanfaatan pangan yang dihitung dari 6 indikator yaitu :

1. Rasio luas lahan tanam pertanian (Kota Jambi bukan Daerah Sentra) ;
2. Rasio jumlah sarana prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga;
3. Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan;
4. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik;
5. Persentase rumah tangga tanpa akses air bersih;
6. Rasio jumlah penduduk pertenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk; (dinkes)

Pada rancangan perubahan RPJMD pada tahun 2021 memiliki target IKP sebesar 78 dan realisasi IKP tahun 2021 sebesar 79,73. Di DPKP sendiri Nilai IKP tersebut dapat naik lebih baik dengan adanya program Diversifikasi

dan Ketahanan Pangan Masyarakat, yaitu melalui Penurunan Daerah Rentan Rawan Pangan, Bantuan bibit, Pekarangan Pangan Lestari, dan Pembinaan Desa Mandiri Pangan.

Target skor PPH dalam IKU RPJMD adalah 91,6 dengan realisasi tahun 2021 sebesar 86,7. Realisasi tersebut didapat dari 9 kelompok bahan pangan yang merupakan data skunder dari susenas, yang diinput pada aplikasi harmoni dari badan ketahanan pangan dengan cara mengisi baselane.

Tabel 3.2.67.
Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan

No	Kelompok Pangan	Berat Pangan Gram/ Kapita /Hari	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
			Kkal/ Kapita	%	% AKE*)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	271.9	1,126	55.0	53.6	0.5	27.5	26.8	25.0	25.0
2	Umbi-umbian	50.6	52	2.6	2.5	0.5	1.3	1.2	2.5	1.2
3	Pangan Hewani	144.3	295	14.4	14.0	2.0	28.8	28.0	24.0	24.0
4	Minyak dan Lemak	34.7	311	15.2	14.8	0.5	7.6	7.4	5.0	5.0
5	Buah/Biji Berminyak	1.9	11	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	1.0	0.3
6	Kacang-kacangan	20.6	47	2.3	2.2	2.0	4.6	4.5	10.0	4.5
7	Gula	15.8	60	2.9	2.9	0.5	1.5	1.4	2.5	1.4
8	Sayur dan Buah	248.6	106	5.2	5.1	5.0	25.9	25.3	30.0	25.3
9	Lain-lain	82.6	39	1.9	1.9	-	-	-	-	-
	Total		2,047	100.0	97.5		97.4	95.0	100.0	86.7

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat dari Skor AKE (Angka Kecukupan Energi) dan Skor Maks (Batas Maksimal Konsumsi dari 9 bahan pangan). Semakin besar skor AKE dari skor maks maka konsumsi harus dikurangi. Dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat Kota Jambi masih banyak mengkonsumsi karbohidrat, pangan hewan,minyak dan lemak.

Dalam melakukan perhitungan Skor PPH tersebut terdapat permasalahan diantaranya adalah :

- Masih kurangnya data 2021 digunakan untuk perhitungan tahun 2022 dikarenakan data tahun 2021 tersebut baru diterbitkan dibulan februari tahun 2022. Maka harus dikumpulkan data primer sehingga data yang di sajikan adalah data tahun berjalan sebagai pembanding sementara.
- Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penyerapan sosialisasi mengenai pangan bergizi dan seimbang

Sedangkan solusi untuk meningkatkan nilai Skor PPH tersebut dilakukan adalah :

- Meningkatkan sosialisasi pangan bergizi berimbang secara terus menerus
- Melakukan kegiatan gelar pangan secara berkelanjutan

SASARAN 10 MENINGKATKAN KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PDRB

Sasaran selanjutnya adalah meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi

Tabel 3.2.68.

Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Sasaran ke 10

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		ANGKA AWAL RPJMD	% CAPAIAN 2020	2021			TARGET AKHIR RPJMD
						TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
10.	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	16.	Kontribusi pariwisata terhadap PDRB	2,36%	-6,59%	2,29%	3,15%	137,55%	2,41%
RATA-RATA % CAPAIAN					-6,59%			137,55%	

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi 2021. (Data diolah)

Sasaran ke 10 (sepuluh) meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB menetapkan 1 (satu) IKU yaitu kontribusi pariwisata terhadap PDRB dengan target sebesar 2,29 persen terealisasi sebesar 3,15



persen atau dengan capaian sebesar 137,55 persen, masuk kategori **SANGAT TINGGI**. Hal ini berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan oleh BPS Kota Jambi bahwa Kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dikelompokkan dalam Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi dari sektor Pariwisata ditargetkan pada tahun 2021 sebesar Rp. 47 Milyar. Pada akhir tahun 2021 PAD sektor Pariwisata sebesar 63,02 Milyar Rupiah, mengalami peningkatan sebesar Rp. 16.824.571.070,- atau 132,97 %.

Capaian indikator kinerja pada tahun 2021 dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2020 terdapat peningkatan pada beberapa indikator kinerja.

1. Jumlah kunjungan wisatawan ke kota Jambi pada tahun 2020 berjumlah 297.710 Orang, sedangkan pada tahun 2021 berjumlah 379.184 orang, jadi terjadi kenaikan jumlah kunjungan sebanyak 81.474 Orang atau 27,37 % dari realisasi jumlah kunjungan tahun sebelumnya.
2. Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pariwisata di kota Jambi tahun 2020 berjumlah Rp. 51,30 M, sedangkan pada tahun 2021 berjumlah Rp. 63,20 Milyar, mengalami peningkatan jumlah PAD sektor Pariwisata sebesar Rp. 16.824.571.070,- atau 32,80 % dari PAD sektor Pariwisata tahun sebelumnya.
3. Rata-rata lamanya kunjungan wisatawan di Kota tahun 2020 dan tahun 2021 rata-rata lamanya kunjungan wisata dikota jambi selama 2 hari, tidak mengalami peningkatan.
4. Jumlah Penyelenggaraan Even Seni dan Budaya di kota Jambi tahun 2020 sebanyak 3 Kali, sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 2 kali, mengalami penurunan 1 Kali Even atau 33,33 % dari tahun

sebelumnya.

5. Jumlah Benda Peninggalan Budaya yang di Lestarikan di kota Jambi tahun 2020 dan tahun 2021 berjumlah Rp. 51,30 M, sedangkan pada tahun 2021 tidak mengadakan Pelestarian dan pengembangan Benda Peninggalan Budaya.

Penurunan kinerja dari indikator Kinerja utama tersebut dikarenakan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Covid - 19 di seluruh Indonesia dan dunia dan pengalihan alokasi pendanaan (Recofusing) kepenanganan Covid 19.

SASARAN 11 MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Sasaran kesebelas terkait meningkatkan pendapatan asli daerah yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dalam tahun anggaran 2021 melakukan upaya untuk mewujudkan sasaran ke 11 (kesebelas) dengan melaksanakan Program Peningkatan dan pengelolaan pendapatan daerah.

Tabel 3.2.69.

Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Sasaran ke 11

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		ANGKA AWAL RPJMD	% CAPAIAN 2020	2021			TARGET AKHIR RPJMD
						TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
11.	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	17.	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4,00%	-107,11%	9,00%	7,97	88,55%	9,00%
RATA-RATA % CAPAIAN					-107,11%			88,55%	

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi 2021. (Data diolah)

Sasaran ke 11 (sebelas) meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) menetapkan 1 (satu) IKU yaitu persentase peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dengan target 9,00 persen terealisasi 7,94 persen dengan capaian 88,55 persen termasuk kategori **TINGGI**.



Pada RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023, BPPRD Kota Jambi mengacu pada Misi 4, yaitu Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan, dengan sasaran Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan indikator sasaran Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Realisasi penerimaan PAD Kota Jambi Tahun 2021 mencapai Rp. 384.007.565.070,46 atau 84,58% dari target penerimaan sebesar Rp. 454.001.834.233,00. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan PAD Tahun 2020, yakni sebesar Rp. 355.674.818.034,49 maka PAD Tahun 2021 meningkat sebesar 7,97% atau naik sebesar Rp. 28.332.747.035,97. Tidak tercapainya target peningkatan realisasi PAD pada tahun 2021 yang ditargetkan sebesar 9% dikarenakan aktivitas ekonomi yang melambat akibat pandemi covid-19 yang mengakibatkan penurunan di beberapa sektor pajak seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak reklame.

Tabel 3.2.70.
Rekapitulasi PAD Kota Jambi 2021

No.	Komponen PAD	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	% Peningkatan/ (Penurunan)
1	Pajak Daerah	216.961.981.307,00	244.016.777.518,00	12,47%
2	Retribusi Daerah	40.479.596.104,50	51.844.265.427,60	28,07%
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.602.267.383,48	9.638.772.892,50	0,38%
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	88.630.973.240,51	78.507.749.295,36	(11,42%)
	TOTAL	355.674.818.034,49	384.007.565.070,46	7,96%

Secara umum Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) "**Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah**" dan telah dapat memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan, hal ini tercermin dari tercapainya Target Pajak Daerah Kota



Jambi Tahun 2021 sebesar Rp. 297.860.000,00 terealisasi sebesar Rp. 244.016.777.518 atau sebesar 81,92 %.

Tabel 3.2.71.
Rekapitulasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Jasa Usaha dan PAD yang Sah Kota Jambi 2021

No	Uraian Penerimaan	Target	Realisasi	%
1.	Pajak Hotel	27.720.000.000,00	15.320.685.391,00	55,27
2.	Pajak Restoran	67.160.000.000,00	43.382.842.398,00	64,60
3.	Pajak Hiburan	18.050.000.000,00	4.996.182.012,00	27,68
4.	Pajak Reklame	16.130.000.000,00	11.566.179.668,00	71,71
5.	Pajak Penerangan Jalan	70.000.000.000,00	68.870.350.791,00	98,29
6.	Pajak Parkir	7.300.000.000,00	4.362.161.791,00	59,76
7.	Pajak Air Tanah	1.250.000.000,00	230.372.708,00	18,43
8.	Pajak Sarang Burung Walet	0	0	0
9.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0	0	0
10.	Pajak Bumi dan Bangunan	31.250.000.000,00	30.259.314.517,00	96,83
11.	BPHTB	59.000.000.000,00	65.028.688.242,00	110,22
	Jumlah Pajak Daerah	297.860.000.000,00	244.016.777.518,00	81,92
	Retribusi Jasa Usaha	34.000.000,00	27.700.000,00	81,47
	Jumlah Retribusi Jasa Usaha	34.000.000,00	27.700.000,00	81,47
	Pendapatan Denda Pajak Daerah	1.448.407.502,00	2.672.023.204,00	184,48
	Lain-lain Pad yang Sah	1448.407.502,00	2.672.023.204,00	184,48
	JUMLAH	299.342.407.502,00	246.716.500.721,68	82,42

Secara umum Pajak Daerah yang dikelola Badan Pengelola Pajak dan



Retribusi Daerah Kota Jambi mengalami peningkatan penerimaan di Tahun 2021 sebesar Rp. 246.716.500.721,68 atau 12,83 % dari tahun 2020 yaitu Rp. 218.653.986.560,00.

Permasalahan/kendala yang dihadapi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Daerah yaitu : Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

1. Terbatasnya tenaga teknis dibidang pemeriksaan dan penyidik pajak daerah, juru sita dan tenaga penyuluhan pajak daerah.
2. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak daerah
3. Kesulitan penagihan PBB karena wajib pajak diluar daerah, subjek dan objek pajak tidak ditemukan.
4. Belum adanya kebijakan terkait penghapusan pokok pajak piutang
5. Beberapa sistem aplikasi yang ada masih belum terintegrasi dan masih parsial
6. Adanya Relaksasi Ekonomi yang berpengaruh terhadap pencapaian target pajak seperti pajak Hotel, Hiburan, Parkir dan Air Tanah seperti penerapan PPKM level IV beberapa bulan tahun 2021.

Hambatan dalam piutang :

a. Piutang Pajak Daerah

- 1 Penetapan piutang pajak dari tahun-tahun sebelumnya tanpa didukung Surat Ketetapan Pajak.
- 2 Wajib Pajak pindah tanpa pemberitahuan.
- 3 Wajib Pajak tutup usaha tanpa adanya laporan.
- 4 Lemahnya kemampuan membayar piutang pajak oleh wajib pajak
- 5 Belum adanya kebijakan dalam penghapusan piutang pajak

b. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan

1. Data Tunggal yang tidak valid
2. Wajib Pajak tidak diketahui (*No Name*)
3. Terdapatnya SPPT PBB ganda (*double*) dan Batal
4. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak

Adapun upaya yang dilaksanakan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dalam mengatasi permasalahan yang ada antara lain :

Solusi dalam pencapaian target Pendapatan :

- a. Peningkatan kemampuan SDM aparatur dengan mengikuti sertan pegawai Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Jambi untuk mengikuti Diklat/Bimbingan Teknis yang berkaitan dengan masalah perpajakan.
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak melalui kegiatan sosialisasi/penyuluhan akan kegunaan pembayaran pajak.
- c. Melakukan pemasangan stiker pengawasan dan peringatan sebagai sanksi kepada wajib pajak.
- d. Merevisi Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Walikota (Perwal) tentang Pajak Daerah yang disesuaikan dengan kondisi lapangan
- e. Memaksimalkan sistem aplikasi yang terintegrasi.
- f. Memaksimalkan alat pemantauan pajak pada objek pajak.
- g. Melakukan inovasi dalam pajak daerah

Solusi dalam piutang :

- a. Melakukan pendataan ulang/pemutakhiran data PBB sehingga tidak ada SPPT ganda (*double*)
- b. Memaksimalkan penagihan terhadap wajib pajak
- c. Meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo untuk mengurangi jumlah piutang.

- d. Melakukan penghapusan bukuan piutang berdasarkan pertimbangan dan peraturan yang ada.
- e. Melakukan pemeriksaan lapangan untuk menguji kebenaran data tunggakan.
- f. Perlu Peraturan Walikota tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah.

SASARAN 12
MENINGKATKAN REALISASI INVESTASI

Sasaran dua belas terkait meningkatkan realisasi investasi yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi dalam tahun anggaran 2021 melakukan upaya untuk mewujudkan sasaran ke 11 (kesebelas) dengan melaksanakan Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi.

Tabel 3.2.72.

Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Sasaran ke 12

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		ANGKA AWAL RPJMD	% CAPAIAN 2020	2021			TARGET AKHIR RPJMD
						TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
12.	Meningkatkan realisasi investasi	18.	Realisasi investasi	410 M	68,39%	474,62 M	653,17 M	137,62%	523,37 M
RATA-RATA % CAPAIAN					68,39%			137,62%	

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi 2021. (Data diolah)

Indikator Kinerja Utama Realisasi Investasi yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi menetapkan target sebesar 474,62 M pada tahun 2021, terealisasi sebesar 653,17 M, persentase capaian sebesar 137,62 persen masuk dalam kategori **SANGAT TINGGI**.

Tabel 3.2.73.

Rumusan Indikator dan formulasi Perhitungan 2021

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2020
--------	------------	------------	------------



Target Realisasi Investasi (Renstra/RPJMD)	430.500.000.000	474.620.000.000	
Realisasi Investasi	249.446.980.393	653.179.560.000	
Peningkatan Realisasi Investasi		161.85	$\frac{RI\ 2021 - RI\ 2020}{RI\ 2020} \times 100\%$
Capaian Target Realisasi		137.62	$\frac{R.\ Investasi\ 2021}{RI\ Target} \times 100\%$

Dari LKPM didapat Realisasi Penanaman Modal sebesar **RP. 653.179.560.000.-** atau **137,62 %** untuk periode Januari s/d Desember 2021 (pertanggal 27 Januari 2021) dengan status sudah disetujui dan sudah diverifikasi oleh BKPM dari 1911 proyek yang Target Realisasi Investasi pada tahun 2021 sebesar **Rp.474.620.000.000.**

Tabel 3.2.74.
Jumlah Investasi Di Kota Jambi Tahun 2021

Triwulan	Jumlah Investasi	Proyek	TKI	TKA
PMA TW I	7.756.980.000	14	1	2
PMDN TW I	414.322.700.000	743	771	
PMA TW II	36.457.660.000	9		
PMDN TW II	24.184.700.000	445	159	
PMA TW III	14.413.120.000	15		
PMDN TW III	48.832.700.000	405	332	
PMA TW IV	46.654.300.000	14		
PMDN TW IV	60.557.400.000	267	190	
Total	653.179.560.000	1.911	1.453	2

Dari LKPM, Realisasi Investasi di Kota Jambi untuk periode Januari s/d Desember 2021, telah melebihi target yang telah ditetapkan sebesar **RP.653.179.560.000.-** atau **137,62%** dengan status sudah disetujui dan

sudah diverifikasi oleh BKPM dari 1911 proyek yang melapor (*sumber data dari NSWI*).

Tabel.3.2.75.
Data Izin yang diterbitkan Tahun 2021

NO.	IZIN USAHA TERBIT	IZIN REGISTRASI	IZIN USAHA PERAWAT & SEJENISNYA	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
1.	2.602	3.421	2.954	4246

**SASARAN 13
MENINGKATKAN PENYERAPAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA**

Sasaran ke 13 (ketiga belas) terkait meningkatkan penyerapan dan perlindungan tenaga kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi dalam tahun anggaran 2021 melakukan upaya untuk mewujudkan sasaran ke 13 (ketiga belas) dengan melaksanakan Program Peningkatan kualitas, perlindungan dan produktivitas tenaga kerja.

Tabel 3.2.76.
Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Sasaran ke 13

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		ANGKA AWAL RPJMD	% CAPAIAN 2020	2021			TARGET AKHIR RPJMD
						TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
13.	Meningkatkan penyerapan dan perlindungan tenaga kerja	19.	Tingkat Pengangguran Terbuka	N/A	-	10,37%	10,66%	97,2%	8,98%
RATA-RATA % CAPAIAN					98,27%			97,2%	

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi 2021. (Data diolah)

Pada Renstra Murni tahun 2019-2023, indikator kinerja pertama adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dengan realisasi 63,12%. Namun guna mempertajam capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota



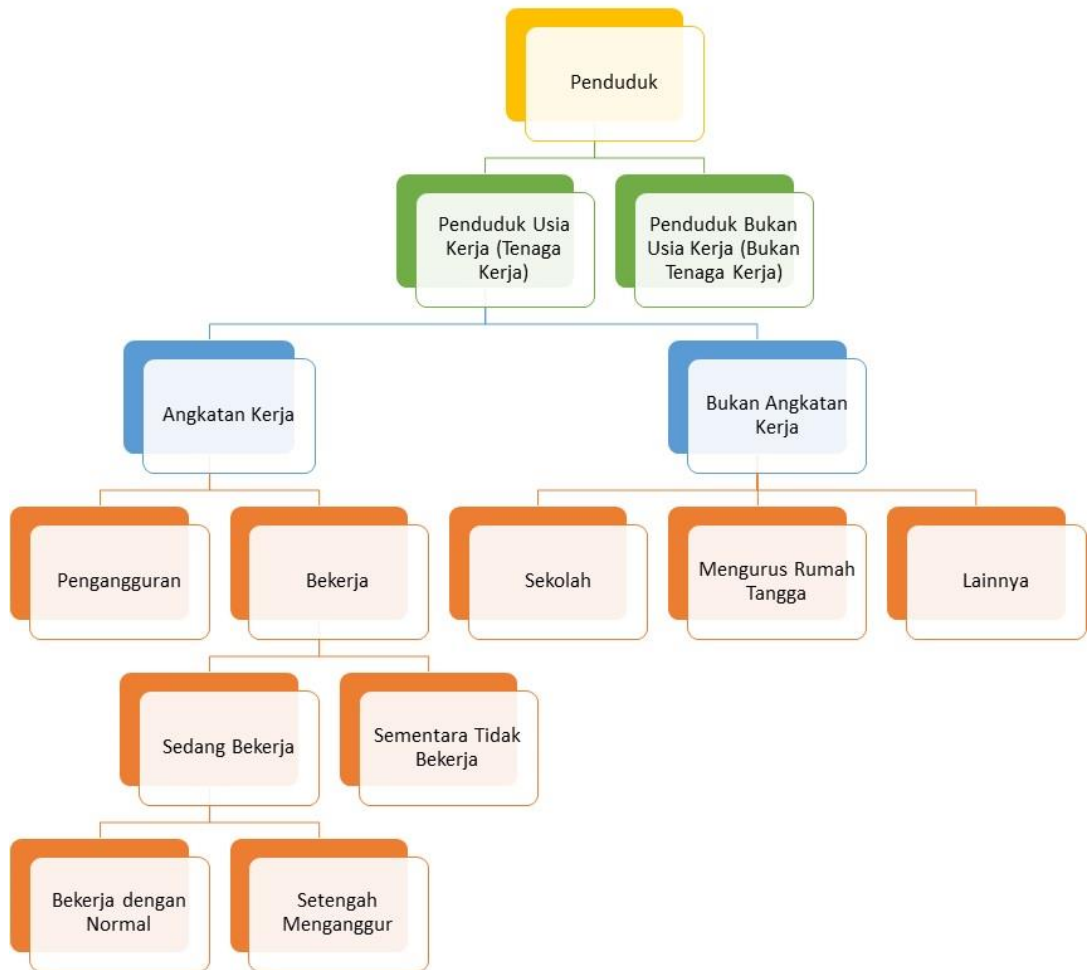
Jambi, dalam Renstra perubahan tahun 2019-2023, ditetapkan perubahan indikator pertama pada urusan ketenagakerjaan, yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka, dengan rumus pengukuran serta capaian tahun 2021, sebagai berikut :

$$\frac{\text{jumlah pengangguran terbuka}}{\text{jumlah angkatan kerja}} \times 100\% = \frac{31.375}{294.349} \times 100\% = 10,66 \%$$

Ditahun 2021, jumlah pengangguran terbuka di Kota Jambi sebesar 31.375 jiwa, sedangkan jumlah angkatan kerja sebesar 294.349 (sumber : BPS Kota Jambi). Dari data tersebut, diperoleh tingkat pengangguran terbuka sebesar 10,66%. Angka ini melampaui penetapan target sebesar 10,37%. Faktor penyebab naiknya tingkat pengangguran terbuka ini, terutama dikarenakan adanya pandemi covid 19 yang berdampak langsung pada roda perekonomian ditengah masyarakat. Banyaknya perusahaan yang mengurangi jumlah karyawan baik dirumahkan sementara maupun di-PHK, penutupan usaha oleh pemilik, yang berakibat pada minimnya lowongan kerja yang dapat diakses pencari kerja, menjadi faktor utama naiknya tingkat pengangguran terbuka di Kota Jambi (TPT tahun 2020 : 10,49%).

Selain itu faktor masih minimnya keahlian pencaker (low skill) untuk berkompetisi di pasar kerja dan dunia usaha, masih menjadi penyebab sulitnya mengurangi angka pengangguran.

Konsep perhitungan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) oleh Badan Pusat Statistik, serta korelasinya dengan tuksi Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM, dapat dilihat dari bagan berikut:



Dapat dijelaskan bahwa:

- Angkatan Kerja adalah penduduk usia 15 tahun keatas yang aktif mencari pekerjaan atau yang bekerja.
- Penduduk Usia Kerja adalah penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja maupun yang tidak bekerja (tidak bekerja : pelajar, Ibu rumah tangga, kelompok penerima pendapatan seperti lansia). Angkatan kerja terdiri dari 2 (dua) variable, Pengangguran dan Bekerja.



- Pengangguran terdiri dari : penduduk yang bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, penduduk yang mempersiapkan usaha, penduduk yang merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa), penduduk yang sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Dari bagan tersebut, dapat dijelaskan kontribusi Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM adalah :

- mengadakan pelatihan berbasis kompetensi bagi penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan,
- memberikan layanan antar kerja bagi pencari guna mengisi formasi lowongan kerja pada informasi pasar kerja,
- membina Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) sebagai mitra dalam pelaksanaan pelatihan bagi pencari, sekaligus lembaga yang berperan langsung dalam meningkatkan keahlian (skill) masyarakat umum yang membutuhkan.

Kegiatan ini dilakukan untuk mengurangi angka pengangguran (tabel merah) menjadi angka bekerja (tabel hijau). Selain kegiatan tersebut, juga melaksanakan upaya agar angka Bukan Angkatan Kerja (tabel biru) berkurang dan beralih ke angka Angkatan Kerja. Upaya-upaya yang dilakukan, yaitu :

- pembinaan terhadap Bursa Kerja Khusus (BKK) yang ada di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) agar siswa yang telah menyelesaikan sekolah dan belum/tidak meneruskan ke jenjang Perguruan Tinggi, untuk aktif mencari pekerjaan atau membuka usaha (variabel : sekolah).
- melaksanakan koordinasi dengan bidang UMKM untuk memotivasi penduduk yang mengurus rumah tangga dan yang tidak sekolah/tidak mencari kerja/tidak menyiapkan usaha (variabel : lainnya) untuk meningkatkan keahlian melalui pelatihan wirausaha pemula guna



mencari pekerjaan atau membuka usaha.

Dapat dijelaskan bahwa **Angkatan Kerja** adalah penduduk usia 15 tahun keatas yang aktif mencari pekerjaan atau yang bekerja. **Penduduk Usia Kerja** adalah penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja maupun yang tidak bekerja (tidak bekerja : pelajar, Ibu rumah tangga, kelompok penerima pendapatan seperti lansia). Penduduk usia kerja akan terus bertambah setiap tahun seiring dengan penambahan penduduk.

Pandemi covid 19 yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dapat menjadi faktor menurunnya tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), dikarenakan menurunnya jumlah angkatan kerja akibat dampak banyaknya terjadinya PHK dan penutupan usaha, sementara jumlah penduduk usia kerja terus bertambah. Sehingga dapat disimpulkan untuk tahun 2021, jumlah angkatan kerja tidak berbanding lurus dengan jumlah penduduk usia kerja.

Untuk mencapai target tingkat partisipasi angkatan kerja dilaksanakan beberapa pelatihan dan sosialisasi sebagai berikut yaitu :

- a) Pelatihan Menjahit : 1 angkatan : 20 orang
- b) Pelatihan Teknisi Komputer : 1 angkatan : 20 orang
- c) Pelatihan Teknisi AC : 1 angkatan : 20 orang
- d) Pelatihan Las Listrik : 1 angkatan : 20 orang
- e) Sosialisasi Pembinaan LPK : 1 angkatan : 25 LPK
- f) Sosialisasi Pembinaan Perusahaan /UKM : 1 angkatan : 25 Perusahaan/
UKM

**SASARAN 14 MENINGKATKAN DAYA SAING USAHA
SKALA MIKRO DAN KECIL**

Sasaran ke 14 (keempat belas) terkait meningkatkan penyerapan dan perlindungan tenaga kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi

dan UKM Kota Jambi dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dalam tahun anggaran 2021.

Tabel 3.2.77.

Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Sasaran ke 14

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		ANGKA AWAL RPJMD	% CAPAIAN 2020	2021			TARGET AKHIR RPJMD
						TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
14.	Meningkatkan daya saing usaha skala mikro dan kecil	20.	Persentase usaha mikro kecil yang berkualitas	100,0%	9,02%	9,02%	100,00%	100,00%	10,00%
		21.	Persentase daya saing produk IKM	52,34%	6,5%	1,64%	25,23%	52,34%	8,3%
		22.	Persentase koperasi berkualitas	101,4%	23,85%	26,36%	110,52%	101,46%	36,70%
RATA-RATA % CAPAIAN					13,12%			84,60%	

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi 2020. (Data diolah)

IKU kedua puluh menetapkan persentase usaha mikro kecil yang berkualitas dengan target 9,02 persen terealisasi 100,00 persen dengan capaian sebesar 100,00 persen termasuk kategori **SANGAT TINGGI**. Pengukuran pencapaian persentase usaha mikro kecil yang berkualitas yaitu jumlah UKM berkualitas sebanyak 970 UKM dibandingkan dengan jumlah UKM sebanyak 10.763 UKM dikali 100 persen. Dan realisasi capaian sebesar 9,02 persen dari target yang ditetapkan sebesar 9,02 persen. Berdasarkan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja Kopersai dan UKM Kota Jambi Nomor 135 Tahun 2020 tanggal 24 November 2020, standar penilaian UKM berkualitas adalah:

- Memiliki kelengkapan izin usaha dan sertifikat kelayakan usaha lainnya
- Memiliki tempat usaha dan kelengkapan sarana dan prasarana usaha yang memadai
- Mempunyai modal usaha dan telah melaksanakan manajemen pembukuan usaha
- Telah melaksanakan prinsip-prinsip manajemen usaha dan memiliki rencana kerja



- Mampu mengembangkan produk dan pemasaran produk

Data UMKM yang diprioritaskan untuk dibina selama 5 tahun RENSTRA (2019-2023), dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.2.78.

Rekapitulasi Usaha Mikro dan Kecil Kota Jambi

No	Kecamatan	Rekapitulasi UMKM	UMKM PERBIDANG USAHA				
			Kuliner	Fashion	Dagang/ Industri	Jasa	Pertanian/ peternakan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Telanaipura	1.195	380	14	470	234	97
2	Jambi Selatan	847	13	26	97	670	172
3	Jambi Timur	1.423	469	3	640	283	28
4	Pasar Jambi	929	354	0	5.117	54	4
5	Pelayangan	601	92	31	302	147	43
6	Danau Teluk	656	271	50	219	142	27
7	Kota Baru	736	494	0	14	228	0
8	Jelutung	553	53	0	442	46	12
9	Alam Barajo	1.116	159	17	377	291	88
10	Danau Sipin	1.592	1.578	1.195	16	125	73
11	Paal Merah	1.115	324	1	360	302	128
Jumlah		10.763	3.804	158	3.607	2.522	672

IKU ke 21 (dua puluh satu) persentase daya saing produk IKM, dengan target 6,5 persen terealisasi 1,64 persen dengan capaian 25,23 persen. Suatu prestasi kerja yang kurang baik karena realisasi kinerja tidak sesuai dengan target yang ditetapkan hal ini disebabkan anggaran yang sangat terbatas dan dalam suasana pandemic covid 19, dengan demikian nilai capaian kinerja indikator sasaran RPJMD ini **sangat rendah** (interval penilaian ≤ 50).

Untuk implementasi pencapaian indikator kinerja sasaran ini bergantung dari capaian kinerja 3 (tiga) indikator kinerja program yang merupakan urusan perindustrian. Realisasi indikator kinerja program inilah

yang menentukan tercapainya realisasi indikator sasaran ini. Dalam artian bahwa capaian kinerja sasaran ini bergantung pada capaian kinerja program sebagaimana dimaksud.

Adapun formulasi yang dipergunakan untuk menghitung capaian kinerja sasaran ini yaitu :

Capaian rata-rata realisasi indikator program tahun pelaksanaan (tahun n) dibagi dengan target sasaran tahun pelaksanaan (tahun n) dikalikan 100 %.

$$\frac{\text{Atau}}{\text{Capaian rata – rata realisasi indikator program tahun pelaksanaan}} \times 100\% \\ \text{Target indikator kinerja sasaran (tahun n)}$$

Berdasarkan rumusan diatas maka dapatlah diketahui realisasi kinerja indikator sasaran yaitu :

$$\frac{1.64 \%}{6.5 \%} \times 100 \% = 25,23 \%$$

Ketidaktercapaian target kinerja sasaran ini disebabkan :

- a) Keterbatasan anggaran akibat rasionalisasi.
- b) Wabah covid 19 sebagai penyebab yang krusial.
- c) PPKM juga menyebabkan terbatasnya pergerakan ASN dalam melaksanakan rencana aksi.
- d) Kurang kooperatifnya masyarakat dan juga tidak memahami regulasi sehingga dianggap pemerintah membuat mereka susah untuk berusaha.
- e) Kelemahan secara internal adalah tidak dilakukannya perubahan target kinerja dalam Renja Perubahan Tahun 2021 dan RKA/DPA Perubahan Tahun 2021, sementara anggaran untuk pencapaian kinerja dimaksud telah dirasionalisasi sehingga rencana aksinya tidak dapat dilaksanakan.

IKU ke 22 persentase koperasi berkualitas, dengan target sebesar



23,85 persen terealisasi 26,36 persen dengan capaian 110,52 persen termasuk kategori **SANGAT TINGGI**. Pengukuran pencapaian persentase koperasi berkualitas adalah jumlah koperasi berkualitas dibagi jumlah koperasi aktif di kali 100 persen. Di akhir tahun 2021, jumlah koperasi berkualitas sebanyak **58 koperasi** dengan jumlah koperasi aktif sebanyak **220 koperasi**. Ditahun 2021, jumlah koperasi berkualitas bertambah **15 koperasi** dari 2020 sebanyak 43 koperasi hingga total jumlah koperasi berkualitas pada akhir 2021 menjadi **58 koperasi**.

Tercapainya Peningkatan jumlah koperasi berkualitas tersebut di atas melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan Bidang Perkoperasian dari Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi.

Faktor pendorong yang memicu bertambahnya koperasi berkualitas tahun 2021 dari jumlah seluruh koperasi yang ada di Kota Jambi adalah melalui Pembinaan yang dilakukan secara kontinyu oleh Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kota Jambi khususnya Bidang Perkoperasian dalam rangka pembinaan kelembagaan, usaha hingga SDM pengelola Koperasi. Koperasi dikategorikan berkualitas, jika telah memenuhi persyaratan berikut :

- Memiliki sarana kantor dan usaha koperasi
- Tertib administrasi (memiliki buku 16)
- Penyelenggaraan rapat anggota, rapat pengurus, rapat pengawas, dan/atau rapat gabungna dalam 1 tahun
- Melaksanakan RAT
- Memiliki rencana kerja (RK) dan rencana anggaran pendapatan belanja koperasi (RAPBK)
- Peningkatan jumlah anggota
- Memiliki dana pendidikan
- Memiliki dana sosial

- Penyelenggaraan audit
- Laporan keuangan yang sehat untuk KSP/USP

Maju atau mundurnya perkembangan Koperasi, juga dipengaruhi oleh keaktifan para anggota, profesionalitas pengurus dan pembinaan dari pemerintah. Ketiga hal itu harus sejalan agar perkembangan suatu Koperasi dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, guna meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat sekitar pada umumnya, sebagai salah satu gerakan ekonomi kerakyatan yang turut memberi andil dalam peningkatan ekonomi suatu wilayah, Koperasi diharapkan mampu memberi kontribusi lebih dalam menyeimbangkan perekonomian masyarakat menengah, terutama saat pandemi covid 19 seperti saat ini yang dampaknya sangat dirasakan. Untuk itulah Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM berupaya terus meningkatkan kualitas pembinaan terhadap gerakan Koperasi melalui kegiatan-kegiatan yang merupakan kesinambungan dari tahun anggaran sebelumnya.

**SASARAN 15
MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN**

Sasaran ke 15 (kelima belas) terkait meningkatkan derajat kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Jambi dalam tahun anggaran 2021. Dalam mewujudkan sasaran ke 15 (kelima belas) didukung oleh program akses dan mutu pelayanan masyarakat.

Tabel 3.2.79.

Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Sasaran ke 15

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGKA AWAL RPJMD	% CAPAIAN 2020	2021			TARGET AKHIR RPJMD
					TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	



15.	Meningkatkan derajat kesehatan	23.	Angka Harapan Hidup (AHH)	72,34%	100,41%	72,36	72,71	100,48	72,37%
RATA-RATA % CAPAIAN					100,41%			100,48%	

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi 2021. (Data diolah)

IKU kedua puluh tiga, angka harapan hidup (AHH) dengan target 72,36 persen terealisasi 72,71 persen atau dengan capaian 100,48 persen masuk kategori **SANGAT TINGGI**.

Angka Harapan Hidup (AHH) dihitung dan dipublikasikan oleh BPS berserta tim pakar di pusat. AHH menjadi salah satu indikator yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia. AHH sendiri di pengaruhi oleh angka kematian ibu, angka kematian bayi serta angka kesakitan.

AHH 72,71 sendiri menunjukkan arti bahwa bayi yang lahir pada 2021 kemungkinan akan hidup sampai umur 72,71 tahun.

Angka Harapan hidup ditentukan oleh besarnya angka jumlah kematian bayi. Jika kematian bayi jumlahnya besar, usia harapan hidup akan rendah. Oleh karenanya, biasanya di negara-negara maju harapan hidupnya tinggi karena pada umumnya tingkat kesehatan ibu dan bayinya tinggi. Sebaliknya dinegara berkembang biasanya relatif rendah karena buruknya tingkat kesehatan.

Untuk Kota Jambi sendiri capaian AHH 99,97 persen atau masuk kategori sangat tinggi.

Berikut upaya yang dilakukan Dinkes untuk meningkatkan AHH tersebut:

1. Pelaksanaan Program kesehatan ibu dan anak, dengan inovasi Sikomo.
2. Pelaksanaan program kesehatan gizi terutama utk 1000 Hari Pertama Kehidupan
3. Pelaksanaan Germas di masyarakat
4. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

- 5. Penyehatan lingkungan dan sanitasi
- 6. Pengendalian penyakit menular dan tdk menular

Tabel 3.2.80.
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Jambi

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase masyarakat yang tidak mampu yang dijamin asuransi kesehatannya	%	100	100	100
2	Persentase Puskesmas dan Rumah sakit pemerintah yang terakreditasi	%	100	95.45	95.45
3	Terpenuhinya standar sarana prasarana dan alat kesehatan rumah sakit pemerintah dan puskesmas	%	40	40	100
4	Menurunkan jumlah kematian ibu melahirkan	jiwa	0	1	-
5	Menurunkan jumlah kematian bayi	jiwa	0	3	-
6	Menurunkan angka penyakit menular dan tidak menular	%	100	100	100

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

1. Capaian kinerja yang memenuhi target ditunjukkan pada indikator Persentase masyarakat yang tidak mampu yang dijamin asuransi kesehatannya, dengan capaian kinerja 100%, pada indikator Terpenuhinya standar sarana prasarana dan alat kesehatan rumah sakit pemerintah dan puskesmas, dengan capaian kinerja 100%, pada indikator Menurunkan angka penyakit menular dan tidak menular, dengan capaian kinerja 100%.

2. Capaian kinerja yang tidak mencapai target 100% ditunjukkan pada indikator Persentase Puskesmas dan Rumah sakit pemerintah yang terakreditasi, dengan capaian kinerja 95.45%, pada indikator Menurunkan jumlah kematian ibu melahirkan dengan capaian kinerja 0, pada indikator Menurunkan jumlah kematian bayi dengan capaian kinerja 0.

**SASARAN 16
MENINGKATKAN KUALITAS DAN AKSESIBILITAS
PENDIDIKAN**

Sasaran ke 16 (keenam belas) terkait meningkatkan derajat kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Jambi dalam tahun anggaran 2021. Dalam mewujudkan sasaran ke 16 (keenam belas) didukung oleh program akses dan mutu pelayanan masyarakat.

Tabel 3.2.81.

Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Sasaran ke 16

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGKA AWAL RPJMD	% CAPAIAN 2020	2021			TARGET AKHIR RPJMD
					TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
16.	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan	24. Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,25%	103,35%	15,11	15,37	101,72	15,14%
		25. Persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan pelayanan pendidikan	21,32%	100,00%	12,32	12,32	100,00%	4,32%
		26. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,68%	102,15%	10,93	11,20	102,15%	10,72%
RATA-RATA % CAPAIAN				107,83%			101,29%	

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi 2021. (Data diolah)

Indikator Sasaran Harapan Lama Sekolah (HLS) memiliki target sebesar 15,11 pada tahun 2021, dan mencapai realisasi sebesar 15,37. Perhitungan HLS dilaksanakan dengan menggunakan formulasi jumlah

penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t dibagi dengan jumlah penduduk usia i pada tahun t dikali dengan faktor koreksi pesantren.

Tabel 3.2.82.
Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Jambi Tahun 2021

Umur (th)	Jumlah Penduduk k (Pi)	Jumlah Penduduk yang Bersekolah (Ei)	Rasio (Ei/Pi)
7	9,298	9,251	1.0
8	9,346	9,479	1.0
9	9,407	9,301	1.0
10	9,475	9,187	1.0
11	9,543	9,855	1.0
12	9,606	9,015	0.9
13	9,660	8,971	0.9
14	9,703	8,793	0.9
15	9,734	7,714	0.8
16	9,758	6,513	0.7
17	9,781	6,626	0.7
18	9,804	6,155	0.6
19	9,827	7,155	0.7
20	9,852	7,025	0.7
21	9,879	7,155	0.7
22	9,905	7,155	0.7
23	9,931	7,040	0.7
24	9,954	6,450	0.6
			14.78
<i>Faktor Koreksi Pesantren</i>			1.04
HARAPAN LAMA SEKOLAH (HLS)			15.37

Faktor Koreksi Pesantren dengan rasio sebesar 1.04, dimana jumlah santri mukim dan tidak mukim sebanyak 6,977 orang.

$$FK = \frac{\text{Jumlah santri sekolah dan mukim}}{\text{Jumlah penduduk umur 7 tahun keatas}} + 1$$

$$FK = \frac{6.977}{174.464} + 1$$

$$FK = 0.04+1 \quad FK = 1.04$$

Indikator Persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan pelayanan Pendidikan memiliki target sebesar 12,32 pada tahun 2021 dengan realisasi sebesar 12,32. Perhitungan indikator tersebut dilaksanakan dengan menggunakan formulasi jumlah masyarakat miskin yang mendapat bantuan pendidikan dibagi dengan jumlah masyarakat miskin yang bersekolah dikali seratus persen, dengan sasaran adalah sesuai arah kebijakan awal yaitu siswa miskin yang mendapatkan Kartu Jambi Cerdas (KJC).

Tabel 3.2.83.
Masyarakat Tidak Mampu yang Mendapat Jaminan Pelayanan Pendidikan Tahun 2021

Jenjang	Siswa Miskin Yang Mendapat Bantuan	Jumlah Siswa Miskin Yang Mendapat Bantuan	Masyarakat Miskin yang Bersekolah (Swasta/Yayasan)
	KJC		
SD	595	1,204	9,775
SMP	609		
JUMLAH		1,204	9,775
<i>Masyarakat Miskin yang Belum Mandapat Bantuan</i>			12.32%
<i>Target Bantuan Siswa Miskin</i>			12.32%
Capaian 2021 :			100%

Sedangkan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) memiliki target sebesar 10,93 pada tahun 2021, dengan realisasi sebesar 11,20. Perhitungan RLS dilaksanakan dengan menggunakan formulasi lama sekolah penduduk ke *i* di suatu wilayah dibagi jumlah penduduk.

Tabel 3.2.84.
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Jambi tahun 2021

Wilayah	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)		
	2019	2020	2021
PROVINSI JAMBI	8,45	8,55	8,60
KERINCI	8,21	8,55	8,56
MERANGIN	7,68	7,76	7,90
SAROLANGUN	7,76	7,87	8,04
BATANGHARI	7,85	8,11	8,12
MUARO JAMBI	8,33	8,57	8,58
TANJUNG JABUNG TIMUR	6,35	6,70	6,92
TANJUNG JABUNG BARAT	7,70	7,71	8,00
TEBO	7,57	7,58	7,59
BUNGO	8,15	8,27	8,28
KOTA JAMBI	10,91	10,92	11,20
KOTA SUNGAI PENUH	10,08	10,32	10,33

Sumber : <https://jambi.bps.go.id/indicator/26/42/1/rata-rata-lama-sekolah.html>

SASARAN 17
MENGENDALIKAN ANGKA KELAHIRAN PENDUDUK

Sasaran ke 17 (ketujuh belas) mengendalikan angka kelahiran penduduk oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Jambi. Sasaran 17 menetapkan 2 indikator kinerja utama yaitu:

Tabel 3.2.85.
Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Sasaran ke 17

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGKA AWAL RPJMD	% CAPAIAN 2020	2021			TARGET AKHIR RPJMD
					TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	



17.	Mengendalikan angka kelahiran penduduk	27.	Laju pertumbuhan penduduk	N/A	95,24	1,03	0,74	128,16%	1,01%
		28.	Persentase jumlah keluarga sejahtera	N/A	99,52%	96,69%	96,83%	100,14%	97,15%
RATA-RATA % CAPAIAN					102,14%			85,99%	

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi 2021. (Data diolah)

IKU kedua puluh tujuh laju pertumbuhan penduduk, dengan target 1,03% terealisasi 0,74 atau dengan capaian 128,16 dengan menggunakan perhitungan realisasi indikator semakin rendah maka capaian akan semakin tinggi sehingga termasuk dalam kategori **SANGAT TINGGI**.

Laju Pertumbuhan Penduduk adalah angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Secara definitif, pertumbuhan penduduk adalah penambahan atau pengurangan jumlah penduduk. Faktor penyebabnya adalah jumlah kelahiran (natalitas), kematian (mortalitas), serta perpindahan (migrasi) antara satu daerah ke daerah lain.

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Jambi untuk Tahun 2021 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Jambi yaitu 0,74 menunjukkan bahwa di tahun 2021 terdapat 0,74% pertumbuhan penduduk dimana Kota Jambi berada di bawah rata-rata nasional yaitu 1,25%.

Untuk persentase realisasi Kota Jambi yaitu sebesar 128,16% dan ini melebihi dari target, hal ini salah satu penyebabnya adalah antara lain karena mampu menurun angka kelahiran atau TFR (Total Fertiliti Rate) dari 2,4 anak per Wanita Usia Subur (WUS) pada Tahun 2020 menurun menjadi 2,1 anak per Wanita Usia Subur (WUS) pada Tahun 2021 dan Kota Jambi melebihi target UKP yaitu 22 Tahun serta kebijakan pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan.

Hal ini juga didukung oleh pelayanan yang dilakukan oleh Dinas



Pengendalian Penduduk Kota Jambi yaitu memberikan pelayanan 33 (tiga puluh tiga) kali dalam 1 (satu) Tahun di semua Kecamatan dalam Kota Jambi yang dipusatkan pada tempat/Lokasi yang telah ditentukan dengan menggunakan Mobil Pelayanan. Sedangkan untuk Aseptor yang bermasalah pasca pelayanan akan di antar jemput dengan menggunakan Mobil Antar - Jemput Aseptor sehingga Masyarakat yang membutuhkan pelayanan KB dapat terakomodir dengan mudah. Selain itu pemberian pelayanan kontrasepsi KB yang merupakan salah satu program yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Untuk memberi kemudahan akses pelayanan kepada masyarakat dan mengembangkan agar cakupan dan kesertaan KB khususnya KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) semakin meningkat. Pelayanan KB ini dapat dilakukan di Klinik Pratama KB Angso Duo. Ini merupakan upaya strategi untuk meningkatkan akses pelayanan KB yang berkualitas dan memberi kontribusi positif dalam pembinaan dan pengembangan keluarga dan juga berdampak positif kepada masyarakat luas khususnya masyarakat Kota Jambi.

Selain itu adanya Inovasi-inovasi yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mendukung dimasa pandemic covid yaitu Sidaka KB Aplikasi SIDAKA KB (Sistem Informasi Pendaftaran dan Konsultasi Aseptor Keluarga Berencana) yaitu cara mendaftar untuk Aseptor (baru, ulang dan ganti cara) pemasangan/konsultasi terkait alat kontrasepsi dan ini memberi kemudahan, efisien dan efektif serta untuk mengurangi mobilisasi dan menghindari kerumunan. Selain itu ada juga inovasi yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu berupa Ajak (Antar Jemput Alat Kontrasepsi) yaitu dengan cara Kader mendata masyarakat yang ada disekitar rumahnya. Apabila masyarakat itu ingin menggunakan alat kontrasepsi berupa Pil dan Kondom maka kader mengajukan jumlah kebutuhan Pil dan Kondom masyarakat tersebut kepada

Koordinator PLKB kemudian Koordinator PLKB merekap dan mengajukan Pil dan Kondom tersebut ke Dinas Pengendalian Pnduduk dan Keluarga Berencana melalui Bidang Pembinaan Keluarga Berencana, kemudian Koordinator PLKB mengantarkan Pil dan Kondom kepada kader untuk didistribusikan ke Masyarakat.

Sedangkan untuk Persentase Jumlah keluarga Sejahtera pada Tahun 2021 dari Target 96,69 % dan terealisasi sebesar 96,83 % data tersebut didapat dari Pendataan Keluarga di Tahun 2021 (PK21), dimana Jumlah keluarga sejahtera yaitu 131.581 keluarga dibagi dengan jumlah keluarga sejahtera yg di surve yaitu 135.876 keluarga dikali dengan 100% dengan kata lain hampir mendekati sama atau dengan realisasi melebihi dari target sehinga persentase realisasi yaitu sebesar 100,14% , yaitu keberhasilan ini dapat dilihat dari beberapa aspek pengendalian kuantitas penduduk dan aspek peningkatan kualitas penduduk yang dalam bal ini diukur dengan peningkatan dan kesejahteraan keluarga. dimana kondisi keluarga sejahtera semakin membaik dikarenakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi telah melakukan pembinaan dan edukasi terkait peningkatan ekonomi keluarga melalui Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan UPPKA) dan adanya evaluasi serta lomba-lomba bagi Kelompok Kegiatan (Poktan).

Untuk Laju Pertumbuhan Penduduk dan Persentase Keluarga Sejahtera dapat kita sandingkan dengan data sebagai berikut.

Tabel 3.2.86.
Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kota Jambi Tahun 2013-2020

Tahun	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan
2013	556.332	3.63
2014	568.062	2.11
2015	576.067	1.41
2016	583.487	1.29
2017	591.134	1.31
2018	598.103	1.18

2019	604.736	1.11
2020	606.200	0.24
		1.54

Sumber: BPS Kota Jambi, 2021 (Data diolah)

SASARAN 18 MENINGKATKAN KESETARAAN GENDER

Sasaran ke 18 (kedelapan belas) terkait meningkatkan kesetaraan gender dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Anak Kota Jambi dalam tahun anggaran 2021. Sasaran 18 (kedelapan belas) menetapkan 2 (dua) indikator kinerja utama, berikut:

Tabel 3.2.87.

Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Sasaran ke 18

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		ANGKA AWAL RPJMD	% CAPAIAN 2021	2021			TARGET AKHIR RPJMD
						TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
18.	Meningkatkan kesetaraan gender	29.	Indeks pembangunan gender	94,89	99,73%	94,93	94,42	99,73%	94,95
		30.	Indeks pemberdayaan gender	68,07	102,39%	68,30	-		68,50
RATA-RATA % CAPAIAN					81,48%			101,33%	

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi 2021. (Data diolah)

Iku kedua puluh sembilan indeks pembangunan gender, dengan target 94,93 terealisasi dengan angka 94,42 atau tercapai 99,73 persen masuk dalam kategori **SANGAT TINGGI**, dengan penghitungan dan data pendukung indeks pembangunan gender bersumber dari UNDP dengan

Tabel 3.2.88.

IPG Provinsi Jambi Tahun 2021

Wilayah	Indeks Pembangunan Gender (IPG)										
	AHH laki-laki	AHH Perempuan	EYS Laki-laki	EYS Perempuan	MYS Laki-laki	MYS Perempuan	Pengeluaran per kapita laki-laki	Pengeluaran perkapita perempuan	IPM Laki-laki	IPM perempuan	IPG
TEBO	67,96	71,98	12,62	12,82	8,22	7,26	15 388,00	8 602,00	73,92	66,82	90,40
TANJUNG JABUNG TIMUR	64,42	68,23	11,84	12,69	7,25	6,56	14 806,00	6 349,00	69,68	60,92	87,43



Wilayah	Indeks Pembangunan Gender (IPG)										
	AHH laki-laki	AHH Perempuan	EYS Laki-laki	EYS Perempuan	MYS Laki-laki	MYS Perempuan	Pengeluaran per kapita laki-laki	Pengeluaran perkapita perempuan	IPM Laki-laki	IPM perempuan	IPG
TANJUNG JABUNG BARAT	66,13	70,16	12,51	12,89	8,26	7,51	14 309,00	5 799,00	72,29	62,02	85,79
SAROLANGUN	67,13	71,34	12,37	12,26	8,61	7,60	17 049,00	9 907,00	74,66	67,80	90,81
PROVINSI JAMBI	69,33	73,19	12,95	13,24	8,95	8,23	15 770,00	7 494,00	76,12	67,46	88,62
MUARU JAMBI	69,42	73,26	12,74	13,35	8,88	8,30	13 827,00	4 220,00	74,62	60,49	81,06
MERANGIN	69,40	73,18	12,04	12,25	8,40	7,51	14 564,00	7 115,00	73,71	65,04	88,24
KOTA SUNGAI PENUH	70,31	74,10	15,14	14,80	11,12	10,18	12 847,00	10 159,00	79,37	74,93	94,41
KOTA JAMBI	70,82	74,58	15,16	15,40	11,50	10,91	16 224,00	11 494,00	82,45	77,85	94,42
KERINCI	68,04	71,96	14,04	13,84	9,25	8,04	15 558,00	7 144,00	76,87	66,73	86,81
BUNGO	65,87	69,81	12,63	12,75	8,85	7,80	17 972,00	8 621,00	75,08	66,44	88,49
BATANGHARI	68,70	72,56	12,93	13,31	8,56	7,99	15 805,00	5 898,00	75,31	64,19	85,23

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2021

Keterangan :

AHH : Angka Harapan Hidup

EYS : Harapan Lama Sekolah

MYS : Rata-rata Lama Sekolah

Dari data diatas terlihat IPG Kota Jambi tertinggi dibandingkan Kabupaten/ Kota lainnya di Provinsi Jambi dan melebihi rata-rata IPG Provinsi Jambi dan angka ini sudah sesuai dengan target Renstra DPMPPA Kota Jambi yaitu target IPG sebesar 94,43. Hal ini sangat dipengaruhi beberapa faktor diantaranya :

1. Angka Harapan Hidup

Pada aspek kesehatan, nilai angka harapan hidup perempuan (74,58) di Kota Jambi lebih tinggi dibandingkan laki-laki (70,31). Hal sangat terkait dengan female advantages (FA) atau keunggulan perempuan , terutama faktor biologis dan tingkah laku atau kebiasaan dari setiap gender. Secara biologis perempuan memiliki gen dan hormon yang menguntungkan untuk hidup lebih lama. Sedangkan dari segi gaya hidup, laki-laki lebih memiliki risiko kematian yang lebih tinggi karena stres, kebiasaan merokok, dan pekerjaan berat. Namun demikian,

secara praktik di beberapa wilayah, female advantages lebih kecil sebagai akibat tindakan diskriminasi, kekerasan, dan budaya yang menyebabkan rendahnya peluang akses perempuan dalam bidang kesehatan.

Meskipun usia harapan hidup perempuan Kota Jambi lebih besar dari laki-laki, namun dari aspek kesehatan yang lain seperti morbiditas dan keluhan kesehatan, perempuan masih di atas laki-laki, sehingga dapat dikatakan bahwa meskipun perempuan memiliki usia harapan hidup yang lebih panjang, tetapi perempuan lebih rentan dalam mengalami sakit. Hal ini terkait dengan karakter fisik perempuan yang secara umum lebih lemah dibandingkan laki-laki.

2. Harapan Lama Sekolah

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah melalui pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu investasi yang dilakukan pemerintah dalam membangun negara. Tingkat pendidikan yang baik akan mengarahkan suatu negara menuju kondisi yang lebih baik. Karena itu, pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam pembangunan.

Di Kota Jambi Harapan Lama Sekolah Perempuan 15,40 dan laki-laki 15,16. Harapan Lama Sekolah perempuan di Kota Jambi merupakan angka tertinggi dibandingkan Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi dan diatas rata-rata Harapan Lama Sekolah Provinsi Jambi.

3. Rata-rata Lama Sekolah

Salah satu ukuran capaian pada bidang pendidikan adalah rata-rata lama sekolah, berbeda dengan harapan lama sekolah yang memperlihatkan capaian jangka pendek, rata-rata lama sekolah menggambarkan capaian pendidikan jangka panjang. Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh



penduduk laki-laki dan perempuan usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal.

Rata-rata Lama Sekolah Perempuan di Kota Jambi 10,91 sedangkan laki-laki 11,50. Angka tersebut merupakan tertinggi dibandingkan Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi dan diatas angka rata-rata Provinsi Jambi. Namun rata-rata lama sekolah Perempuan di Kota Jambi masih rendah dibandingkan laki-laki. Dari data diatas menggambarkan bahwa perlunya upaya Pemerintah Kota Jambi dalam meningkatkan angka rata-rata lama sekolah perempuan di Kota Jambi

4. Pengeluaran Per Kapita

Kesetaraan gender juga dapat dilihat dari ada tidaknya perbedaan capaian perempuan dan laki-laki dalam perekonomian. Dalam konteks kesetaraan gender, indikator yang dapat menunjukan ada tidaknya perbedaan adalah data upah dan pendapatan perkapita. Namun karena masalah ketersediaan data upah dan pendapatan perkapita, maka indikator ini kemudian digantikan dengan data pengeluaran perkapita yang disesuaikan sebagai proksi.

Pengeluaran Per Kapita Perempuan di Kota Jambi 11.494 sedangkan laki-laki 16.224. Angka pengeluaran per kapita perempuan tersebut merupakan tertinggi dibandingkan Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi dan diatas angka rata-rata Provinsi Jambi. Namun pengeluaran per kapita Perempuan di Kota Jambi masih rendah dibandingkan laki-laki. Dapat di simpulkan sector perekonomian di Kota Jambi masih di dominasi oleh laki-laki.

Rendahnya capaian perempuan dalam ekonomi salah satunya dipengaruhi oleh keterbatasan perempuan dalam memasuki pasar tenaga kerja di lapangan usaha tertentu yang lebih banyak membutuhkan tenaga kerja laki-laki, seperti pada pertambangan dan penggalian, listrik, gas dan

air, serta angkutan, pergudangan dan komunikasi. Lapangan usaha yang masih didominasi oleh laki-laki tersebut memiliki tingkat produktivitas yang relative tinggi dibanding lapangan usaha lainnya.

Iku ketiga puluh indeks pemberdayaan gender dengan target 68,07 belum dapat diberikan realisasi atau capaian karena nilai nya akan dikeluarkan atau di rilis di bulan mei

**SASARAN 19
MENINGKATKAN PEMENUHAN HAK ANAK**

Sasaran ke 19 (kesembilan belas) terkait meningkatkan pemenuhan hak anak dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Anak Kota Jambi dalam tahun anggaran 2021.

Tabel 3.2.89.

Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Sasaran ke 19

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		ANGKA AWAL RPJMD	% CAPAIAN 2020	2021			TARGET AKHIR RPJMD
						TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
19.	Meningkatkan pemenuhan hak anak	31.	Persentase hak anak yang terpenuhi	50,00%	100,00%	90,00%	80,00%	88,88%	100,00%
RATA-RATA % CAPAIAN					100,00%			88,88%	

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi 2021 (Data diolah)

Iku ketiga puluh persentase hak anak yang terpenuhi, dengan target 90,00 persen terealisasi 80,00 persen atau tercapai 88,88 persen masuk dalam kategori **TINGGI**, dimana target 90,00 persen berdasarkan standarisasi Kota Layak Anak adalah kategori Madya. Standar Kota Layak Anak (KLA merupakan pemenuhan hak anak dengan kategori:

- 1. Pratama Range : konstanta 500 – 600 poin
- 2. Madya : konstanta 700 – 800 poin
- 3. Nindya : konstanta 800 – 900 poin
- 4. Utama : konstanta 1.000 poin

Tahun 2020 Kota Jambi mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak dengan kategori Madya, konstanta 700 – 800 poin. Cara pengukurannya adalah jumlah 5 variabel Kota Layak Anak sebesar konstanta 800 dibandingkan dengan konstanta 1.000 di kali 100 dengan capaian 80,00%. Ditahun 2021 tidak dilaksanakan penilaian Kota Layak Anak maka untuk angka realisasi untuk persentase hak layak anak yang terpenuhi masih menggunakan hasil penilaian tahun 2020 yaitu Madya dengan nilai konstanta sebesar 800.

Tabel 3.2.90
Variabel Pemenuhan Hak Anak

No	Variabel Pemenuhan Hak Anak
1.	Hak sipil dan kebebasan
2.	Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
3.	Kesehatan dasar dan kesejahteraan
4.	Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya
5.	Perlindungan khusus

Tabel 3.2.91
Standar Penilaian KLA

No	Skor	Standar Penilaian KLA	Target		Capaian	
			2020	2021	2020	2021
1.	500 – 600 poin	Pratama				
2.	600 – 700 poin	Madya				
3.	700 – 800 poin	Nindiya	80%	80%	Madya	Madya
4.	800 – 900 poin	Utama				
5.	900 – 1000 poin	KLA				

Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan tercapainya analisis atas efisiensi penggunaan daya dan analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan antara lain:

- Adanya sumber dana baik dari APBD maupun sumber lain seperti CSR dunia usaha

- Komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan Kota Jambi sebagai kota layak anak
- Tanggung jawab dari gugus tugas kota layak anak dalam pemenuhan hak anak
- Dukungan dari dunia usaha dalam bentuk dana dan program kegiatan
- Dukungan dari media dalam pengembangan kota layak anak
- Dukungan dari masyarakat dalam perwujudan kota layak anak
- Dukungan dari pemerintah kecamatan dan kelurahan dalam perwujudan KLA
- Dukungan dari lembaga swadaya masyarakat
- Program inovasi pemerintah daerah dalam upaya percepatan pencapaian kota layak anak.

**SASARAN 20
MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMBANGUNAN**

Sasaran ke 20 (kedua puluh) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Anak Kota Jambi dan kecamatan dalam Kota Jambi dalam tahun anggaran 2021.

Tabel 3.2.92.
Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Untuk Sasaran ke 20 (dua puluh) Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		ANGKA AWAL RPJMD	% CAPAIAN 2019	2021			TARGET AKHIR RPJMD
						TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
20.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	32.	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	60,23%	96,29%	63%	87%	138,09%	66%
RATA-RATA % CAPAIAN					96,09%			138,09%	



Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi 2021. (Data diolah)

Iku ketiga puluh dua persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, dengan target 63 persen terealisasi 87 persen dengan capaian 138,09 persen masuk dalam kategori **SANGAT TINGGI**. Formulasi pengukuran Lembaga pemberdayaan masyarakat/kapasitas pemberdayaan masyarakat sebanyak 38 variabel data aktif dibagi dengan lembaga pemberdayaan masyarakat/kapasitas pemberdayaan masyarakat yang ada sebanyak 62 variabel.

Kategori/kriteria LPM aktif antara lain:

1. Adanya surat keputusan LPM terbaru
2. 50 - 60% anggota /pengurus aktif dalam pertemuan
3. Ada rencana kerja yang partisipatif
4. Mengikutsertakan diri (ketua dan pengurus) dalam musrenbang kecamatan dan kelurahan dibuktikan dengan daftar hadir
5. Ikut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan
6. Menggerakkan kegotongroyongan masyarakat dalam pembangunan
7. Adanya kerjasama antar lembaga di masyarakat
8. Perbaharuan SK dilakukan setiap 5 tahun sekali

Tabel 3.2.93.

Data LPM di 11 kecamatan/62 kelurahan

NO	Kecamatan	Jumlah LPM	Aktif	Kurang Aktif
1.	Jambi Timur	9 Orang	9 Orang	-
2.	Jelutung	7 Orang	7 Orang	-
3.	Pasar Jambi	4 Orang	4 Orang	-
4.	Pelayangan	6 Orang	6 Orang	-
5.	Jambi Selatan	5 Orang	5 Orang	-
6.	Telanaipura	6 Orang	6 Orang	-
7.	Kota Baru	5 Orang	5 Orang	-
8.	Danau Teluk	5 Orang	5 Orang	-
9.	Paal Merah	5 Orang	5 Orang	-
10.	Danau Sipin	5 Orang	5 Orang	-
11.	Alam Barajo	5 Orang	5 Orang	-



		62 Orang	62 Orang	
--	--	-----------------	-----------------	--

Tabel 3.2.94.

Analisa program/kegiatan yang dilakukan oleh LPM

Input	Proses	Output
1. Adanya surat keputusan LPM terbaru	- Mengikuti musrenbang kelurahan/ kecamatan	- Adanya bukti daftar hadir musrenbang
2. 50 - 60% anggota/pengurus aktif dalam pertemuan	- Penyusunan laporan kegiatan	- Adanya berita acara hasil komitmen - Adanya dokumen kerjasama
3. Ada dokumen rencana kegiatan	- Melaksanakan kerjasama - Menggerakkan swadaya gotong royong	- Lingkungan bersih aman dan nyaman -
4. Dokumen kerjasama antar lembaga masyarakat (draft)	- Memantau kegiatan pembangunan	

Dukungan dalam pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan antara lain adanya sumber dana dari APBD maupun swadaya masyarakat dan juga partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perkembangan ekonomi dan pembangunan sedangkan hambatan bagi LPM tidak diikutsertakan dalam pengawasan pembangunan di kelurahan.

**SASARAN 21
MENINGKATKAN PRESTASI DAN KREATIFITAS
KEPEMUDAAN**

Sasaran ke 21 (kedua puluh satu) meningkatkan prestasi dan kreativitas kepemudaan dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Jambi dalam tahun anggaran 2021.

Tabel 3.2.95.

Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Sasaran ke 21

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		ANGKA AWAL RPJMD	% CAPAIAN 2020	2021			TARGET AKHIR RPJMD
						TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
21.	Meningkatkan prestasi dan kreativitas kepemudaan	33.	Indeks pembangunan pemuda	50,00%	100	57,9	57,91	100	52,00
RATA-RATA % CAPAIAN					100			100	

Sumber : *Bagian Organisasi Setda Kota Jambi 2021. (Data diolah)*

Capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi pada tahun 2021 sudah mencapai target yang ditentukan. Indikator kinerja utama “Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)” memperoleh realisasi 57,91 dengan capaian kinerja 100%. Perhitungan realisasi Indeks Pembangunan Pemuda ini diukur dengan menghitung indeks dari 5 domain. Domain tersebut yaitu:

1. Domain Pendidikan terealisasi 71,90;
2. Domain Kesehatan dan Kesejahteraan terealisasi 59,21;
3. Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja terealisasi 61,33;
4. Domain Partisipasi dan Kepemimpinan terealisasi 61,33;
5. Domain Gender dan Diskriminasi terealisasi 47,33.

Berdasarkan capaian terealisasi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi telah mencapai target kinerja yang ditargetkan.

Dalam pelaksanaan program Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi di Tahun 2021 ini mengalami kendala yang mempengaruhi proses hingga hasil. Adapun kendala dalam pelaksanaan adalah :

1. Pandemi COVID-19 yang masih mewabah di tahun 2021 menyebabkan terkendalanya penyelenggaraan kegiatan di bidang kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan.
2. Database tentang Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKM) telah ada, namun demikian data tersebut belum dapat menjawab semua pertanyaan tentang permasalahan kepemudaan.

3. Barunya bidang kepramukaan yang menyebabkan masih beradaptasinya sumberdaya manusia yang ada dengan rutinitas kerjanya.

Untuk mengantisipasi permasalahan kedepannya, diperlukan antisipasi langkah selanjutnya. Adapun langkah antisipasi kedepan tersebut adalah:

1. Mengadakan kegiatan bidang dengan protokol kesehatan lengkap untuk mengantisipasi tidak adanya penyebaran COVID-19 walaupun dilaksanakannya kegiatan
2. Terus melaksanakan kerjasama dengan elemen masyarakat dan pemuda agar dapat melaksanakan kegiatan yang lebih bermanfaat bagi pengembangan prestasi pemuda dan prestasi olahraga di tengah pandemi COVID-19 ini.
3. Melakukan koordinasi dengan sinkronisasi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Jambi. Dinas Kependudukan dan Olahraga Provinsi Jambi. Maupun Kementerian Olahraga, sehingga akan tercapai keterpaduan dan kesinambungan program dan kegiatan.

**SASARAN 22
MENURUNKAN ANGKA PMKS**

Sasaran ke 22 (kedua puluh dua) menurunkan angka PMKS dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Jambi dalam tahun anggaran 2021.

Tabel 3.2.96.

Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Sasaran ke 22

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGKA AWAL RPJMD	% CAPAIAN 2019	2021			TARGET AKHIR RPJMD
					TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	



22.	Menurunkan angka PMKS	34.	Persentase PMKS yang tertangani	60,00%	96,09%	70,00%	80%	114,28%	85,00%
RATA-RATA % CAPAIAN					96,09%			114,28%	

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi 2021. (Data diolah)

Iku ketiga puluh empat persentase PMKS yang tertangani, dengan target 70,00 persen terealisasi 80 persen atau dengan capaian 114,28 persen masuk dalam kategori **SANGAT TINGGI**. Dengan formulasi pengukuran jumlah warga perlindungan terlantar diluar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sebanyak 2.400 orang dibagi jumlah warga terlantar di luar panti sebanyak 3.000 orang dikali 100 persen, dengan rincian data sebagai berikut:

Tabel 3.2.97.

Rekapitulasi Data Warga Terlantar Yang Kebutuhan Dasarnya Terpenuhinya Diluar Panti Di Kota Jambi 2021

No	Jenis PMKS	Target	Capaian	Persentase
1.	Disabilitas terlantar	1351	100	18
2.	Anak terlantar	531	302	40
3.	Lansia terlantar	787	1.661	211
4.	Gelandangan pengemis	331	337	101
TOTAL		3.000	2.400	80

Sumber: Data Primer diolah, 2021

Tabel 3.2.98.

Rekapitulasi Warga Terlantar Di Luar Panti Di Kota Jambi Tahun 2021

No	Kecamatan	Data PMKS Terlantar			Gepeng	Total
		Disabilitas Terlantar	Anak Terlantar	Lansia Terlantar		
1.	Jambi Timur	46	24	251	337 Orang se-Kota Jambi tidak menetap	
2.	Jambi Selatan	29	-	128		
3.	Paal Merah	22	31	180		
4.	Pasar Jambi	12	-	93		
5.	Danau Sipin	27	-	192		
6.	Kota Baru	34	2	189		
7.	Alam Barajo	24	10	45		
8.	Jelutung	44	7	185		
9.	Telanaipura	42	1	134		
10.	Danau Teluk	12	25	148		
11.	Pelayangan	10	-	116		



No	Kecamatan	Data PMKS Terlantar			Total	
	JUMLAH	302	100	1661	337	3.000

Sumber: Data Primer diolah, 2021

Faktor-faktor pendukung untuk mencapai indikator sasaran tersebut adalah dengan didukung oleh 1 (satu) program yaitu program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan PMKS, dengan kegiatan yang terdiri dari:

1. Kegiatan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap darurat
2. Kegiatan perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
3. Kegiatan pemberdayaan dan pembinaan potensi sumber kesejahteraan sosial (PMKS)
4. Kegiatan pembinaan dan pelayanan bagi orang terlantar
5. Kegiatan pelayanan dan pembinaan sosial bagi anak yang bermasalah sosial dan lansia
6. Kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi tuna sosial
7. Kegiatan pelayanan dan rehabilitasi siabilitas, korban NAPZA
8. Kegiatan pelayanan dan pembinaan kepahlawanan, kejuangan dan kesetia kawan sosial
9. Kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber dana bantuan sosial
10. Kegiatan pendataan dan informasi fakir miskin
11. Kegiatan penyuluhan, pelatihan dan pemberdayaan fakir miskin
12. Kegiatan pembinaan dan pelayanan sosial fakir miskin

Dari Penyelenggaraan Program Kegiatan Pemerintahan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2021 pada Dinas Sosial Kota Jambi khususnya dalam bidang Sosial, maka terdapat beberapa permasalahan pokok dan memerlukan Solusi pemecahan yang terjadi antara lain adalah :

1. Belum Optimalnya Penanganan dan Penertiban Razia Gepeng .



2. Belum Optimalnya Penanganan tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa, khususnya bantuan korban bencana.
3. Belum Optimalnya Penanganan dan pemulangan Orang Terlantar ke Daerah Asal Tujuannya.
4. Belum Optimalnya Pelayanan dan Rehabilitasi bagi PMKS.
5. Belum Optimalnya Pemberian Bantuan Usaha kepada PMKS
6. Belum Optimalnya Peran serta Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dalam Penanganan dan penanggulangan masalahmasalah Sosial
7. Banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berasal dari Luar Daerah
8. Masih tingginya angka kemiskinan dan rendahnya tingkat kesejahteraan PMKS.

Solusi pemecahan yang terjadi antara lain adalah :

1. Menambah Tingkat Intensitas Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi terhadap perkembangan hasil penertiban dan penanganan PMKS.
2. Menambah Anggaran Distribusi Bantuan Sosial bagi korban bencana dan Anggaran Penanganan dan pemulangan Orang Terlantar ke Daerah Asal Tujuannya ke dalam Anggaran APBD Kota Jambi.
3. Membangun Sarana Prasarana Pusat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS.
4. Memberikan Pelatihan Keterampilan dan Wirausaha Mandiri kepada PMKS.
5. Memberikan Bantuan Peralatan Keterampilan Usaha Mandiri kepada PMKS
6. Memberdayakan dan meningkatkan Peran Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dalam Penanganan dan penanggulangan masalah-masalah Sosial
7. Menyusun dan membuat rencana strategis secara terpadu, melakukan

sinkronisasi dan koordinasi, serta memanfaatkan Forum Kerjasama antar daerah dalam rangka mengatasi masalah-masalah kesejahteraan

3.3. PERBANDINGAN TARGET DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 DENGAN TAHUN 2021

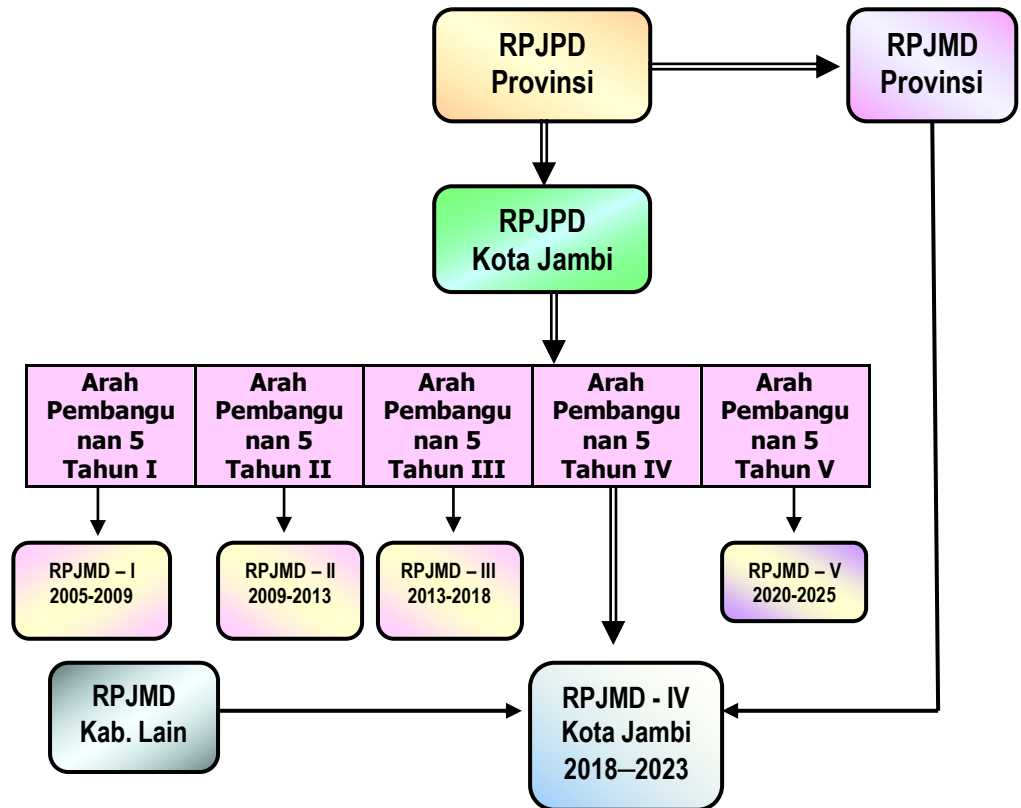
Tahun 2021 merupakan tahun keempat dari periode kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Periode Tahun 2018 – 2023. Dengan tetap memperhatikan sinkronisasi perencanaan pembangunan Kota Jambi dengan mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi tahun 2005-2025, ditetapkan prioritas pembangunan sebagai panduan gerak langkah kemana pembangunan akan diarahkan.

Keempat prioritas pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi tahun 2018 - 2023 ditujukan untuk memperkuat identitas pembangunan Kota Jambi yang konsisten menuju terwujudnya visi dan misi pembangunan Kota Jambi periode 2005 – 2025 dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pencapaian tujuan tersebut membutuhkan gerakan dan kekuatan yang sinergis dengan daerah sekitarnya dan pemerintahan di atasnya.

Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD Kota Jambi periode 2018 -2023 disamping berpedoman pada dokumen RPJPD Kota Jambi, juga memperhatikan RPJMD kabupaten/kota tetangga, RPJMD Provinsi Jambi dan RPJM Nasional sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Permendagri Nomor 86 tahun 2017 sebagai upaya sinkronisasi perencanaan pembangunan seperti terlihat pada gambar berikut ini.

Gambar 3.3.1.
Skema Keterkaitan RPJMD Kota Jambi 2018 – 2023

dan RPJPD Kota Jambi 2005 – 2025

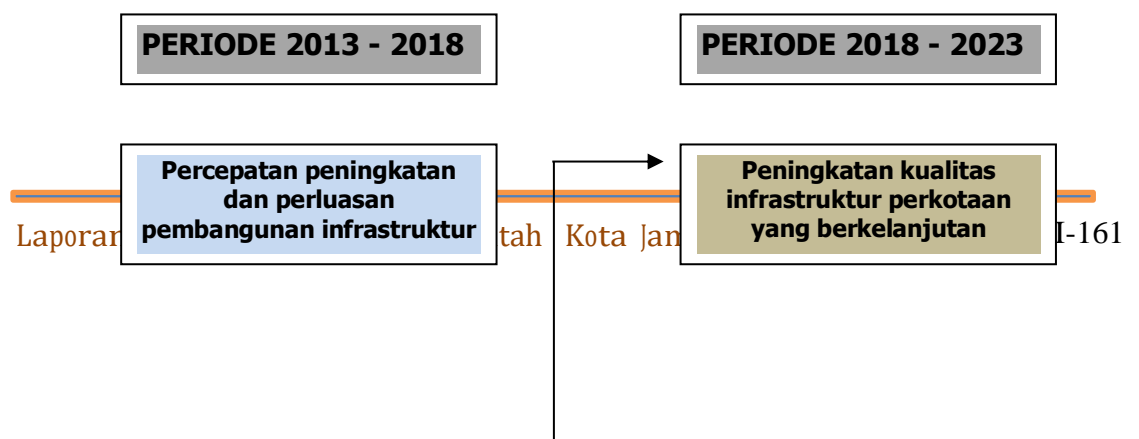


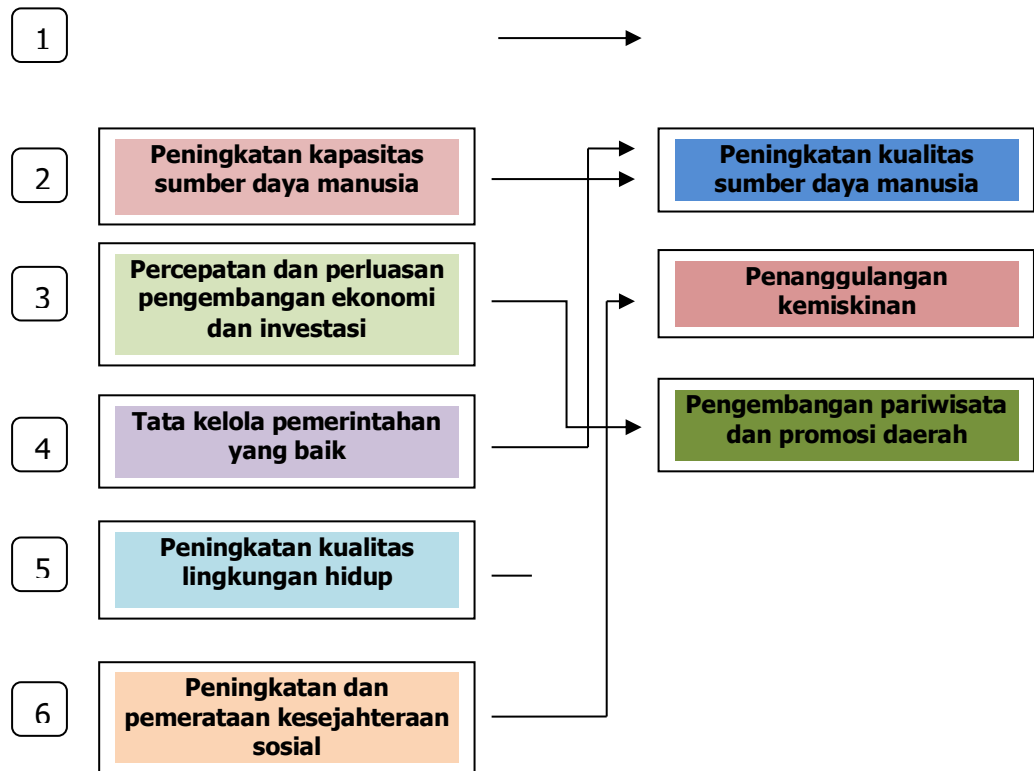
Sumber : RPJMD Kota Jambi Tahun 2018 -2023

Sebagai gambaran umum untuk dapat melihat sinkronisasi dan kesinambungan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2018 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada Prioritas Pembangunan yang akan dicapai disetiap tahun, khususnya pada tahun 2019 yang merupakan tahun Pertama periode pemerintahan tahun 2018 -2023 dengan periode tahun 2013 - 2018 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 3.3.2.

Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Periode Tahun 2013 – 2018 dengan Periode Tahun 2018 -2023





Selanjutnya sebagai panduan dalam pencapaian prioritas pembangunan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih juga dalam RPJMD telah ditetapkan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama yang harus di jabarkan dan dilaksanakan oleh Satuan Perangkat Kerja Daerah. Sebagai perbandingan jumlah tujuan, sasaran dan IKU selama periode tahun 2008 -2013 dengan periode tahun 2013 – 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3.1.
Perbandingan Jumlah Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Periode Tahun 2018 -2023

NO	URAIAN	PERIODE	
		2013-2018	2018-2023
1.	MISI	5	5
2.	TUJUAN	11	6
3.	SASARAN	22	22
4.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	38	34



Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi 2021.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tujuan pada periode sebelumnya adalah sebanyak 11 buah dan pada periode 2018 – 2023 menjadi 6 tujuan. Namun untuk jumlah sasaran tetap yaitu 22 sasaran dan jumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) terjadi penurunan, yaitu untuk sasaran di periode sebelumnya adalah sebanyak 38 indikator, periode saat ini adalah sebanyak 34 indikator.



Tabel 3.3.2.
Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tahun 2020 dan 2021

1	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		ANGKA AWAL RPJMD	2020			2021			TARGET AKHIR RPJMD
					TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	1	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	2,33	2,55	-	-	2,9	1,69	58,27%	3,2
		2	Indeks profesionalitas ASN	55	57,5	66,70	116,00%	63,08	64,24	101,84%	88
		3	Nilai SAKIP	B	B	B	94,30%	B	-	-	BB
		4	Indeks survey persepsi korupsi	N/A	3,69	3,50	94,85%	3,73	-	-	-
		5	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,28%	86	85,51	99,43%	86,00%	86,05%	100,58%	89%
2	Optimalisasi Penegakan Produk Hukum Daerah	6	Persentase Perda dan Perwal yang ditegakkan	82,00%	80	75,00	93,75%	81%	90,48%	111,70%	100%
3	Meningkatkan pelayanan pada kondisi pra, tanggap dan pasca kebakaran serta kebencanaan	7	Cakupan pelayanan pemadam kebakaran	100,00%	100,00%	93,63%	93,63%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



Pemerintah Kota Jambi

1	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		ANGKA AWAL RPJMD	2020			2021			TARGET AKHIR RPJMD
					TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
4	Meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya ideologi pancasila dan kebhinekaan dalam kehidupan sosial masyarakat	8	Persentase pembinaan terhadap masyarakat terkait ideologi Pancasila	20,00%	20,00%	20	100,00%	20,00%	20,00%	100,00%	20,00%
5	Meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan dan Parpol dalam pembangunan	9	Persentase orkesmas dan Parpol yang berperan aktif di masyarakat	20,00%	20,00%	48,6	243%	20,00%	21,74%	108,70%	20,00%
6	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan	10	Cakupan layanan infrastruktur dan utilitas	50,59%	60,77	65,56	107,88%	56,38%	74,76%	132,60%	70,99%
7	Meningkatkan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	11	Indeks kualitas air	32,11	38,3	39,60	103,40%	39,75	43,99	110,60%	40,2
		12	Indeks kualitas udara	80,68	80,72	84,51	104,70%	80,74	85,02	105,30%	80,8
		13	Indeks kualitas tutupan lahan	39,33	41,7	44,82	107,48%	44,85	49,91	111,3%	44,92
8	Meningkatnya Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan	14	Persentase pembinaan, pengawasan dan pelayanan perdagangan	20,00%	52	116,23	223,52%	68%	37,92%	55,76%	100,00%



Pemerintah Kota Jambi

1	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		ANGKA AWAL RPJMD	2020			2021			TARGET AKHIR RPJMD
					TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
9	Meningkatnya Ketahanan Pangan	15	Indeks Ketahanan Pangan	N/A	N/A	N/A	N/A	78%	79,73%	102,22%	84%
10	Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	16	Kontribusi pariwisata terhadap PDRB	2,35%	2,38	2,29	96,22%	2,29%	3,15%	137,55%	2,41%
11	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	17	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4,00%	9	-9,64	-107,11%	9,00%	7,97	88,55%	9,00%
12	Meningkatkan Realisasi Investasi	18	Realisasi investasi	410 M	430,5 M	249,4 M	68,39%	474,62 M	653,17 M	137,62%	575,70 M
13	Meningkatkan Penyerapan dan perlindungan Tenaga Kerja	19	Tingkat Pengangguran Terbuka	N/A	N/A	N/A	N/A	10,37%	10,66%	97,2%	8,98%
14	Meningkatkan Daya Saing Usaha Skala mikro dan Kecil	20	Persentase usaha mikro kecil yang berkualitas	7,61%	8,54	8,54	100,00%	9,02%	9,02%	100,00%	10,00%
		21	Persentase daya saing produk IKM	4,30%	5,35	2,80	52,34%	6,50%	1,64%	25,23%	8,30%
		22	Persentase koperasi berkualitas	13,00%	19,27	19,73	101,46%	23,85%	26,36%	110,52%	36,70%



Pemerintah Kota Jambi

1	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		ANGKA AWAL RPJMD	2020			2021			TARGET AKHIR RPJMD
					TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
15	Meningkatkan Derajat Kesehatan	23	Angka Harapan Hidup (AHH)	72,34%	72,35	72,65	100,41%	72,73	72,71	99,97%	72,97%
16	Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	24	Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,25%	14,61	15,10	103,35%	15,11	15,37	101,72%	15,14%
		25	Persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan pelayanan pendidikan	21,32%	17,32	17,32	100,00%	12,32	12,32	100,00%	4,32%
		26	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,68	10,69	10,92	102,15%	10,93	11,2	102,15%	10,72%
17	Mengendalikan angka Kelahiran Penduduk	27	Laju pertumbuhan penduduk	1,05	1,05	1,10	95,24%	1,03	0,74	128,15%	1,01%
		28	Persentase jumlah keluarga sejahtera	96,46	96,46	95,99	99,52%	96,69%	96,83%	100,14%	97,15%
18	Meningkatkan Kesetaraan Gender	29	Indeks pembangunan gender	94,89	94,91	94,60	99,73%	94,93	94,42	99,46%	94,95
		30	Indeks pemberdayaan gender	68,07	68,2	69,83	102,39%	68,3	-	-	68,5
19	Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak	31	Persentase hak anak yang terpenuhi	50,00%	80	80,00	100,00%	90%	80%	88,89%	100,00%



Pemerintah Kota Jambi

1	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		ANGKA AWAL RPJMD	2020			2021			TARGET AKHIR RPJMD
					TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
20	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	32	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	60,23%	61,43	59,15	96,29%	63%	87,09%	138,24%	66%
21	Meningkatkan Prestasi dan Kreativitas Kepemudaan	33	Indeks pembangunan pemuda	50	50,5	50,50	100,00%	57,9	57,91	100,00%	52
22	Menurunkan angka PMKS	34	Persentase PMKS yang tertangani	60,00%	70	67,26	96,09%	70%	80%	114,28%	85,00%
TOTAL CAPAIAN INDIKATOR KINERJA							99,62%			102,21	



Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Kota Jambi pada Tabel di atas, Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2021 mencapai 102,21 % masuk dalam kategori **SANGAT TINGGI**, bila di bandingkan dengan tahun lalu capaian kinerja mencapai 99,62% maka capaian di tahun ini naik jika dibandingkan dengan tahun lalu.

Rata-rata capaian indikator Pemerintah Kota Jambi Mengalami kenaikan hanya ada beberapa indikator yang capaiannya mengalami penurunan diantaranya:

1. Indeks Profesional ASN;
2. Persentase orkesmas dan parpol yang berperan aktif di masyarakat
3. Persentase Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan perdagangan;
4. Persentase Daya Saing Produk IKM;
5. Harapan Lama Hidup (AHH);
6. Harapan Lama Sekolah(HLS);
7. Indeks Pembangunan Gender;
8. Persentase Hak Anak yang Terpenuhi.

Dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2021 diperoleh capaian target Indikator Kinerja Utama sebesar **76,47%** masuk dalam kategori capaian **SANGAT TINGGI**, **5,88%** masuk dalam kategori capaian **TINGGI**, **5,88** masuk dalam kategori capaian **RENDAH**, **2,94** masuk dalam kategori capaian **SANGAT RENDAH**, dan **8,82** belum dapat di hitung capaian indikatornya.

3.4. PENDANAAN PER PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2020 DAN 2021

Dalam upaya mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah diarahkan dalam Prioritas Pembangunan dengan target-target Indikator Kinerja Utama (IKU) setiap tahunnya, tentu saja tidak lepas dari masalah pendanaan. Sesuai dengan kemampuan daerah



yang ada, Tim Anggaran Pemerintah Daerah telah menyusun alokasi anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.48. di bawah ini.

Pada awal perencanaan RPJMD 2018-2023 adalah Prioritas Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan Yang Berkelanjutan menggunakan alokasi dana APBD TA tahun 2020 menggunakan alokasi sebesar Rp. 405.589.286.011,- atau sebesar 38,51 persen dari total belanja langsung sedangkan pada tahun tersebut 2021 adalah sebesar Rp. 641.396.693.264,- atau sebesar 35,421 persen pada tahun 2021 dari total belanja langsung pada tahun tersebut.

Untuk prioritas kedua untuk awal perencanaan RPJMD 2018-2023 adalah Prioritas Peningkatan Kualitas SDM menggunakan alokasi dana APBD tahun 2020 menggunakan alokasi sebesar Rp. 372.572.700.787,- atau sebesar 35,37 persen dari total belanja langsung pada tahun tersebut TA 2021 adalah sebesar Rp. 1.070.746.881.980,- atau sebesar 59,132 persen pada tahun 2021 dari total belanja langsung pada tahun tersebut.

Prioritas pembangunan ketiga yaitu penanggulangan kemiskinan yang dianggarkan oleh APBD Untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp. 257.121.415.410,- atau sebesar 24,41 persen dari total belanja langsung pada tahun tersebut sedangkan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 89.264.768.227,- atau sebesar 4,93 dari total belanja langsung daerah tahun 2021.

Prioritas pembangunan keempat yaitu Pengembangan Pariwisata dan Promosi Daerah menggunakan alokasi dana APBD Untuk tahun 2020 menggunakan anggaran sebesar Rp. 17.986.533.800,- atau sebesar 1,71 persen dari total belanja langsung pada tahun tersebut TA 2021 adalah sebesar Rp. 9.354.093.517,- atau sebesar 0,52 persen pada tahun 2021 dari total belanja langsung pada tahun tersebut.



Tabel 3.4.1.
Alokasi APBD Per Prioritas Pembangunan Tahun 2020 dan 2021

NO	PRIORITAS PERIODE RPJMD 2018-2023	ALOKASI APBD-P 2020		PRIORITAS PERIODE RPJMD 2018-2023	ALOKASI APBD-P 2020		
		BL	%		BL	%	
1	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG BERKELANJUTAN	405.589.286.011	38,51	1	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG BERKELANJUTAN	641.396.693.264	35,421
2	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	372.572.700.787	35,37	2	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	1.070.746.881.980	59,132
3	PENANGULANGAN KEMISKINAN	257.121.415.410	24,41	3	PENANGULANGAN KEMISKINAN	89.264.768.227	4,9297
4	PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN PROMOSI DAERAH	17.986.533.800	1,71	4	PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN PROMOSI DAERAH	9.354.093.517	0,5166
TOTAL BELANJA LANGSUNG		1.053.269.936.008				1.053.269.936.008	

Sumber : Bappeda Kota Jambi. 2021 (Data Diolah)

3.5. AKUNTABILITAS PENGGUNAAN ANGGARAN TAHUN 2021

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2021 sebesar 88,69% dari total anggaran yang dialokasikan. Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/ input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya. Secara lebih detail penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2021 dapat diuraikan pada tabel-tabel dibawah ini.

3.5.1. Pendapatan Daerah

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- Realisasi PAD sebesar Rp. 384.007.565.070,46 dari target sebesar Rp. 454.001.834.233,00
- Dari komponen PAD, penerimaan terbesar berasal dari Pajak Daerah sebesar Rp. 244.016.777,5 dari target sebesar Rp. 297.961.981,3 Sedangkan penerimaan terkecil berasal dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 9.638.772,8 dari target sebesar Rp. 9.602.267,4.
- Jika dilihat tingkat kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) yang merupakan rasio antara Pendapatan Asli Daerah dengan sumber dana ekstern (DAU, DAK, Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya dan dana penyesuaian), Tingkat Kemandirian Daerah 22,07 persen, Artinya kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sendiri masih rendah. Hal ini berdasarkan



kategori yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Untuk itu pemerintah daerah selalu berupaya meningkatkan kemandirian keuangan daerah, tapi secara teknis pendapatan asli daerah Kota Jambi dari target yang ditetapkan sebesar 84,58% persen.

2) Pendapatan Transfer

- Pendapatan Transfer yang berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp. 1.070.421.415,8 dengan target sebesar Rp. 1.028.242.964,1
- Pendapatan Transfer yang berasal dari Pendapatan Transfer Antar Daerah terealisasi sebesar Rp. 135.605.387,0 melebihi target sebesar Rp. 114.936.579,7.

3) Pendapatan Daerah yang Sah

- Pendapatan Daerah yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah terealisasi sebesar Rp. 597.000,00 dengan target sebesar Rp. 1.000.000,00.
- Pendapatan Daerah yang Sah yang berasal dari Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan realisasinya sebesar Rp. 61.488.094,9 melebihi target sebesar Rp. 60.224,550.

Tabel 3.5.1.
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Daerah Kota Jambi
Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Target 2021	Realisasi 2021	% Realisasi
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	454.001.834,2	384.007.565,1	84,58%
1.	Pajak Daerah	297.860.000	244.016.777,5	81,92%
2.	Retribusi Daerah	55.312.900	51.844.265,4	93,73%



No	Uraian	Target 2021	Realisasi 2021	% Realisasi
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	9.602.267,4	9.638.772,8	100,38%
4.	Lain-lain PAD yang sah	91.226.666,9	78.507.749,3	86,06%
	Pendapatan Transfer	1.143.179.543,8	1.206.026.802,7	105,50
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.028.242.964,1	1.070.421.415,8	104,10
2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	114.936.579,7	135.605.387,0	117,98
	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	61.224.550	62.085.094,9	101,41
1.	Pendapatan Hibah	1.000.000	597.000	59,70
2.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	60.224.550	61.488.094,9	102,10
	TOTAL	1.658.405.928.034,0	1.652.119.462.753,46	99,6

Sumber : Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi. 2021.

3.5.2. Belanja Daerah

Dalam rangka perhitungan SAB (Standar Analisis Belanja), anggaran belanja unit kerja dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga.

Belanja Operasi adalah belanja yang dikeluarkan dari Kas Umum Negara/Daerah dalam rangka menyelenggarakan operasional pemerintah sedangkan Belanja Modal adalah belanja yang dikeluarkan dalam rangka

membeli dan/atau mengadakan barang modal. Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga dapat dilihat tabel 3.49 berikut:

Tabel 3.5.2.

Tabel Target dan Realisasi Belanja Kota Jambi Tahun 2021

No	Uraian	Target 2021	Realisasi 2021	% Realisasi
1.	Belanja Operasi	1.386.617.509,7	1.238.942.121,7	89,35
2.	Belanja Modal	564.662.175,5	495.805.792,0	87,81
3	Belanja Tidak Terduga	10.415.233,8	5.062.503,1	48,61
Total Belanja Daerah		1.961.694.991,1	1.739.810.416,8	88,69

Tabel diatas menunjukkan:

- a. Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 1.238.942,121,7 atau 89,35% dari anggaran sebesar Rp 1.386.617.509,7-. Komposisi belanja operasi lebih besar dibandingkan belanja modal dan belanja tak terduga. Realisasi belanja tidak langsung ini dipergunakan:

- Realisasi belanja operasi yang terbesar digunakan untuk belanja pegawai sebesar Rp. 682.947.098.349,00 atau 91,59% dari anggaran sebesar Rp 745.627.187.957,00 belanja pegawai digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH, insentif pemungutan pajak daerah dan insentif pemungutan retribusi daerah.
- Realisasi Belanja hibah sebesar Rp. 43.843.156.233,00 atau 91,46% dari anggaran sebesar Rp. 47.934.807.576,00
- Realisasi Belanja bantuan sosial sebesar Rp. 6.637.634.682,00 atau 91,08% dari anggaran sebesar Rp. 7.287.353.850,00
- Realisasi Belanja Subsidi sebesar Rp. 197.820.000,00 atau 100%

- dari anggaran sebesar Rp. 197.820.000,00
- Realisasi Bunga sebesar Rp. 1.626.646.569,00 atau 10,84% dari anggaran sebesar Rp. 15.000.000.000,00
 - Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 503.689.765.887,85 atau 88,28% dari anggaran sebesar Rp. 570.570.340.308,00
- b. Rata-rata realisasi komponen belanja operasi dibawah 100%, dari belanja operasional tersebut realisasi belanja yang terkecil adalah belanja Bunga sebesar Rp. 1.626.646.569,00 - dari anggaran sebesar Rp. 15.000.000.000,00
- c. Realisasi belanja modal sebesar Rp. 495.805.792.008,94 atau 87,81% dari anggaran sebesar Rp. 564.662.175.542,00
- Realisasi Belanja Modal ini dipergunakan:
- Belanja modal yang terbesar dipergunakan untuk membiayai Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi yaitu sebesar Rp 226.986.232.364,00 atau 86,25% dari anggaran sebesar Rp. 263.570.339.074,00
 - Belanja modal yang terkecil dipergunakan untuk Belanja Modal Aset Tetap dan Lainnya yaitu sebesar Rp 12.838.061.250,00 atau 86,12% dari anggaran sebesar Rp. 12.888.714.973.
- d. Realisasi belanja tak terduga sebesar Rp. 5.062.503,1 atau sebesar 48,61% dari Total Rp. 10.415.233,8.

Tabel 3.5.3.
Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2021

No	Uraian Belanja	Belanja Operasi		
		Anggaran	Realisasi	%
	Belanja Operasi	1.386.617.509.691,00	1.238.942.121.720,85	89,35
1	Belanja Pegawai	745.627.187.957,00	682.947.098.349,00	91,59
2	Belanja Barang dan Jasa	570.570.340.308,00	503.689.765.887,85	88,28
3	Belanja Bunga	15.000.000.000,00	1.626.646.569,00	10,84
4	Belanja Subsidi	197.820.000,00	197.820.000,00	100,00
5	Belanja Hibah	47.934.807.576,00	43.843.156.233,00	91,46



No	Uraian Belanja	Belanja Operasi		
6	Belanja Bantuan Sosial	7.287.353.850,00	6.637.634.682,00	91,08
	Belanja Modal	564.662.175.542,00	495.805.792.008,94	87,81
1	Belanja Modal Tanah	9.485.000.000,00	9.426.780.000,00	99,39
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	94.221.528.031,00	87.421.234.280,00	92,78
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	184.496.593.464,00	159.133.484.114,94	86,25
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	263.570.339.074,00	226.986.232.364,00	86,12
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.888.714.973,00	12.838.061.250,00	99,61
	Belanja Tidak Terduga	10.415.233.825,00	5.062.503.119,00	48,61
1	Belanja Tidak Terduga	10.415.233.825,00	5.062.503.119,00	48,61
Total		1.961.694.991,1	1.739.810.416,8	88,69

Sumber : Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi. 2021.

3.5.3. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kota Jambi pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.50 berikut ini.

Berdasarkan perhitungan APBD tahun anggaran 2021 tersebut, kinerja keuangan Pemerintah Kota Jambi disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pendapatan yang ditargetkan sebesar Rp. 1.658.405.928.034,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.652.119.462.753,46 atau 99,6% dari target. Disisi lain, belanja dianggarkan sebesar Rp. 1.961.694.991,1 direalisasikan sebesar Rp. 1.961.694.991,1 atau 88,69% dari anggaran.
- b. Dari anggaran defisit sebesar (303.288.991.024,00) dan realisasikan defisit sebesar (87.690.954.095,33) atau sebesar (28,91%).

Tabel 3.5.4.

Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2021

PEMBIAYAAN DAERAH	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	% Persentase
Penerimaan Pembiayaan	305.288.991.024,00	248.402.635.024,06	81,37



PEMBIAYAAN DAERAH	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	% Persentase
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	165.288.991.024,00	165.288.991.024,06	100,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00
PEMBIAYAAN NETTO	303.288.991.024,00	246.402.635.024,06	81,24
SURPLUS/(DEFISIT)	(303.288.991.024,00)	(87.690.954.095,33)	28,91
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	158.711.680.928,73	

Sumber : Dinas Pengelola Keuangan dan Arsip Daerah Kota Jambi 2021

- Hal ini menunjukkan kinerja keuangan yang positif yaitu dapat melampaui target pendapatan dan sekaligus melakukan penghematan (menekan) realisasi belanja (efisiensi).
- Dalam tahun anggaran 2021, pada kegiatan pembiayaan terdiri dari penerimaan yang ditargetkan Rp. 2.000.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar 100% .
- Realisasi Pembiayaan netto sebesar Rp. 246.402.635.024,06 atau 81,24% dari Anggaran sebesar Rp. 303.288.991.024,00. pada tahun anggaran 2021 didapatkan SILPA dari jumlah anggaran sebesar Rp. 158.711.680.928,73.

3.6 PENGHARGAAN YANG DIRAIH PEMERINTAH KOTA JAMBI SELAMA TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

Walikota Jambi yaitu Bapak H. SYARIF FASHA, ME dan Wakil Walikota Jambi yaitu Bapak DR. Dr. H. MAULANA, MKM merupakan Walikota dan Wakil Walikota terpilih untuk periode kepemimpinan Tahun 2018-2023 yang dilantik pada tanggal 7 November 2018. Tahun 2021 merupakan tahun keempat berjalannya pemerintahan di bawah kepemimpinan.



Tabel 3.6.1.
Daftar Penghargaan Yang Diterima Pemerintah Kota Jambi Pada Tahun 2021

	NAMA PENGHARGAAN	PEJABAT/ LEMBAGA YANG MENERBITKAN / MENGANUGERAHKAN	URAIAN	TEMPAT/TANGGAL PENYERAHAN	PENERIMA
1	2	3	4	5	6
1	Kinerja Pengurangan Sampah dan Penerima Dana Insentif Daerah untuk Kota Jambi Tahun 2020	Menteri LHK RI, Siti Nurbaya,	Penghargaan Kinerja Pengurangan Sampah dan Penerima Dana Insentif Daerah untuk Kota Jambi Tahun 2020 diserahkan dalam rangkaian Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN). Tercatat hanya 1 Pemerintah Provinsi dan 12 Pemerintah Kabupaten Kota di Indonesia yang meraih penghargaan, sekaligus dana insentif dari pemerintah pusat tersebut. Yang paling membanggakan adalah, Kota Jambi menjadi satu-satunya daerah yang mewakili Pulau Sumatera yang didaulat meraih penghargaan bergengsi tersebut.	Jakarta, 22 Februari 2021	Wali Kota Jambi
2	Penghargaan Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Tahun 2020	Menteri Pemberdayaa Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Tjahjo Kumolo	Pemerintah Kota Jambi meraih penghargaan atas prestasi capaian Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Tahun 2020 dengan predikat nilai B	Jakarta, 22 April 2021	Wali Kota Jambi
3	Penghargaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020	Menteri Pemberdayaa Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Tjahjo Kumolo	Pemerintah Kota Jambi meraih penghargaan atas prestasi capaian Reformasi Birokrasi Tahun 2020 dengan predikat nilai B	Jakarta, 22 April 2021	Wali Kota Jambi



Pemerintah Kota Jambi

	NAMA PENGHARGAAN	PEJABAT/ LEMBAGA YANG MENERBITKAN / MENGANUGERAHKAN	URAIAN	TEMPAT/TANGGAL PENYERAHAN	PENERIMA
1	2	3	4	5	6
4	Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2021	Menteri PPN dan Kepala Bappenas, Suharso Manoarfa	Pemerintah Kota Jambi meraih penghargaan 10 Kota Terbaik Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2021. Penghargaan tersebut diumumkan pada Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2021	Jakarta, 4 Mei 2021	Wali Kota Jambi
5	Opini WTP	BPK RI	Pemerintah Kota Jambi meraih predikat Opini WTP atas LKPD Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2020	Kota Jambi, 27 Mei 2021	Wali Kota Jambi
6	Kota Layak Anak Tahun 2021 Kategori Madya	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Ibu Bintang Puspayoga	Kota Jambi berhasil menjadi Kota Layak Anak dengan Kategori Madya untuk kedua kalinya (tahun 2019 dan 2012) atas kepedulian, integritas dan komitmen dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak sipil terbaik bagi anak-anak di Kota Jambi.	Jakarta, 29 Juli 2021	Wali Kota Jambi
7	Karya Bhakti Pramuka	Ketua Kwarnas, Budi Waseso	Wali Kota Jambi Dr. H. Syarif Fasha, ME yang juga selaku Kamabiacab Pramuka Kota Jambi meraih penghargaan Karya Bhakti Pramuka atas tanggung jawab dan kepedulian yang tinggi terhadap penanggulangan bencana alam di daerah maupun daerah lain, serta tanggap dalam penanganan Covid-19	Jakarta, 14 Agustus 2021	Wali Kota Jambi
8	Karya Bhakti Pramuka	Ketua Kwarnas, Budi Waseso	Wakil Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, MKM yang juga selaku Wakamabiacab Pramuka Kota Jambi meraih penghargaan Karya Bhakti Pramuka atas tanggung jawab dan kepedulian yang tinggi terhadap penanggulangan bencana alam di daerah maupun daerah lain, serta tanggap dalam penanganan Covid-19	Jakarta, 14 Agustus 2021	Wakil Wali Kota Jambi



Pemerintah Kota Jambi

	NAMA PENGHARGAAN	PEJABAT/ LEMBAGA YANG MENERBITKAN / MENGANUGERAKAN	URAIAN	TEMPAT/TANGGAL PENYERAHAN	PENERIMA
1	2	3	4	5	6
9	TOP Pembina BUMD	BUMD Awards	Wali Kota Jambi Wali Kota Jambi Dr. H. Syarif Fasha ME meraih penghargaan sebagai TOP Pembina BUMD Perumda Tirta Mayang Kota Jambi pada ajang penghargaan TOP BUMD Awards 2021	Jakarta, 10 September 2021	Wali Kota Jambi
10	TOP BUMD Perumda Tirta Mayang Kota Jambi	BUMD Awards	Perumda Tirta Mayang Kota Jambi meraih penghargaan sebagai TOP BUMD pada ajang penghargaan TOP BUMD Awards 2021	Jakarta, 10 September 2021	Wali Kota Jambi
11	Penghargaan Capaian Opini WTP 5 Kali Berturut-turut	Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indarwati	Pemerintah Kota Jambi meraih penghargaan dari Menteri Keuangan RI atas prestasi 5 Kali Berturut-turut meraih Capaian Opini WTP dari BPK RI atas LKPD Pemkot Jambi Tahun 2016 s.d. 2020	Jakarta, 14 September 2021	Wali Kota Jambi
12	Penghargaan atas Keberhasilan Menyusun dan Menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2020 dengan Capaian Opini WTP	Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indarwati	Pemerintah Kota Jambi meraih penghargaan dari Menteri Keuangan RI atas Keberhasilan Menyusun dan Menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2020 dengan Capaian Opini WTP	Jakarta, 14 September 2021	Wali Kota Jambi
13	Penghargaan Nugra Jasa Dharma Pustaloka	Perpustakaan Nasional RI	Wali Kota Jambi Wali Kota Jambi Dr. H. Syarif Fasha ME meraih penghargaan Nugra Jasa Dharma Pustaloka dari Perpustakaan RI yang merupakan penghargaan tertinggi di bidang perpustakaan bagi insan penggiat dan motor penggerak budaya literasi di Indonesia	Jakarta, 14 September 2021	Wali Kota Jambi



Pemerintah Kota Jambi

	NAMA PENGHARGAAN	PEJABAT/ LEMBAGA YANG MENERBITKAN / MENGANUGERAHKAN	URAIAN	TEMPAT/TANGGAL PENYERAHAN	PENERIMA
1	2	3	4	5	6
14	Anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2020 (Kategori Madya)	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Bintang Puspayoga	Wali Kota Jambi Wali Kota Jambi Dr. H. Syarif Fasha ME meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2020 Kategori Madya atas komitmen dalam mewujudkan Pengarusutamaan Gender dalam seluruh sektor pembangunan di Kota Jambi	Jakarta, 13 Oktober 2021	Wali Kota Jambi
15	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Award Tahun 2021 Kategori Kota Stop Buang Air Besar Sembarangan/Open Defication Free (ODF)	Menteri Kesehatan RI, Budi G Sadikin	Kota Jambi meraih penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Award Tahun 2021 Kategori Kota Stop Buang Air Besar Sembarangan/Open Defication Free (ODF)	Jakarta, 15 Oktober 2021	Wali Kota Jambi
16	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Award Tahun 2021 Kategori Kota Terbaik Dalam Upaya Percepatan Stop Buang Air Besar Sembarangan/Open Defication Free (ODF) Kategori Supply	Menteri Kesehatan RI, Budi G Sadikin	Kota Jambi meraih penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Award Tahun 2021 Kategori Kota Terbaik Dalam Upaya Percepatan Stop Buang Air Besar Sembarangan/Open Defication Free (ODF) Kategori Supply	Jakarta, 15 Oktober 2021	Wali Kota Jambi



Pemerintah Kota Jambi

	NAMA PENGHARGAAN	PEJABAT/ LEMBAGA YANG MENERBITKAN / MENGANUGERAHKAN	URAIAN	TEMPAT/TANGGAL PENYERAHAN	PENERIMA
1	2	3	4	5	6
17	Penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) untuk Sanitarian Terbaik	Menteri Kesehatan RI, Budi G Sadikin	Kota Jambi meraih penghargaan Penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) untuk Sanitarian Terbaik Muryati, AMKL, Petugas Sanitarian Puskesmas Simpang Kawat Kota Jambi	Jakarta, 15 Oktober 2021	Muryati, AMKL
18	Penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) untuk Lurah Terbaik Dalam Upaya Mendorong Percepatan STBM	Menteri Kesehatan RI, Budi G Sadikin	Kota Jambi meraih penghargaan Penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) untuk Lurah Terbaik Dalam Upaya Mendorong Percepatan STBM atas nama Ahmad Fikri Aiman, S.STP, M.Si, Lurah Lebak Bandung Kecamatan Jelutung Kota Jambi	Jakarta, 15 Oktober 2021	Ahmad Fikri Aiman, S.STP, M.Si
19	Penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) untuk Natural Leader Terbaik Dalam Upaya Mendorong Percepatan STBM	Menteri Kesehatan RI, Budi G Sadikin	Kota Jambi meraih penghargaan Penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) untuk Natural Leader Terbaik Dalam Upaya Mendorong Percepatan STBM atas nama Aswan Hidayat Ketua RT 19 Kelurahan Lebak Bandung Kecamatan Jelutung Kota Jambi	Jakarta, 15 Oktober 2021	Aswan Hidayat
20	KNPI Award 2021, Tokoh Kepala Daerah Peduli Pemuda	Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Pusat	Wali Kota Jambi Wali Kota Jambi Dr. H. Syarif Fasha ME meraih penghargaan KNPI Award 2021 untuk kategori Tokoh Kepala Daerah Peduli Pemuda	Jakarta, 20 Oktober 2021	Wali Kota Jambi



Pemerintah Kota Jambi

	NAMA PENGHARGAAN	PEJABAT/ LEMBAGA YANG MENERBITKAN / MENGANUGERAHKAN	URAIAN	TEMPAT/TANGGAL PENYERAHAN	PENERIMA
1	2	3	4	5	6
21	Perpamsi Award 2021, Kepala Daerah Terbaik Inovasi Pembiayaan Investasi Pengembangan Infrastruktur Air Minum	Menteri PU dan Perumahan Rakyat RI	Wali Kota Jambi Wali Kota Jambi Dr. H. Syarif Fasha ME meraih penghargaan Perpamsi Award 2021, Kepala Daerah Terbaik Inovasi Pembiayaan Investasi Pengembangan Infrastruktur Air Minum	Surakarta, 8 Desember 2021	Wali Kota Jambi
22	Perpamsi Award 2021, Perumda Tirta Mayang Sebagai BUMD Air Minum Berkinerja Sehat yang Terus Berinovasi Memperbaiki Kualitas Pelayanan	Menteri PU dan Perumahan Rakyat RI	Perumda Tirta Mayang meraih penghargaan Perpamsi Award 2021, sebagai BUMD Air Minum Berkinerja Sehat yang Terus Berinovasi Memperbaiki Kualitas Pelayanan	Surakarta, 8 Desember 2021	Perumda Tirta Mayang
23	Terbaik I Capaian Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor 2021	Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana nasional Provinsi Jambi	Pemerintah Kota Jambi meraih penghargaan Terbaik I Capaian Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor 2021 dalam rangka Hari Keluarga Nasional ke-28 Tahun 2021	Kota Jambi, 9 Desember 2021	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi



Pemerintah Kota Jambi

	NAMA PENGHARGAAN	PEJABAT/ LEMBAGA YANG MENERBITKAN / MENGANUGERAHKAN	URAIAN	TEMPAT/TANGGAL PENYERAHAN	PENERIMA
1	2	3	4	5	6
24	Terbaik 1 Capaian bulan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi Bersama Mitra Kerja	Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana nasional Provinsi Jambi	Pemerintah Kota Jambi meraih penghargaan Terbaik 1 Capaian bulan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi Bersama Mitra Kerja dalam rangka Hari Kontrasepsi Sedunia Tahun 2021	Kota Jambi, 9 Desember 2021	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi
25	Natamuki Tahun 2021 Kategori Nindya	International Council for Small Business (ICSB)	Wali Kota Jambi Wali Kota Jambi Dr. H. Syarif Fasha ME meraih penghargaan Natamuki Tahun 2021 Kategori Nindya atas keberhasilan mendorong keberlangsungan pertumbuhan dan perkembangan usaha kecil dan menengah di Kota Jambi	Jakarta, 10 Desember 2021	Perumda Tirta Mayang
26	Anugerah ASN Award 2021	Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Tjahjo Kumolo	ASN Kota Jambi atas nama dr. Hj. Ida Yuliati, M.H.Kes berhasil meraih penghargaan Top 6 Anugerah ASN Award Tahun 2021 kategori PPT Pratama Teladan	Jakarta, 10 Desember 2021	dr. Hj. Ida Yuliati, M.H.Kes
27	Penghargaan Smart City Tahun 2021 Kategori Smart Living	Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Johnny G. Plate	Kota Jambi meraih penghargaan Penghargaan Smart City Tahun 2021 Kategori Smart Living untuk program inovasi Kampung Bantar	Jakarta, 14 Desember 2021	Wali Kota Jambi
28	Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik se-Provinsi Jambi Tahun 2021	Komisi Informasi Provinsi Jambi	Kota Jambi meraih penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik se-Provinsi Jambi Tahun 2021, Kategori PPID Utama Pemerintah Kabupaten Kota, sebagai Badan Publik Informatif (Kategori Tertinggi Keterbukaan Badan Publik)	Kota Jambi, 22 Desember 2021	Wali Kota Jambi
29	Innovative Government Award (IGA) 2021	Menteri Dalam Negeri RI, Prof. Tito Karnavian, Ph.D	Pemerintah Kota Jambi kembali meraih penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2022 dari Kemendagri RI sebagai Kota Inovatif.	Jakarta, 23 Desember 2022	Wali Kota Jambi



Pemerintah Kota Jambi

	NAMA PENGHARGAAN	PEJABAT/ LEMBAGA YANG MENERBITKAN / MENGANUGERAHKAN	URAIAN	TEMPAT/TANGGAL PENYERAHAN	PENERIMA
1	2	3	4	5	6
30	Penghargaan Rating Kota Cerdas Indonesia (RKCI) dan Rating Transformasi Digital 2021	Institut Teknologi Bandung	Kota Jambi meraih 5 Penghargaan Rating Kota Cerdas Indonesia (RKCI) dan Rating Transformasi Digital 2021 untuk kategori Kota Sedang. Kategori Kota Dengan Perhatian Terhadap Perubahan Iklim, Kategori Kota Dengan Energi Cerdas, Kategori Kota Dengan Kesehatan Cerdas, Kategori Kota Dengan MOBilitas Cerdas, Kategori Kota Dengan Lingkungan Cerdas	Bandung, 27 Desember 2021	Wali Kota Jambi

BAB IV PENUTUP

Bab IV Berisi :
*Kesimpulan dari Hasil
Penyusunan Laporan
Kinerja Pemerintah Daerah
Kota Jambi Tahun 2021*

Sebagai bahan pertanggungjawaban, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi ini merupakan sarana untuk introspeksi bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Jambi.

Selain itu diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat dibutuhkan terutama dalam pengambilan kebijakan dan keputusan serta dapat memberikan manfaat bagi proses penyusunan rencana di masa mendatang.

Laporan kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2021 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Jambi dalam melaksanakan berbagai urusan pembangunannya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh jajaran Pemerintah Daerah Kota Jambi. Di masa mendatang Pemerintah Daerah Kota Jambi akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang ingin kita wujudkan bersama.

Secara umum dari 34 rasio indikator kinerja utama yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Jambi di tahun 2021, sebagian besar telah mencapai target dengan persentase capaian lebih atau sama dengan 91 masuk dalam kategori **SANGAT TINGGI** sebanyak 26 indikator (76,47 persen), dalam



kategori **TINGGI** sebanyak 2 indikator (5,88 persen), Kategori RENDAH sebanyak 2 indikator (5,88 persen), kategori SANGAT RENDAH sebanyak 1 indikator (2,94) dan 3 Indikator (17,65 persen) yang sampai dengan akhir saat ini belum dapat di evaluasi. Secara rekapitulasi dapat dijabarkan sebagai berikut:

NO	KATEGORI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERSENTASE
1	SANGAT TINGGI	26	76,47
2	TINGGI	2	5,88
3	SEDANG	-	0
4	RENDAH	2	5,88
5	SANGAT RENDAH	1	2,94
6	TIDAK DAPAT DIEVALUASI	3	17,65
	JUMLAH	34	100

Dari hasil rekapitulasi pencapaian target IKU tahun 2021 yang belum sesuai target dan masuk dalam kategori Rendah dan Sangat Rendah adalah realisasi indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) capaian 58,27%, persentase pembinaan, pengawasan pelayanan perdagangan capaiannya 55,76% dan persentase daya saing produk IKM capaian 25,23%. IKU yang belum dapat mencapai realisasi sesuai target akan menjadi catatan dan perhatian khusus dari Pemerintah Kota Jambi yang disebabkan oleh mewabahnya pandemi covid-19 pada tahun 2021.

Selain itu keberhasilan maupun kekurangan yang dicapai oleh Pemerintah Daerah Kota Jambi tidak terlepas pula dari adanya hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Kekurangan yang terjadi selama tahun 2021 telah dicatat dan akan dievaluasi sebagai bahan untuk menyusun kebijakan operasional guna memperbaiki kinerja di tahun 2022. Sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun 2021 nantinya dapat dicapai dengan lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar dapat diketahui



kendala yang dihadapi dan risiko kegagalannya sedini mungkin dan dicari solusinya, sehingga visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Jambi dapat dicapai pada akhir masa jabatannya.

Namun demikian hambatan dan kendala yang ditemui dalam pelaksanaan strategi (program dan kegiatan) untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut umumnya telah dapat diatasi dengan menggunakan daya dukung dan kemampuan organisasi yang ada. Menyadari hal tersebut, Pemerintah Daerah Kota Jambi akan meningkatkan dan mempersiapkan strategi-strategi pemecahan yang lebih efektif sehingga tahun – tahun mendatang hambatan maupun kendalanya dapat diminimalisir sedini mungkin.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2021. Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang memadai tentang kinerja Pemerintah Daerah Kota Jambi selama tahun 2021 dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Jambi, Maret 2022

WALIKOTA JAMBI

Dr.H.SYARIF FASHA, ME

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KOTA JAMBI**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. H.SYARIF FASHA, ME

Jabatan : Walikota Jambi

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Jambi, Januari 2021

WALIKOTA JAMBI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dr. H. Syarif Fasha'.

Dr. H.SYARIF FASHA, ME

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PEMERINTAH KOTA JAMBI**

NO	MISI, TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH	SATUAN	TARGET AWAL 2018	TARGET TAHUN 2021
1	2	3	4	5	6	7
I	MISI 1 : Penguatan Birokrasi dan Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Berbasis Teknologi Informasi					
	TUJUAN 1: Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					
(1)	Meningkatkan profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,33	2,66
		2.	Indeks profesionalitas ASN	Indeks	N/A	80,00
		3.	Nilai SAKIP	Nilai	B	BB
		4.	Indeks survey persepsi korupsi	Indeks	N/A	3,73
		5.	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	85,28	87
II	MISI 2 : Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat					
	TUJUAN 1: Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					
(2)	Menurunkan tingkat pelanggaran terhadap PERDA dan PERWAL	6.	Penyelesaian jumlah kasus atau pelanggaran PERDA dan PERWAL	%	82	75
(3)	Meningkatkan pelayanan pada kondisi pra, tanggap dan pasca kebakaran serta kebencanaan	7.	Cakupan pelayanan pemadam kebakaran	%	100	100
	TUJUAN 2: Mewujudkan Stabilitas Daerah Yang Kondusif Dan Aman					
(4)	Meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya ideologi pancasila dan kebhinekaan dalam kehidupan sosial masyarakat	8.	Persentase pembinaan terhadap masyarakat terkait ideologi Pancasila	%	20	20
(5)	Meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan dan Parpol dalam pembangunan	9.	Persentase orkesmas dan Parpol yang berperan aktif di masyarakat	%	20	20

NO	MISI, TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH	SATUAN	TARGET AWAL 2018	TARGET TAHUN 2021
1	2	3	4	5	6	7
III	MISI 3 : Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan					
	TUJUAN 1: Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan Yang Berkelanjutan					
(6)	Meningkatkan layanan infrastruktur dan utilitas perkotaan	10.	Cakupan layanan infrastruktur dan utilitas	%	50,59	70,61
(7)	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	11.	Indeks kualitas air	Indeks	43,24	43,32
		12.	Indeks kualitas udara	Indeks	91,27	91,33
		13.	Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	60,77	61,25
IV	MISI 4 : Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan					
	TUJUAN 1: Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi					
(8)	Meningkatnya pembinaan, pengawasan dan pelayanan perdagangan	14.	Persentase pembinaan, pengawasan dan pelayanan perdagangan	%	20	68
(9)	Meningkatnya ketahanan pangan	15.	Skor pola pangan harapan	%	87,90	89,0
(10)	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	16.	Kontribusi pariwisata terhadap PDRB	%	2,35	2,39
(11)	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	17.	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	4	9
(12)	Meningkatkan realisasi investasi	18.	Realisasi investasi	Rupiah	410 M	474,62 M
(13)	Meningkatkan penyerapan dan perlindungan tenaga kerja	19.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	64,96	65,50
(14)	Meningkatkan daya saing usaha skala mikro dan kecil	20.	Persentase usaha mikro kecil yang berkualitas	%	7,61	9,01
		21.	Persentase daya saing produk IKM	%	4,30	6,50
		22.	Persentase koperasi berkualitas	%	13,00	23,85

NO	MISI, TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH	SATUAN	TARGET AWAL 2018	TARGET TAHUN 2021
1	2	3	4	5	6	7
MISI 5: PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT PERKOTAAN						
TUJUAN 1: Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing						
(15)	Meningkatkan derajat kesehatan	23.	Angka Harapan Hidup (AHH)	%	72,34	72,36
(16)	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan	24.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	%	14,25	14,62
		25.	Persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan pelayanan pendidikan	%	21,32	12,32
		26.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	%	10,68	10,70
(17)	Mengendalikan angka kelahiran penduduk	27.	Laju pertumbuhan penduduk	%	N/A	1,03
		28.	Persentase jumlah keluarga sejahtera	%	N/A	96,69
(18)	Meningkatkan kesetaraan gender	29.	Indeks pembangunan gender	Indeks	94,89	94,93
		30.	Indeks pemberdayaan gender	Indeks	68,07	68,30
(19)	Meningkatkan pemenuhan hak anak	31.	Persentase hak anak yang terpenuhi	%	50	90
(20)	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	32.	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	%	60,23	63,00
(21)	Meningkatkan prestasi dan kreativitas kepemudaan	33.	Indeks pembangunan pemuda	%	50	51,0
(22)	Menurunkan angka PMKS	34.	Persentase PMKS yang tertangani	%	60	75

No.	PROGRAM	APBD 2021		
		SKPD	RUTIN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.444.994.116	7.209.200.114	10.865.242.896
2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.465.495.247		
3.	Penelitian dan Pengembangan Daerah	745.553.419		
4.	Kepegawaian Daerah	2.575.878.850	22.748.522.251	28.195.115.340
5.	Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.870.714.239		
6.	Pengelolaan Keuangan Daerah	29.467.424.142	9.484.798.205	40.168.643.025
7.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.216.420.678		
8.	Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.513.254.976	21.896.029.308	25.409.284.284
9.	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	292.499.672	4.423.778.465	7.670.961.027
10.	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.590.944.654		
11.	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	801.267.796		
12.	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	412.515.440		
13.	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	149.955.000		
14.	Pengelolaan Pendidikan	142.058.880.134	314.039.859.346	456.451.284.123
15.	Pengembangan Kurikulum	319.380.058		
16.	Pengendalian Perizinan Pendidikan	33.164.585		
17.	Memenuhkan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	58.589.230.557	227.632.926.591	287.329.308.026
18.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	349.556.917		
19.	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	368.537.970		
20.	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	389.055.991		
21.	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	32.291.938.320	12.801.254.942	654.500.160.616
22.	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	57.782.580.000		
23.	Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	2.406.837.550		
24.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	6.583.728.790		
25.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	1.297.304.490		
26.	Pengembangan Permukiman	56.064.546.320		
27.	Penataan Bangunan Gedung	294.873.827.740		

No.	PROGRAM	APBD 2021		
		SKPD	RUTIN	JUMLAH
28.	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	131.752.099.600		
29.	Penyelenggaraan Jalan	51.575.765.250		
30.	Pengembangan Jasa Konstruksi	2.484.277.857		
31.	Penyelenggaraan Penataan Ruang	4.585.999.757		
32.	Pengembangan Perumahan	806.021.206	6.754.387.164	41.075.361.552
33.	Kawasan Permukiman	5.896.761.754		
34.	Peningkatan Prasarana, Sarana dan utilitas Umum PSU)	27.618.191.428		
35.	Pemberdayaan Sosial	1.310.539.374	5.587.416.180	10.371.810.000
36.	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	89.864.240		
37.	Rehabilitasi Sosial	1.618.864.630		
38.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.048.741.604		
39.	Penanganan Bencana	716.383.972		
40.	Pengendalian Penduduk	245.713.237	4.335.223.508	10.134.512.308
41.	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4.494.642.464		
42.	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.058.933.099		
43.	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	685.255.185	5.011.924.360	10.922.004.616
44.	Perlindungan Perempuan	485.107.261		
45.	Peningkatan Kualitas Keluarga	168.951.590		
46.	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	282.101.733		
47.	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	305.283.114		
48.	Perlindungan Khusus Anak	571.677.622		
49.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan masyarakat Hukum Adat	3.411.703.751		
50.	Perencanaan Lingkungan Hidup	831.279.855	10.359.100.061	62.642.887.000
51.	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.397.570.164		
52.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	7.291.417.193		
53.	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	35.393.630		
54.	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	318.039.260		

No.	PROGRAM	APBD 2021		
		SKPD	RUTIN	JUMLAH
55.	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	325.404.234		
56.	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	55.564.700		
57.	Pengelolaan Persampahan	42.029.117.903		
58.	Pendaftaran Penduduk	187.800.697	8.031.878.382	11.377.426.528
59.	Pencatatan Sipil	304.980.994		
60.	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.820.191.495		
61.	Pengelolaan Profil Kependudukan	32.574.960		
62.	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	11.707.487.549	13.230.159.110	25.137.495.732
63.	Pengelolaan Pelayaran	199.849.073		
64.	Aplikasi Informatika	3.604.776.849	4.978.337.828	14.186.145.000
65.	Informasi dan Komunikasi Publik	5.473.045.903		
66.	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	76.259.850		
67.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	53.724.570		
68.	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	556.518.674	4.959.005.803	7.675.207.000
69.	Penempatan Tenaga Kerja	376.476.056		
70.	Hubungan Industrial	349.983.968		
71.	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	39.999.870		
72.	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	26.641.854		
73.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	391.862.244		
74.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	212.519.559		
75.	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	596.199.044		
76.	Pengembangan UMKM	165.999.928		
77.	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	94.574.800	5.974.080.591	8.013.939.856
78.	Promosi Penanaman Modal	453.304.779		
79.	Pelayanan Penanaman Modal	892.232.509		
80.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	533.747.557		
81.	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	65.999.620		

82.	Pembinaan Perpustakaan	1.142.749.638	7.101.953.289	9.283.500.540
83.	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	49.404.740		
84.	Pengelolaan Arsip	978.762.230		
85.	Perlindungan dan penyelamatan Arsip	10.630.643		
86.	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.263.784.500	4.612.487.084	19.244.784.452
87.	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	12.147.110.968		
88.	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1.221.401.900		
89.	Pengembangan Kebudayaan	1.368.738.196	4.692.162.767	9.287.484.000
90.	Pengembangan Kesenian Tradisional	149.645.130		
91.	Pembinaan Sejarah	24.989.670		
92.	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.653.169.751		
93.	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	304.499.626		
94.	Pemasaran Pariwisata	1.094.278.860		
95.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	137.237.000	8.994.736.240	13.594.113.240
96.	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2.066.560.632		
97.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	688.237.000		
98.	Pengembangan Ekspor	91.576.000		
99.	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	163.225.368		
100.	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	911.000.000		
101.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	311.500.000		
102.	Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	106.075.000		
103.	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	123.966.000		
104.	Penanggulangan Bencana	1.125.647.998	8.261.900.049	13.615.304.480
105.	Penanggulangan Kebakaran	4.227.756.433		
106.	Peningkatan diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	741.071.478	14.346.776.326	18.974.319.712
107.	Penanganan Kerawanan Pangan	73.749.946		
108.	Pengawasan Pengamanan Pangan	176.650.864		
109.	Pengelolaan Perikanan Tangkap	62.489.954		

No.	PROGRAM	APBD 2021		
		SKPD	RUTIN	JUMLAH
110.	Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.795.283.880		
111.	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	141.620.369		
112.	Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian	652.917.845		
113.	Penyediaan dan pengembangan Prasarana Pertanian	248.099.646		
114.	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	532.020.209		
115.	Pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian	97.639.500		
116.	Penyuluhan Pertanian	105.999.695		
117.	Peningkatan Ketentraman dan ketertiban Umum	1.168.675.821	11.285.934.787	12.454.610.608
118.	Penyelenggaraan Pengawasan	2.414.850.000	8.768.703.424	11.581.238.424
119.	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	397.685.000		
120.	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	27.011.923.250	46.697.545.614	73.709.468.864
121.	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	26.538.938.800	34.853.566.119	64.756.504.640
122.	Perekonomian dan Pembangunan	3.363.999.721		
123.	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	0	19.797.942
124.	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-		
125.	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-		
126.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-		
127.	Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	19.797.942		
TOTAL		1.056.084.816.245	737.467.897.964	1.792.552.714.209

Jambi,

2021

WALIKOTA JAMBI



Dr. H. SYARIF FASHA, ME